



LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL: 31 AGUSTUS 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5192);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2007 Nomor 10/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2/B);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2/C);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 4/C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Blitar Nomor 17.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 16/A);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 5/A);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 6/A);
35. Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 7/E);
36. Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 34/E);
37. Peraturan Bupati Blitar Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 86/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 8/A); dan

38. Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 40/A).

1.3 Unsur Laporan Keuangan

1.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi pendapatan pada periode Tahun Anggaran (TA) 2019 adalah sebesar Rp2.401.031.952.735,86 mencapai 99,21% dari anggarannya. Realisasi belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp2.135.460.078.975,71 mencapai 91,64 % dari anggarannya. Realisasi transfer pada TA 2019 adalah sebesar Rp326.827.100.068,00 atau mencapai 99,75% dari anggarannya.

1.3.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Saldo Anggaran Lebih Awal pada TA 2019 adalah sebesar Rp237.737.285.410,26 Sedangkan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Rp237.737.324.912,11. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp176.500.198.604,26, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp39.501,85, sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah sebesar Rp176.500.198.604,26.

1.3.3 Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun 2019 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.448.281.215.370,09 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp316.620.320.349,73, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp25.590.650.548,03, Aset Tetap sebesar Rp4.045.576.555.594,55, dan Aset Lainnya sebesar Rp60.493.6688.877,78.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp35.650.690.466,09 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.412.630.524.904,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1.3.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, mencakup Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa.

Pendapatan-LO selama Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.424.893.949.744,58, Beban selama Tahun 2019 sebesar Rp2.202.583.603.149,48, sehingga terdapat Surplus dari operasi sebesar Rp222.310.346.595,10. Terdapat defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp272.316.121,66, dan Pos Luar Biasa sebesar Rp62.434.500,00. Dengan demikian terdapat Surplus/Defisit-LO sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar Rp221.975.595.973,44.

1.3.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Saldo awal Kas per 1 Januari 2019 sebesar Rp237.738.611.473,26 selama periode Tahun 2019 terjadi penurunan kas sebesar Rp61.242.312.869,00 sehingga saldo akhir Kas di Bendahara Umum Daerah, Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah, dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah adalah sebesar Rp176.496.298.604,26. Selain itu juga terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.900.000,00 sehingga Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp176.500.198.604,26.

1.3.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Ekuitas Lainnya, dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas Awal per 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp4.021.633.372.273,19 Sedangkan Surplus/Defisit-LO sebesar Rp221.975.595.973,44. Terdapat Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp169.021.556.656,81 sehingga Ekuitas Akhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.412.630.524.904,00.

1.3.7 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Unsur Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah
 - 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target
 - 2.3.1 Program Pencapaian Target Kinerja APBD

III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah Daerah
 - 3.1.1 Pendapatan Daerah
 - 3.1.2 Belanja Daerah
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA
 - 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja
 - 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
 - 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO
 - 4.3.5 Kebijakan Akuntansi Beban
 - 4.3.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
 - 4.3.7 Kebijakan Akuntansi Piutang
 - 4.3.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
 - 4.3.9 Kebijakan Akuntansi Investasi



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 4.3.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.3.11 Kebijakan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan
- 4.3.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- 4.3.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- 4.3.14 Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud
- 4.3.15 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 5.2.3 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.4 SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan
- 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Pendapatan - LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Defisit Non Operasional
 - 5.4.4 Pos Luar Biasa
 - 5.4.5 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan LRA
 - 5.4.6 Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja LRA
- 5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5 Posisi Kas
- 5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.7 Penjelasan atas informasi lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 5.7.5 Penjelasan Perbedaan antara LRA CALK 2019 dengan Lampiran I Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019
- 5.7.6 Penjelasan Perbedaan antara LRA CALK 2019 dengan Lampiran I Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019
- 5.7.7 Konversi Format Laporan Realisasi Anggaran
- 5.7.8 Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
- 5.8 Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Realisasi Indikator makro ekonomi Pemerintah Kabupaten Blitar baik Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Gini sebagaimana pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Realisasi Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

No	Indikator	Realisasi		Sumber Data
		Tahun	Nilai	
1.	Pertumbuhan Ekonomi			
a.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2017	5,07	Katalog BPS 9302021.3505: PDRB Kab. Blitar Menurut Lapangan Usaha 2014-2018, hal. 84
		2018	5,10	
b.	PDRB per Kapita (ADHK) (juta Rupiah)	2017	20,03	Katalog BPS 1102001.3505: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019, hal. 439-443 & hal. 121
		2018	20,98	
c.	PDRB per Kapita (ADHB) (juta Rupiah)	2017	27,43	Katalog BPS 9302021.3505: PDRB Kab. Blitar Menurut Lapangan Usaha 2014-2018, hal. 85-86
		2018	29,55	
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2018	3,37	BPS Provinsi Jawa Timur-Sakernas Agustus 2018 (link: https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/09/1643/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-dan-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-menurut-kabupaten-kota-2016-2018.html)
		2019	3,11	
3.	Kemiskinan			
a.	Persentase Penduduk Miskin	2018	9,72	Katalog BPS 1102001.3505: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019, hal. 441
		2019	8,94	
b.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	2018	112,40	Katalog BPS 1102001.3505: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019, hal. 441
		2019	103,75	
4.	Indeks Pembangunan Manusia			
a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	2017	69,33	Berita Resmi Statistik No. 26/04/35/Th.XVII Tanggal 15 April 2019: IPM Kab/Kota Jawa Timur Tahun 2018, hal.7
		2018	69,93	
b.	Angka Harapan Hidup (AHH)	2017	72,99	
		2018	73,16	
c.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2017	7,26	
		2018	7,27	
d.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	2017	12,43	
		2018	12,44	
e.	Pengeluaran per Kapita (ribu Rupiah)	2017	9.828	
		2018	10.327	
5.	Ketimpangan			
a.	Indeks Gini	2018	0,38	Publikasi Statistik: Distribusi Pendapatan Kab. Blitar 2019 hal. 63 (Kerjasama Dinas Kominfo Kab. Blitar dengan ITS).
		2019	n.a	

Ukuran keberhasilan suatu daerah diukur dari indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pembangunan sehingga dapat diperbandingkan antara target yang diinginkan dengan hasil atau realisasi yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Blitar periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Dalam hal ini, indikator kinerja Kabupaten Blitar sebagaimana disajikan pada **Lampiran1** dan **Lampiran 2**.

Sementara itu, keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar, ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat **Lampiran 3**, aspek pelayanan umum **Lampiran 4**, dan aspek daya saing daerah **Lampiran 5**. Indikator yang disajikan dalam 3 (tiga) kelompok utama ini memberikan gambaran target penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Blitar selama 5 (lima) tahun. Indikator Kinerja Daerah merupakan rencana target yang ingin dicapai dari bekerjanya keluaran (output) kegiatan, hasil (outcome) program dan dampak (impact) sasaran/tujuan.

2.2 Kebijakan Keuangan

APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dengan metode pengelolaan keuangan berbasis akrual, sehingga pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual. Di dalam merencanakan program dan kegiatan dalam APBD Kabupaten Blitar telah dilakukan sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar perangkat daerah guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan. Kebijakan Kabupaten Blitar diarahkan sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (13) merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten Blitar terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK);



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus meliputi Dana Desa, Dana Insentif Daerah, dan Dana Bantuan Keuangan dari provinsi/kabupaten/kota.

A. Pendapatan Asli Daerah

Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbagi menjadi 4 jenis: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Mengacu pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan peraturan daerah sebagai dasar PAD.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut:

1. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pengutannya dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada tahun 2019 dan serta pencapaian penerimaan pendapatan pada tahun 2018.
2. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Secara umum, proses ini meliputi:
 - a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi atau elektronisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak/retribusi dengan aparat;
 - b. Penyempurnaan landasan hukum serta bagi pengenaan pajak dan retribusi;
 - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.
3. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi meliputi:
 - a. *Updating* data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - b. Pengkajian penerapan jenis tarif retribusi baru melalui evaluasi dan penetapan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Daerah.
4. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD:
 - a. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) dalam hal ini Savitri Indah dan PT BPR Hambangun Artha Selaras, adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
 - b. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public*



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

service oriented) dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Kebijakan PAD

1. Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah dalam rangka bagi hasil;
2. Pendapatan yang dianggarkan pada pos pendapatan daerah yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Setiap rincian objek pendapatan daerah yang dianggarkan harus mencantumkan dasar hukum pemungutan/penerimaannya;
3. Dalam merencanakan PAD berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
4. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir dan bagian laba atas penyertaan modal dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (metode ekuitas) sehingga dicatat sebagai penerimaan pembiayaan. Sedangkan bunga yang timbul sebagai akibatnya dianggarkan dalam APBD pada Akun Pendapatan, Kelompok PAD, Jenis Lain-Lain PAD yang Sah, Objek Pendapatan hasil Pengelolaan Dana Bergulir dan Rincian Objek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
5. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik pemerintah daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik pemerintah daerah.
6. Atas pemungutan pajak dan retribusi daerah diberikan insentif pemungutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Penganggaran belanja insentif



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pemungutan dialokasikan pada:

- a. Biaya pemungutan pajak daerah;
 - b. Biaya pemungutan retribusi daerah.
7. Pendapatan pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) RSUD Ngudi Waluyo dan 24 puskesmas. Pendapatan BLUD diasumsikan sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan dikelola langsung oleh BLUD untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali hibah terikat diperlakukan sesuai peruntukannya.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD, strategi pencapaian target peningkatan PAD sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
4. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Jatim;
5. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
6. Pembinaan dan revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
7. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan PAD;
8. Pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
9. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kecamatan, kelurahan, dan pemerintah desa dalam operasional pemungutan dan pelayanan pajak dan retribusi pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.

C. Kebijakan Umum Dana Perimbangan

1. Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat (Penerimaan Domestik Netto).
2. Mendorong peningkatan capaian indeks pembangunan manusia, PDRB perkapita, serta mempersiapkan data teknis lainnya sebagai dasar penghitungan DAU meliputi: jumlah penduduk, total PAD, total gaji PNS Daerah.
3. Dana yang bersumber dari DAK juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program dan kegiatan unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK termasuk melengkapi syarat ketentuan berlaku untuk pengusulan DAK khususnya DAK fisik dimana pengusulan menggunakan metode



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

proposal based serta meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi antar kegiatan DAK Fisik, antar bidang DAK, antar wilayah.

4. Dana yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi hasil Pajak sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah daerah mendorong peningkatan aktivitas perekonomian daerah. Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah:
 - a. Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan.

D. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan pendapatan daerah yang bersumber dari:

1. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2019, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
2. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah provinsi yang dianggarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Daerah Provinsi tahun 2019. Apabila belum ditetapkan maka didasarkan alokasinya sesuai rata-rata penerimaan tahun 2015, 2016, 2017, 2018 serta dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2019. Jenis Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah provinsi yang diterima Kabupaten Blitar:
 - a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Bagi Hasil Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan;
 - e. Bagi Hasil Pajak Rokok;
 - f. Dana Bagi Hasil Bantuan dari Pihak Ketiga (SP3);
 - g. Dana Bagi Hasil Bea Tera Ulang;
 - h. Dana Bagi Hasil Pemeriksaan Ternak.
3. Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian dimana komponen utama adalah Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD). Penganggaran DD dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DD TA 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai DD TA 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

belum ditetapkan, maka penganggaran DD tersebut didasarkan pada DD TA 2018. Sedangkan DID dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DID TA 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2019 diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2019.

4. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya bersifat *ad hoc*. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2019.

Upaya yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar adalah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memperoleh Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dan hibah maupun bantuan keuangan lainnya.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada tahun 2019 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perUndang Undangan.

Sesuai amanat Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 298 ayat (1) belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Belanja urusan pendidikan dipertahankan di atas 20% dari rasio belanja daerah, dan belanja urusan kesehatan diupayakan di atas 10% dari rasio belanja daerah. Pada tahun 2019 selain mensinkronkan dengan kebijakan nasional di atas, belanja pemerintah daerah diarahkan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah sesuai dengan RPJMD 2016-2021.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

A. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.

Penganggaran belanja pegawai tahun 2019 termasuk untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2018. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Penganggaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD mempedomani kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penganggaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Blitar berencana memberikan Tunjangan Kinerja PNS dengan mempedomani Penganggaran dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pada sisi lain, terkait tunjangan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN TA 2019 pada Dana Transfer ke Daerah, Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dimaksud dianggarkan jenis Belanja Pegawai.

2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Kebijakan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagai berikut:

- a. Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah memenuhi kriteria:
 - 1) Peruntukannya ditetapkan secara spesifik;
 - 2) Tidak wajib mengikat dan tidak terus menerus, kecuali ditetapkan lain oleh perUndang Undangan;
 - 3) Memenuhi persyaratan penerima hibah.
- b. Bantuan Sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dimana jika tidak mendapatkan bantuan maka terjadi risiko sosial yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam.

3. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada pemerintah provinsi, instansi vertikal dan pemerintah desa berdasarkan peraturan daerah tentang belanja bagi hasil besarnya disesuaikan dengan rencana penerimaan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah pada tahun 2019. Pelampauan target tahun 2019 akan direalisasikan pada tahun 2020 sebagai alokasi kurang bayar bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Belanja Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada pemerintah provinsi, instansi vertikal dan pemerintah desa disalurkan dua kali dalam setahun. Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Tata cara alokasi dan penatausahaan Belanja Bagi Hasil diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

4. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah kabupaten mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka menunjang fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk mempercepat/akselerasi pembangunan desa. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Salah satu bentuk bantuan keuangan adalah ADD dan DD. Alokasi besaran dihitung sesuai amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ADD paling sedikit dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi DAK.

Penganggaran DD dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DD TA 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DD TA 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran DD tersebut didasarkan pada alokasi DD Tahun Anggaran 2018.

Pada Belanja Bantuan Keuangan juga dialokasikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD sesuai perundang-undangan. Bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Blitar mengalokasikan belanja tidak terduga dengan mempertimbangkan realisasi TA 2018, dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. Belanja Langsung

Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan pemerintahan fungsi penunjang. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat dan capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi Kabupaten Blitar mendukung program dan gerakan Bela Beli Blitar serta melibatkan usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

1. Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD, pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Kebijakan belanja barang dan jasa dalam belanja langsung meliputi:

- a. Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang TA 2018.
- c. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
- d. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif.
- e. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.
- f. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada TA berkenaan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Belanja Modal

Pemerintah daerah akan memprioritaskan peningkatan alokasi belanja modal pada APBD TA 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mengendalikan inflasi.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi Kabupaten Blitar mendukung program dan gerakan Bela Beli Blitar serta melibatkan usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada TA yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, serta pembayaran pokok hutang.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

2.3.1. Program Pencapaian Target Kinerja APBD



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk pencapaian target kinerja TA 2019, Pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai beberapa program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD Pemerintah Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dijelaskan dalam Daftar Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar diklasifikasikan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar TA 2019.

Guna memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Kinerja Pendapatan Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp2.420.076.116.870,05 yang terdiri dari anggaran pendapatan untuk urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp129.910.040.405,00 anggaran pendapatan untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp9.179.057.900,00 anggaran pendapatan untuk urusan pilihan sebesar Rp8.371.998.432,00 dan anggaran pendapatan untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang sebesar Rp2.272.615.020.133,05.

Realisasi kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp2.401.031.952.735,86 yang terdiri dari realisasi pendapatan untuk urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp139.245.037.253,46 realisasi pendapatan untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp9.538.653.100,00 realisasi pendapatan untuk urusan pilihan sebesar Rp8.504.068.651,00 dan realisasi pendapatan untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang sebesar Rp2.243.744.193.731,40. Adapun rincian untuk kinerja pendapatan sebagai berikut.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2019

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4 . 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	129.910.040.405,00	139.245.037.253,46	9.334.996.848,46	107,19
4 . 1.01	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1.02	Kesehatan	126.880.040.405,00	136.999.938.721,46	10.119.898.316,46	107,98
4 . 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.030.000.000,00	2.245.098.532,00	(784.901.468,00)	74,10
4 . 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	9.179.057.900,00	9.538.653.100,00	359.595.200,00	103,92
4 . 2.05	Lingkungan Hidup	82.500.000,00	99.650.000,00	17.150.000,00	120,79
4 . 2.09	Perhubungan	9.096.557.900,00	9.439.003.100,00	342.445.200,00	103,76
4 . 3	Urusan Pilihan	8.371.998.432,00	8.504.068.651,00	132.070.219,00	101,58



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4 . 3.02	Pariwisata	3.310.161.740,00	3.021.430.588,00	(288.731.152,00)	91,28
4 . 3.03	Pertanian	553.202.000,00	592.725.000,00	39.523.000,00	107,14
4 . 3.07	Perindustrian	4.508.634.692,00	4.889.913.063,00	381.278.371,00	108,46
4 . 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.272.615.020.133,05	2.243.744.193.731,40	(28.870.826.401,65)	98,73
4 . 4.04	Kuangan	2.272.615.020.133,05	2.243.744.193.731,40	(28.870.826.401,65)	98,73
	Jumlah	2.420.076.116.870,05	2.401.031.952.735,86	(19.044.164.134,19)	98,73

3.1.2 Belanja Daerah

Kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp2.657.816.702.280,31 yang terdiri dari anggaran belanja untuk urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp1.694.120.331.481,03, urusan wajib bukan pelayanan dasar Rp135.363.189.485,00, urusan pilihan Rp100.730.124.628,00, dan anggaran belanja untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang sebesar Rp727.603.056.686,28.

Realisasi kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada tahun 2019 sebesar Rp2.462.287.179.043,71 yang terdiri dari realisasi belanja untuk urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp1.547.423.570.233,79, urusan wajib bukan pelayanan dasar Rp128.471.257.586,26, urusan pilihan Rp93.273.756.480,76, dan urusan pemerintahan fungsi penunjang Rp693.118.594.742,90. Adapun rincian untuk kinerja belanja sebagai berikut:

**Tabel 3. Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2019**

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5 . 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.694.120.331.481,03	1.547.423.570.233,79	(146.696.761.247,24)	91,34
5 . 1.01	Pendidikan	879.085.293.305,02	818.781.606.396,76	(60.303.686.908,26)	93,14
5 . 1.02	Kesehatan	465.052.598.000,01	440.687.456.570,87	(24.365.141.429,14)	94,76
5 . 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	260.255.830.450,00	203.955.895.398,16	(56.299.935.051,84)	78,37
5 . 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	46.800.888.400,00	44.338.827.147,00	(2.462.061.253,00)	94,74
5 . 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	33.248.318.229,00	30.822.913.559,00	(2.425.404.670,00)	92,71
5 . 1.06	Sosial	9.677.403.097,00	8.836.871.162,00	(840.531.935,00)	91,31
5 . 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	135.363.189.485,00	128.471.257.586,26	(6.891.931.898,74)	94,91
5 . 2.01	Tenaga Kerja	7.399.276.150,00	7.121.498.476,00	(277.777.674,00)	96,25
5 . 2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.895.344.350,00	4.491.004.415,00	(404.339.935,00)	91,74



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5 . 2.03	Pangan	2.100.453.000,00	2.014.281.007,00	(86.171.993,00)	95,90
5 . 2.04	Pertanahan	10.904.410.000,00	10.658.757.985,00	(245.652.015,00)	97,75
5 . 2.05	Lingkungan Hidup	17.879.367.507,00	16.184.969.328,30	(1.694.398.178,70)	90,52
5 . 2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	13.297.233.308,00	12.624.029.632,30	(673.203.675,70)	94,94
5 . 2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	16.914.690.536,00	16.536.353.977,00	(378.336.559,00)	97,76
5 . 2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.133.476.786,00	8.574.883.187,00	(558.593.599,00)	93,88
5 . 2.09	Perhubungan	11.696.890.842,00	10.865.150.436,10	(831.740.405,90)	92,89
5 . 2.10	Komunikasi dan Informatika	14.051.780.825,00	13.710.263.573,60	(341.517.251,40)	97,57
5 . 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.209.230.802,00	7.803.259.850,00	(405.970.952,00)	95,05
5 . 2.12	Penanaman Modal	6.236.043.354,00	6.033.471.129,00	(202.572.225,00)	96,75
5 . 2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	3.307.400.000,00	3.213.293.500,00	(94.106.500,00)	97,15
5 . 2.14	Statistik	313.896.025,00	313.369.601,00	(526.424,00)	99,83
5 . 2.15	Persandian	12.521.000,00	12.426.420,00	(94.580,00)	99,24
5 . 2.16	Kebudayaan	4.002.977.500,00	3.638.255.450,00	(364.722.050,00)	90,89
5 . 2.17	Perpustakaan	4.307.597.500,00	4.039.793.308,00	(267.804.192,00)	93,78
5 . 2.18	Kearsipan	700.600.000,00	636.196.310,96	(64.403.689,04)	90,81
5 . 3	Urusan Pilihan	100.730.124.628,00	93.273.756.480,76	(7.456.368.147,24)	92,60
5 . 3.01	Kelautan dan Perikanan	4.457.354.900,00	4.281.345.925,00	(176.008.975,00)	96,05
5 . 3.02	Pariwisata	13.879.030.872,00	12.749.798.093,76	(1.129.232.778,24)	91,86
5 . 3.03	Pertanian	55.827.563.702,00	53.063.591.263,00	(2.763.972.439,00)	95,05
5 . 3.06	Perdagangan	17.730.140.670,00	14.740.761.314,00	(2.989.379.356,00)	83,14
5 . 3.07	Perindustrian	8.576.186.984,00	8.183.847.110,00	(392.339.874,00)	95,43
5 . 3.08	Transmigrasi	259.847.500,00	254.412.775,00	(5.434.725,00)	97,91
5 . 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	727.603.056.686,28	693.118.594.742,90	(34.484.461.943,38)	95,26
5 . 4.01	Administrasi Pemerintahan	229.143.178.860,00	212.024.957.806,00	(17.118.221.054,00)	92,53
5 . 4.02	Pengawasan	12.665.938.722,00	10.907.059.860,40	(1.758.878.861,60)	86,11
5 . 4.03	Perencanaan	12.340.797.350,00	11.781.249.324,50	(559.548.025,50)	95,47
5 . 4.04	Keuangan	453.812.165.036,28	440.578.243.883,00	(13.233.921.153,28)	97,08
5 . 4.05	Kepegawaian	10.857.568.718,00	9.469.667.335,00	(1.387.901.383,00)	87,22
5 . 4.06	Pendidikan dan Pelatihan	6.893.560.000,00	6.532.329.448,00	(361.230.552,00)	94,76
5 . 4.07	Penelitian dan Pengembangan	1.889.848.000,00	1.825.087.086,00	(64.760.914,00)	96,57
	Jumlah	2.657.816.702.280,31	2.462.287.179.043,71	(195.529.523.236,60)	92,64

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. Sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan masih kurang;
3. Tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai bidangnya masih terbatas;
4. Tingkat pemahaman masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan belum sama, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda; dan
5. Sesi pengeluaran terkendala dengan keterlambatan petunjuk teknis dari pemerintah pusat serta terjadi perbedaan juknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan entitas lain, sehingga anggaran tidak terserap.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

4.3 Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi

4.3.1. Pendapatan-LRA

Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan kas di rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat terjadi aliran kas masuk di rekening Bendahara Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.3.2. Belanja

Definisi

Belanja merupakan semua pengeluaran kas di Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA bersangkutan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.3. Pembiayaan

Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengakuan

Penerimaan Pembiayaan dan/atau Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadi aliran kas masuk dan/atau keluar Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Penerimaan Pembiayaan dan/atau Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan/pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

4.3.4. Pendapatan-LO

Definisi

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran

Pendapatan-LO diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.5. Beban

Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya Kewajiban.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset; atau
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar nilai sumber daya ekonomi yang dikonsumsi.

4.3.6. Kas Dan Setara Kas

Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Pengakuan

Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan/atau setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

4.3.7. Piutang

Definisi

Piutang adalah hak Pemerintah Daerah atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan

Piutang diakui pada saat munculnya hak Pemerintah Daerah atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengukuran

Piutang diukur sebesar nilai nominal.

Penilaian

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penilaian piutang berdasarkan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur.

4.3.8. Persediaan

Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti hewan dan tumbuhan.

Pengakuan

Persediaan diakui dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengukuran

Persediaan diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pencatatan

Persediaan dicatat dengan metoda perpetual. Metoda perpetual adalah metoda yang selalu mencatat setiap terjadi perubahan pada persediaan.

Penilaian

Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP).

4.3.9. Investasi

Investasi Jangka Pendek

Definisi

Investasi jangka pendek merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah.

Pengakuan

Pengeluaran kas menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek pada saat:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial dan/atau jasa potensial masa yang akan datang atas investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh oleh pemerintah daerah;
- Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara andal (*reliable*);
- Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari tiga bulan sampai dengan dua belas bulan;
- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
- Berisiko rendah.

Pengukuran

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.3.10. Aset Tetap

Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dan/atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat sosial dan atau manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran

Aset tetap diukur dengan harga perolehan. Apabila pengukuran aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Memperpanjang masa manfaat; dan/atau
- b. Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah bulan menggunakan pendekatan bulanan yaitu penyusutan dihitung satu bulan.

4.3.11. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Definisi

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan

KDP diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai KDP, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- e. Masih dalam proses pembangunan; dan
- f. Belum siap dipakai.

Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diukur sebesar biaya perolehan.

4.3.12. Dana Cadangan

Definisi

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan.

Pengukuran

Pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai buku.

Penilaian

Dana cadangan dinilai sebesar nilai buku, yaitu nilai nominal ditambah dengan hasil pengelolaan dana cadangan.

4.3.13. Aset Lainnya

Definisi

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Pengakuan

Aset lainnya diakui pada saat:

- a. Memberikan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa yang akan datang; dan
- b. Nilainya dapat diukur dengan handal.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran

Pengukuran aset lainnya berupa tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi keuangan daerah, kemitraan dengan pihak ketiga diukur sebesar nilai nominal. Lain-lain aset lainnya diukur sebesar nilai buku.

4.3.14. Aset Tak Berwujud

Definisi

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh pemerintah daerah untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Pengakuan

ATB diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai ATB, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aset non keuangan;
- b. Tidak berwujud;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- e. Dapat diidentifikasi;
- f. Dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah; dan
- g. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan.

Pengukuran

ATB diukur dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai ATB didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4.3.15. Kewajiban

Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Pengakuan

Kewajiban jangka pendek diakui pada saat:

- a. Terdapat kemungkinan besar (*probable*) adanya aliran keluar sumber daya ekonomi (misalnya kas) yang bermanfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah dalam waktu paling lama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sejak saat pelaporan; dan
- b. Nilai kewajiban dapat diukur dengan handal.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat:

- a. Terdapat kemungkinan besar (*probable*) adanya aliran keluar sumber daya ekonomi (misalnya kas) yang bermanfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sejak saat pelaporan; dan
- b. Nilai kewajiban dapat diukur dengan andal.

Pengukuran

Kewajiban diukur sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.1.1 Pendapatan	2.401.031.952.735,86	2.352.130.150.237,09

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2019 terealisasi sebesar Rp2.401.031.952.735,86 atau 99,21% dari anggaran sebesar Rp2.420.076.116.870,05, lebih tinggi Rp48.901.802.498,77 atau 2,08% jika dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp2.352.130.150.237,09, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2019 dan Realisasi TA 2018

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
a.	Pendapatan Asli Daerah	261.661.013.813,05	285.742.715.698,86	252.453.245.801,27
b.	Pendapatan Transfer	2.075.434.103.057,00	2.022.293.757.037,00	2.014.497.020.105,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	82.981.000.000,00	92.995.480.000,00	85.179.884.330,82
Jumlah		2.420.076.116.870,05	2.401.031.952.735,86	2.352.130.150.237,09

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	285.742.715.698,86	252.453.245.801,27

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Blitar selama TA 2019 terealisasi sebesar Rp285.742.715.698,86 atau 109,20% dari anggaran sebesar Rp261.661.013.813,05, lebih tinggi Rp33.289.469.897,59 atau 13,19% jika dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp252.453.245.801,27, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
TA 2019 dan Realisasi TA 2018**

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
1)	Pendapatan Pajak Daerah	88.443.005.692,80	96.512.500.208,81	89.224.336.207,85
2)	Pendapatan Retribusi Daerah	20.331.880.206,00	19.458.062.217,00	23.198.217.113,00
3)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.088.690.019,50	2.390.396.738,95	1.756.190.019,50
4)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	150.797.437.894,75	167.381.756.534,10	138.274.502.460,92
Jumlah		261.661.013.813,05	285.742.715.698,86	252.453.245.801,27



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
1. Pajak Daerah	96.512.500.208,81	89.224.336.207,85

Pajak Daerah merupakan unsur PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Blitar dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Realisasi selama TA 2019 sebesar Rp96.512.500.208,81 atau 109,12% dari anggaran sebesar Rp88.443.005.692,80, lebih tinggi Rp7.288.164.000,96 atau 8,17% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp89.224.336.207,85 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2019 dan Realisasi TA 2018

No	Pajak Daerah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
a)	Pajak Hotel	91.305.000,00	101.310.000,00	91.305.000,00
b)	Pajak Restoran	3.227.047.691,30	3.991.530.185,95	3.259.845.500,45
c)	Pajak Hiburan	875.764.350,00	1.104.869.654,00	875.764.350,00
d)	Pajak Reklame	708.872.307,75	736.362.726,44	708.872.307,75
e)	Pajak Penerangan Jalan	38.000.000.000,00	40.399.185.197,00	38.098.243.826,00
f)	Pajak Parkir	123.550.000,00	130.983.100,00	123.550.000,00
g)	Pajak Air Tanah	136.000.000,00	140.166.778,76	136.169.039,65
h)	Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	280.466.343,75	308.872.500,00	290.967.250,00
i)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	28.050.000.000,00	28.058.228.367,25	29.271.282.948,00
j)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	16.950.000.000,00	21.540.991.699,41	16.368.335.986,00
Jumlah		88.443.005.692,80	96.512.500.208,81	89.224.336.207,85

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
2. Retribusi Daerah	19.458.062.217,00	23.198.217.113,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil. Realisasi selama TA 2019 sebesar Rp19.458.062.217,00 atau 95,70% dari anggaran sebesar Rp20.331.880.206,00, lebih rendah Rp3.740.154.896,00 atau 16,12% daripada realisasi TA 2018 sebesar Rp23.198.217.113,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2019 dan Realisasi TA 2018

No	Retribusi Daerah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi	
			2019 (Rp)	2018 (Rp)
a)	Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.500.000,00	30.670.000,00	2.009.731.000,00
b)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	256.102.000,00	286.814.000,00	258.318.800,00
c)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.882.747.000,00	8.198.350.000,00	7.883.480.000,00
d)	Retribusi Pelayanan Pasar	4.009.234.692,00	4.071.270.000,00	3.888.899.000,00
e)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.081.430.000,00	1.104.870.000,00	1.086.955.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Retribusi Daerah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi	
			2019 (Rp)	2018 (Rp)
f)	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	140.000.000,00	177.677.900,00	134.272.700,00
g)	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	655.000.000,00	673.807.400,00	657.897.760,00
h)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.100.308.514,00	810.080.140,00	3.477.103.518,00
i)	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	1.800.000,00
j)	Retribusi Tempat Pelelangan	15.000.000,00	0,00	0,00
k)	Retribusi Terminal	106.282.000,00	106.062.000,00	100.024.000,00
l)	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	18.960.000,00	17.500.000,00	21.250.000,00
m)	Retribusi Rumah Potong Hewan	96.000.000,00	93.070.000,00	96.280.000,00
n)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.877.476.000,00	2.658.191.000,00	2.443.027.000,00
o)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.000.000,00	75.150.000,00	73.370.000,00
p)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	1.154.351.777,00	1.064.968.335,00
q)	Retribusi Izin Trayek	840.000,00	198.000,00	840.000,00
Jumlah		20.331.880.206,00	19.458.062.217,00	23.198.217.113,00

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.390.396.738,95	1.756.190.019,50

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah. Realisasi selama TA 2019 sebesar Rp2.390.396.738,95 atau 114,44% dari anggaran sebesar Rp2.088.690.019,50, lebih tinggi Rp634.206.719,45 atau 36,11% dari TA 2018 yaitu sebesar Rp1.756.190.019,50. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut.

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2019 dan TA 2018

No	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
a)	PD Savitri Indah	25.000.000,00	20.500.000,00	12.500.000,00
b)	BPD Jatim	1.741.791.019,50	1.801.430.575,95	1.741.791.019,50
c)	PT BPR Jatim	1.899.000,00	2.150.000,00	1.899.000,00
d)	BPR Hambangan Artha Selaras	320.000.000,00	566.316.163,00	0,00
Jumlah		2.088.690.019,50	2.390.396.738,95	1.756.190.019,50

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan pada BPR Hambangan Artha Selaras pada Tahun 2018 sebesar Rp0,00 disebabkan oleh BPR Hambangan Artha Selaras belum memenuhi syarat kecukupan modal kerja sesuai modal minimal yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan zonanya berdasarkan surat dari OJK Nomor S-404/KO.36/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pada Tahun 2019 BPR Hambangan Artha Selaras melakukan penyetoran bagian laba sebesar Rp566.316.163,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a. Bagian Laba Tahun 2015 sebesar Rp193.760.110,00 sesuai dengan STS Nomor 01507/STS/3.07.01.01/2019;
- b. Bagian Laba Tahun 2016 sebesar Rp154.546.464,00 sesuai dengan STS Nomor 02615/STS/3.07.01.01/2019;
- c. Bagian Laba Tahun 2017 sebesar Rp218.009.589,00 sesuai dengan STS Nomor 02820/STS/3.07.01.01/2019;

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
4. Lain-lain PAD yang Sah	167.381.756.534,10	138.274.502.460,92

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama TA 2019 sebesar Rp167.381.756.534,10 atau 111,00% dari anggaran sebesar Rp150.797.437.894,75, lebih tinggi Rp29.107.254.073,18 atau 21,05% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp138.274.502.460,92 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
TA 2019 dan Realisasi TA 2018**

No	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
a)	Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	86.062.500,00	121.186.628,00	115.203.800,00
b)	Penerimaan jasa giro	2.219.136.952,55	2.061.744.539,18	2.219.136.952,55
c)	Penerimaan bunga	14.448.343.270,39	18.823.525.048,00	15.448.343.270,39
d)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	216.696.364,00	232.250.000,00	216.896.364,00
e)	Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	922.000.000,00	1.296.390.520,42	960.619.733,94
f)	Pendapatan Denda Pajak	258.000.000,00	384.863.870,44	315.689.642,51
g)	Pendapatan Denda Retribusi	25.258.900,00	30.185.500,00	25.258.900,00
h)	Pendapatan dari pengembalian	1.001.371.829,27	3.558.153.005,77	3.356.275.395,27
i)	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.556.000.000,00	2.436.737.500,00	0,00
j)	Pendapatan dari Badan Layanan Umum	126.862.540.405,00	136.969.268.721,46	86.337.698.737,72
k)	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.767.735.333,54	1.107.161.612,83	1.767.735.333,54
l)	Fasilitas sosial dan umum	20.000.000,00	24.550.000,00	14.490.000,00
m)	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	566.600,00	0,00	566.600,00
n)	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	27.239.420.468,00
o)	Pendapatan Hasil Kerjasama-LRA	413.725.740,00	335.739.588,00	257.167.263,00
Jumlah		150.797.437.894,75	167.381.756.534,10	138.274.502.460,92



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum sejumlah Rp136.969.268.721,46 merupakan pendapatan operasional BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi dan BLUD Puskesmas.

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.1.1.2 Pendapatan Transfer	2.022.293.757.037,00	2.014.497.020.105,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, dan Bantuan Keuangan dengan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp2.022.293.757.037,00 atau 97,44% dari anggaran sebesar Rp2.075.434.103.057,00 lebih tinggi Rp7.796.736.932,00 atau 0,39% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp2.014.497.020.105,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
TA 2019 dan Realisasi TA 2018**

No	Pendapatan Transfer	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.702.932.392.371,00	1.622.294.376.590,00	1.599.499.305.169,00
2)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	209.083.790.000,00	208.803.347.200,00	199.355.009.000,00
3)	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	154.362.101.686,00	182.140.214.247,00	157.297.805.936,00
4)	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	9.055.819.000,00	9.055.819.000,00	58.344.900.000,00
Jumlah		2.075.434.103.057,00	2.022.293.757.037,00	2.014.497.020.105,00

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.622.294.376.590,00	1.599.499.305.169,00

Pendapatan Transfer yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp1.622.294.376.590,00 atau 95,26% dari anggaran sebesar Rp1.702.932.392.371,00, lebih tinggi Rp22.795.071.421,00 atau 1,43% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.599.499.305.169,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
TA 2019 dan Realisasi TA 2018**

No	Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
a)	Bagi Hasil Pajak	25.033.150.000,00	15.629.649.121,00	24.042.193.334,00
b)	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam	108.291.223.353,00	77.761.304.331,00	83.601.164.013,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
c)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.153.914.324.000,00	1.153.914.324.000,00	1.109.812.753.000,00
d)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	415.693.695.018,00	374.989.099.138,00	382.043.194.822,00
Jumlah		1.702.932.392.371,00	1.622.294.376.590,00	1.599.499.305.169,00

- 1) Realisasi Bagi Hasil Pajak sebesar Rp15.629.649.121,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
a)	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	9.898.625.000,00	6.438.448.500,00
b)	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	15.134.525.000,00	9.191.200.621,00
Jumlah		25.033.150.000,00	15.629.649.121,00

- 2) Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp77.761.304.331,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
a)	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	642.625.000,00	385.575.000,00
b)	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00
c)	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	85.555.622.353,00	55.902.557.067,00
d)	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	33.739.000,00	34.775.673,00
e)	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	20.263.580.000,00	20.279.795.991,00
f)	Bagi Hasil Pertambangan Umum	812.064.000,00	568.444.800,00
Jumlah		108.291.223.353,00	77.761.304.331,00

- 3) Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.153.914.324.000,00 terdiri dari DAU Reguler sebesar Rp1.143.550.460.000,00 dan DAU Tambahan sebesar Rp10.363.864.000,00

- 4) Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp374.989.099.138,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	DAK	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
a)	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	28.938.933.000,00	21.063.037.654,00
b)	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	6.627.251.000,00	4.921.952.053,00
c)	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	3.631.766.000,00	3.377.998.000,00
d)	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00
e)	DAK Bidang Keluarga Berencana	1.443.615.000,00	0,00
f)	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.972.290.000,00	2.972.290.000,00
g)	DAK Bidang Kesehatan	19.904.144.000,00	20.363.661.613,00
h)	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	584.943.000,00	566.193.000,00
i)	DAK Bidang Perdagangan	5.648.218.000,00	3.953.752.600,00
j)	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA	792.958.000,00	384.600.000,00
k)	DAK Bidang Pertanian	3.481.008.000,00	3.314.355.000,00
l)	DAK Bidang Pendidikan	30.379.291.000,00	29.707.882.215,00
m)	DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru PNSD	251.150.233.000,00	226.025.775.990,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	DAK	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
n)	DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.362.000.000,00	0,00
o)	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	21.151.200.000,00	21.151.200.000,00
p)	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan	15.704.763.655,00	21.714.884.655,00
q)	DAK Non Fisik-Akreditasi Puskesmas	1.605.770.000,00	0,00
r)	DAK Non Fisik-Jaminan Persalinan	4.078.000.000,00	0,00
s)	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.187.260.619,00	2.187.260.619,00
t)	DAK Non Fisik-Administrasi Kependudukan	3.084.227.744,00	3.084.227.744,00
u)	DAK Penataan Kawasan Pariwisata	2.144.136.000,00	1.704.691.995,00
v)	DAK Non Fisik-Akreditasi Labkesda	326.351.000,00	0,00
w)	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.803.600.000,00	1.803.600.000,00
x)	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	450.000.000,00	450.000.000,00
y)	DAK Non Fisik-Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	470.000.000,00	470.000.000,00
z)	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	521.736.000,00	521.736.000,00
Jumlah		415.693.695.018,00	374.989.099.138,00

Realisasi DAK TA 2019 sebesar Rp374.989.099.138,00 atau 90,21% dari anggaran sebesar Rp415.693.695.018,00 lebih rendah Rp7.054.095.684,00 atau 1,85% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp382.043.194.822,00.

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	208.803.347.200,00	199.355.009.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya meliputi Dana Penyesuaian, dengan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp208.803.347.200,00 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp209.083.790.000,00, lebih tinggi Rp9.448.338.200,00 atau 4,74% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp199.355.009.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2019 dan Realisasi TA 2018

No	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
a)	Dana Penyesuaian	209.083.790.000,00	208.803.347.200,00	199.355.009.000,00
Jumlah		209.083.790.000,00	208.803.347.200,00	199.355.009.000,00

Realisasi Dana Penyesuaian sebesar Rp208.803.347.200,00 terdiri dari:

- 1) Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp23.279.135.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp23.279.135.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 2) Dana Desa sebesar Rp185.524.212.200,00 atau 99,85% dari anggaran sebesar Rp185.804.655.000,00.

		TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	182.140.214.247,00	157.297.805.936,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, dengan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp182.140.214.247,00 atau 118,00% dari anggaran sebesar Rp154.362.101.686,00 lebih tinggi Rp24.842.408.311,00 atau 15,79% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp157.297.805.936,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2019 dan Realisasi TA 2018

No	Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
a)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	154.362.101.686,00	182.140.214.247,00	157.297.805.936,00
	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	48.184.189.274,00	61.484.616.891,00	44.685.021.326,00
	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23.509.675.748,00	41.280.966.741,00	26.582.259.583,00
	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.815.048.102,00	35.124.997.654,00	39.886.223.652,00
	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	623.669.325,00	732.835.711,00	662.604.393,00
	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	41.229.519.237,00	43.516.797.250,00	45.481.696.982,00
b)	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	154.362.101.686,00	182.140.214.247,00	157.297.805.936,00

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
4. Bantuan Keuangan	9.055.819.000,00	58.344.900.000,00

Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah/Provinsi dengan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp9.055.819.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp9.055.819.000,00, lebih rendah Rp49.289.081.000,00 atau 84,48% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp58.344.900.000,00.

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus pada Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp9.055.819.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Bantuan Keuangan	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
a)	Peningkatan Pendidikan	7.032.500.000,00
	- Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	5.981.700.000,00
	- BOP MADIN	100.000.000,00
	- Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS selama 12 bulan 282 orang	676.800.000,00
	- Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 12 bulan	264.000.000,00
	- Jenang Pendidikan TK 13 orang	156.000.000,00
	- Jenang Pendidikan SD 3 orang	36.000.000,00
	- Jenang Pendidikan SMP 6 orang	72.000.000,00
	- Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi	10.000.000,00
b)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.793.319.000,00
	- Pemenuhan Honor 51 orang Perawat Ponkesdes selama 12 bulan	887.400.000,00
	- BK 5 orang Dokter Umum Puskesmas Rawat Inap Standar selama 12 bulan	150.000.000,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan untuk Dokter Puskesmas Rawat inap Standar	7.500.000,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan untuk perawat Ponkendes	44.370.000,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan Pengembangan Taman Posyandu Semester I TA.2019	225.000.000,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan Pendampingan Poskestren Semester I TA.2019	121.029.000,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan semester I ta 2019 untuk Kunjungan konseling kesehatan Semester I TA.2019	358.020.000,00
c)	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	180.000.000,00
	- Jalin Matra	30.000.000,00
	- TMMD	150.000.000,00
d)	Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke 73 Tahun 2018	50.000.000,00
	Jumlah a + b + c + d	9.055.819.000,00

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah	92.995.480.000,00	85.179.884.330,82

Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dengan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp92.995.480.000,00 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp85.179.884.330,82 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah
TA 2019 dan Realisasi TA 2018**

No	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
1)	Pendapatan Hibah BOS – LRA	82.981.000.000,00	92.995.480.000,00	85.179.884.330,82
Jumlah		82.981.000.000,00	92.995.480.000,00	85.179.884.330,82

5.1.2 Belanja

TA 2019
(Rp)
2.135.460.078.975,71

TA 2018
(Rp)
1.912.107.104.079,77

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Pada TA 2019, Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki 63 OPD yang masing-masing merupakan Pengguna Anggaran. Belanja TA 2019 terealisasi sebesar Rp2.135.460.078.975,71 atau 91,64% dari anggaran sebesar Rp2.330.163.428.261,03 lebih tinggi Rp223.352.974.895,94 atau 11,68% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.912.107.104.079,77. Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Belanja
TA 2019 dan Realisasi TA 2018**

No	Belanja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
1)	Belanja Operasi	1.729.277.915.396,03	1.616.989.720.175,85	1.502.332.438.026,36
2)	Belanja Modal	595.885.512.865,00	518.398.600.299,86	409.773.750.053,41
3)	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	71.758.500,00	916.000,00
Jumlah		2.330.163.428.261,03	2.135.460.078.975,71	1.912.107.104.079,77

5.1.2.1 Belanja Operasi

TA 2019
(Rp)
1.616.989.720.175,85

TA 2018
(Rp)
1.502.332.438.026,36

Belanja Operasi Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.616.989.720.175,85 atau 93,51% dari anggaran sebesar Rp1.729.277.915.396,03, lebih tinggi Rp114.657.282.149,49 atau 7,63% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.502.332.438.026,36 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
TA 2019 dan Realisasi TA 2018**

No	Belanja Operasi	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
1)	Belanja Pegawai	1.032.616.040.568,37	954.631.029.391,25	950.509.009.290,25
2)	Belanja Barang dan Jasa	614.907.369.056,66	588.135.137.073,25	496.549.755.686,11
3)	Belanja Hibah	74.099.305.771,00	66.603.353.711,35	49.603.445.750,00
4)	Belanja Bantuan Sosial	7.655.200.000,00	7.620.200.000,00	5.670.227.300,00
Jumlah		1.729.277.915.396,03	1.616.989.720.175,85	1.502.332.438.026,36

Jumlah Belanja Operasi tersebut termasuk, realisasi belanja operasi RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi yang berasal dari Pendapatan RSUD.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
1. Belanja Pegawai	954.631.029.391,25	950.509.009.290,25

Pada TA 2019, Belanja Pegawai pada Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp954.631.029.391,25 atau 92,45% dari anggaran sebesar Rp1.032.616.040.568,37 lebih tinggi Rp4.122.020.101,00 atau 0,43% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp950.509.009.290,25.

Adapun rincian Belanja Pegawai dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan Realisasi TA 2018

No	Belanja Operasi	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
(a)	Belanja Gaji dan Tunjangan	952.532.663.376,37	880.846.180.890,00	879.709.858.456,00
(b)	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	65.000.000.000,00	59.745.129.163,00	58.388.444.291,00
(c)	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.045.010.000,00	8.820.000.000,00	6.259.575.000,00
(d)	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.422.150.283,00	4.071.525.282,00	4.167.346.603,00
(e)	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.016.594.009,00	586.943.056,25	908.814.940,25
(f)	Belanja Uang Lembur	599.622.900,00	561.251.000,00	1.074.970.000,00
Jumlah		1.032.616.040.568,37	954.631.029.391,25	950.509.009.290,25

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	588.135.137.073,25	496.549.755.686,11

Pada TA 2019, Belanja Barang dan Jasa pada Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp588.135.137.073,25 atau 94,94% dari anggaran sebesar Rp614.907.369.056,66, lebih tinggi Rp91.585.381.387,14 atau 18,44% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp496.549.755.686,11 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 dan Realisasi TA 2018

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
a)	Belanja Bahan Pakai Habis	14.961.221.522,00	13.700.070.121,20	16.050.001.913,00
b)	Belanja Bahan/Material	17.023.954.007,00	15.946.929.435,40	9.623.425.688,27
c)	Belanja Jasa Kantor	130.664.895.729,00	117.230.773.648,24	123.640.420.869,63
	Belanja Premi Asuransi	862.950.670,00	359.411.935,60	6.885.159,00
d)	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.853.659.878,00	4.985.221.515,00	4.130.084.180,00
e)	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.773.687.122,00	16.063.430.304,00	15.008.313.538,00
f)	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.390.017.700,00	2.898.907.089,00	2.413.454.054,00
g)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.272.643.000,00	2.086.030.100,00	1.518.413.819,00
h)	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.945.883.300,00	5.961.303.225,00	4.066.383.780,00
i)	Belanja Makanan dan Minuman	31.271.355.172,00	29.636.418.961,56	24.479.308.140,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
j)	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	787.494.975,00	753.238.600,00	655.103.000,00
k)	Belanja Pakaian Kerja	1.774.198.500,00	1.682.298.965,00	1.370.774.250,00
l)	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.504.004.100,00	4.154.722.295,00	904.349.050,00
m)	Belanja Perjalanan Dinas	81.360.937.146,00	74.915.443.084,50	68.256.286.723,00
n)	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
o)	Belanja Pemeliharaan	19.110.509.170,00	17.747.679.041,20	11.055.666.061,00
p)	Belanja Jasa Konsultasi	19.452.621.579,00	18.330.788.130,00	14.033.311.288,00
q)	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	4.496.241.000,00	3.777.064.500,00
r)	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	33.000.000,00	13.200.000,00	39.996.000,00
s)	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	21.313.521.750,00	20.113.758.577,00	11.146.817.080,00
t)	Belanja Honorarium PNS	19.955.861.000,00	17.980.909.750,00	11.562.297.500,00
u)	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.871.673.000,00	16.038.254.000,00	11.415.321.975,00
v)	Belanja Barang Dana BOS	75.691.580.267,65	76.924.811.660,76	78.550.681.116,21
w)	Honorarium Pengelolaan BLUD	530.000.000,00	381.035.876,00	6.441.589.640,00
x)	Belanja Barang dan Jasa BLUD	122.468.399.469,01	125.702.064.758,79	76.378.586.362,00
y)	Belanja Sewa Lahan Pertanian	28.800.000,00	28.200.000,00	18.800.000,00
z)	Belanja Sewa Alat Dapur	3.000.000,00	2.495.000,00	6.420.000,00
	Jumlah	614.907.369.056,66	588.135.137.073,25	496.549.755.686,11

Berdasarkan rincian Belanja Barang dan Jasa, dapat dijelaskan beberapa poin sebagai berikut,

- a. Realisasi Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp16.038.254.000,00 merupakan belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp14.449.919.000,00 atau 95,83% dari anggaran sebesar Rp15.079.278.000,00 dan uang untuk hadiah lomba sebesar Rp1.588.335.000,00 atau 88,62% dari anggaran sebesar Rp1.792.395.000,00;
- b. Realisasi belanja Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi terdapat beberapa yang melampaui target belanja yang telah ditetapkan hal tersebut disebabkan:
 - 1) Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan BLUD rumah sakit, dijelaskan bahwa bagi rumah sakit yang telah memperoleh status BLUD penuh diberikan fleksibilitas seperti penggunaan anggaran pendapatan secara langsung untuk membiayai seluruh belanja yang berasal dari Pendapatan Asli Rumah Sakit. Dalam penganggarannya rumah sakit menggunakan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tidak seperti SKPD lain yang menggunakan RKA (Rencana Kerja Anggaran);
 - 2) Adapun sesuai Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 Pendapatan RSUD dari target anggaran Rp85 milyar terealisasi Rp96 milyar atau 112,32%.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sedangkan realisasi belanja sebesar 105,51%. Sehingga terdapat beberapa belanja yang melampaui target hal ini karena kita memiliki ambang batas sebesar 10%, dimana seiring dengan bertambahnya realisasi pendapatan maka diperbolehkan melampaui belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan sebagaimana yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran yaitu, belanja barang dan jasa BLUD dari Anggaran sebesar Rp80.233.248.335,64 terealisasi sebesar Rp91.109.816.035,00 atau 113,56%.

- c. Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang menambah nilai aset dan seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp2.212.779.094,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 19 Realisasi Belanja Belanja Barang dan Jasa
yang Seharusnya Dibebankan pada Belanja Modal TA 2019**

No.	Nama SKPD	Belanja Barang dan Jasa (Rp)
(a)	Dinas Kesehatan	545.000,00
(b)	BLUD Puskesmas Kademangan	24.012.450,00
(c)	BLUD Puskesmas Kanigoro	11.674.500,00
(d)	BLUD Puskesmas Selopuro	16.164.244,00
(e)	BLUD Puskesmas Kesamben	56.970.500,00
(f)	BLUD Puskesmas Wlingi	10.224.500,00
(g)	BLUD Puskesmas Gandusari	67.594.878,00
(h)	BLUD Puskesmas Slumbung	1.494.200,00
(i)	BLUD Puskesmas Garum	7.394.000,00
(j)	BLUD Puskesmas Nglegok	198.143.800,00
(k)	BLUD Puskesmas Sanankulon	33.902.700,00
(l)	BLUD Puskesmas Ponggok	10.018.600,00
(m)	BLUD Puskesmas Bacem	10.125.950,00
(n)	BLUD Puskesmas Srengat	38.953.900,00
(o)	BLUD Puskesmas Udanawu	63.104.300,00
(p)	Rumah Sakit Umum Daerah	37.519.422,00
(q)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	157.275.000,00
(r)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	192.227.000,00
(s)	Dinas Pertanian Dan Pangan	694.190.300,00
(t)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	57.000.000,00
(u)	Kecamatan Garum	156.786.000,00
(v)	Kecamatan Kanigoro	347.877.850,00
(w)	Kecamatan Srengat	19.580.000,00
	Jumlah	2.212.779.094,00

Atas Aset Tetap yang dihasilkan, Bidang Aset BPKAD telah mencatat sebagai Aset Tetap.

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
3. Belanja Hibah	66.603.353.711,35	49.603.445.750,00

Pada TA 2019, Belanja Hibah pada Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp66.603.353.711,35 atau 95,82% dari anggaran sebesar Rp74.099.305.771,00,



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

lebih tinggi Rp16.999.907.961,35 atau 34,27% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp49.603.445.750,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2019 dan Realisasi TA 2018

No	Belanja Hibah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
a)	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	23.722.330.271,00	18.400.128.211,35	7.181.145.750,00
b)	Belanja Hibah kepada Organisasi/Kemasyarakatan	50.376.975.500,00	48.203.225.500,00	42.422.300.000,00
	Bidang Pendidikan	33.717.100.000,00	31.653.900.000,00	31.524.800.000,00
	Bidang Perekonomian	790.000.000,00	790.000.000,00	75.000.000,00
	Bidang Kesenian, Pemuda & Olahraga	5.630.000.000,00	5.600.000.000,00	2.985.000.000,00
	Bidang Keagamaan	3.510.000.000,00	3.430.000.000,00	6.882.500.000,00
	Bidang Sosial & Hari Besar Keagamaan	305.000.000,00	305.000.000,00	130.000.000,00
	Bidang Kesehatan	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00
	Bidang Kesatuan Bangsa & Politik	6.124.875.500,00	6.124.325.500,00	625.000.000,00
	Jumlah Belanja Hibah	74.099.305.771,00	66.603.353.711,35	49.603.445.750,00

Belanja Hibah berupa barang dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Barang masing-masing SKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, maka di LRA dikonversikan menjadi Belanja Hibah.

Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi/Kemasyarakatan dapat dilihat pada **Lampiran 6** sampai dengan **Lampiran 12**.

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
4. Belanja Bantuan Sosial	7.620.200.000,00	5.670.227.300,00

Pada TA 2019, Belanja Bantuan Sosial pada Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp7.620.200.000,00 atau 99,54% dari anggaran sebesar Rp7.655.200.000,00, lebih tinggi Rp1.949.972.700,00 atau 34,39% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp5.670.227.300,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2019 terdiri dari:

a.	Bantuan Sosial Program PAMSIMAS	1.024.800.000,00
b.	Bantuan Rumah Swadaya	4.130.000.000,00
c.	LKSA	718.800.000,00
d.	BKSM	1.746.600.000,00
	Jumlah	7.620.200.000,00

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	518.398.600.299,86	409.773.750.053,41

Belanja Modal Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp518.398.600.299,86 atau 87,00% dari



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

anggaran sebesar Rp595.885.512.865,00, lebih tinggi Rp108.624.850.246,45 atau 26,51% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp409.773.750.053,41 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan Realisasi TA 2018

No	Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
1)	Tanah			
	Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	0,00	0,00	463.900.000,00
	Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	52.138.000,00	52.138.000,00	0,00
	Jumlah 1)	52.138.000,00	52.138.000,00	463.900.000,00
2)	Peralatan dan Mesin			
	Pengadaan Alat-alat Besar Darat	1.537.625.000,00	1.465.229.000,00	0,00
	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	341.860.850,00	255.176.500,00	374.382.550,00
	Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	15.583.920.426,00	12.076.762.000,20	5.124.716.137,00
	Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	720.100.000,00	706.595.800,00	49.098.000,00
	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	113.870.000,00	107.942.300,00	65.293.000,00
	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	7.500.000,00	7.494.300,00	144.000.000,00
	Pengadaan Alat-Alat Ukur	921.500.000,00	768.970.000,00	5.772.385.500,00
	Pengadaan Alat-alat Pengolahan	3.793.960.000,00	1.515.406.500,00	519.628.000,00
	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	16.000.000,00	14.388.000,00	6.530.000,00
	Pengadaan Alat Kantor	2.145.472.875,00	1.850.765.825,00	2.469.931.375,00
	Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.872.147.150,00	8.460.329.425,00	6.910.965.970,00
	Pengadaan Komputer	12.057.112.100,00	11.728.536.914,00	12.114.269.260,00
	Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	695.358.000,00	647.978.950,00	563.249.000,00
	Pengadaan Alat Studio	1.354.462.778,00	1.310.190.690,00	2.267.148.400,00
	Pengadaan Alat Komunikasi	155.638.000,00	137.074.346,00	47.584.000,00
	Pengadaan Peralatan Pemancar	5.000.000,00	5.000.000,00	220.130.000,00
	Pengadaan Alat Kedokteran	17.065.507.711,00	15.344.649.788,00	13.155.712.175,00
	Pengadaan Alat Kesehatan	117.750.000,00	112.000.000,00	1.150.555.395,00
	Pengadaan Unit Laboratorium	4.475.645.614,00	3.678.727.038,16	1.813.914.732,00
	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.344.816.000,00	3.113.807.755,00	537.146.997,00
	Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00	33.850.000,00
	Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	130.000.000,00	128.370.000,00	7.975.000,00
	Pengadaan Non Senjata Api	24.400.000,00	23.682.500,00	5.000.000,00
	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	219.030.000,00	215.397.650,00	89.059.300,00
	Jumlah 2)	73.698.676.504,00	63.674.475.281,36	53.442.524.791,00
3)	Gedung dan Bangunan			
	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	233.173.035.427,00	205.450.709.189,34	78.337.951.694,16
	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	199.175.375,00	196.133.000,00	271.810.000,00
	Pengadaan Bangunan Bersejarah	114.075.000,00	114.075.000,00	0,00
	Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	771.001.000,00	623.735.300,00	226.706.798,00
	Pengadaan Bangunan Monumen	181.689.000,00	174.533.600,00	0,00
	Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol	608.400.000,00	589.479.230,00	0,00
	Pengadaan Bangunan Rambu-rambu	750.330.340,00	700.556.360,00	439.738.955,98
	Jumlah 3)	235.797.706.142,00	207.849.221.679,34	79.276.207.448,14
4)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Pengadaan Jalan	151.187.954.939,00	134.359.189.405,76	154.503.307.648,00
	Pengadaan Jembatan	23.931.093.011,00	13.420.553.490,40	8.856.713.020,00
	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	25.347.659.631,00	21.618.898.235,00	54.598.071.691,00
	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan	16.249.380.315,00	15.098.438.400,00	18.956.503.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
	Penanggulangan BA			
	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	10.206.322.250,00	8.749.000.700,00	1.134.646.264,00
	Pengadaan Bangunan Air kotor	16.161.683.850,00	15.964.219.457,00	14.313.606.150,00
	Pengadaan Instalasi Air Kotor	738.000.000,00	0,00	19.648.000,00
	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	28.000.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Jaringan Air Minum	25.000.000,00	24.520.000,00	0,00
	Pengadaan Jaringan Listrik	8.575.271.000,00	8.137.520.734,00	10.671.487.600,00
	Pengadaan Jaringan Telepon	16.000.000,00	15.994.000,00	0,00
	Pengadaan Jaringan Gas	0,00	0,00	25.540.000,00
	Jumlah 4)	252.466.364.996,00	217.388.334.422,16	263.079.524.173,00
5)	Aset Tetap Lainnya			
	Pengadaan Buku	4.808.024.000,00	4.645.739.300,00	36.551.350,00
	Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	25.000.000,00	24.651.000,00	0,00
	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	1.896.323.683,27
	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	495.997.342,00	492.425.000,00	197.442.500,00
	Pengadaan Tanaman	100.000.000,00	100.000.000,00	11.500.000,00
	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	25.206.750,00	25.206.750,00	0,00
	BLUD	19.773.101.481,00	14.872.798.073,00	2.813.095.908,00
	BOS	7.659.081.650,00	8.308.021.294,00	6.995.049.150,00
	Jumlah 5)	32.886.411.223,00	28.468.841.417,00	11.949.962.591,27
6)	Aset Lainnya			
	Aset Tidak Berwujud	984.216.000,00	965.589.500,00	1.561.631.050,00
	Jumlah 6)	984.216.000,00	965.589.500,00	1.561.631.050,00
	Total Belanja Modal	595.885.512.865,00	518.398.600.299,86	409.773.750.053,41

Jumlah tersebut termasuk realisasi Belanja Modal RSUD "Ngudi Waluyo" yang berasal dari Pendapatan RSUD "Ngudi Waluyo".

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp518.398.600.299,86 selain memperoleh aset tetap di dalamnya terdapat realisasi pengadaan aset tetap yang menghasilkan Barang Habis Pakai sebesar Rp3.596.703.242,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22 Realisasi Belanja Modal Menghasilkan Barang Habis Pakai

No.	SKPD	Nominal (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	365.173.495,00
2	Dinas Kesehatan	206.806.500,00
3	BLUD Puskesmas Wates	1.730.000,00
4	BLUD Puskesmas Kademangan	3.750.679,00
5	BLUD Puskesmas Kanigoro	6.583.044,00
7	BLUD Puskesmas Talun	1.864.973,00
8	BLUD Puskesmas Selopuro	1.506.850,00
9	BLUD Puskesmas Kesamben	1.917.500,00
10	BLUD Puskesmas Doko	2.215.500,00
11	BLUD Puskesmas Wlingi	3.970.000,00
12	BLUD Puskesmas Gandusari	506.990,00
13	BLUD Puskesmas Garum	5.071.000,00
14	BLUD Puskesmas Nglekok	800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Nominal (Rp)
15	BLUD Puskesmas Sanankulon	11.041.100,00
16	BLUD Puskesmas Ponggok	1.381.361,00
17	BLUD Puskesmas Bacem	80.000,00
18	BLUD Puskesmas Srengat	9.871.500,00
19	BLUD Puskesmas Wonodadi	1.725.000,00
20	BLUD Puskesmas Udanawu	1.430.000,00
21	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.211.736.650,00
22	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	128.290.000,00
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	49.850.000,00
24	Dinas Perhubungan	28.985.000,00
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	248.230.000,00
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	59.904.000,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	14.730.500,00
28	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	98.774.000,00
29	Dinas Pertanian Dan Pangan	79.805.000,00
30	Dinas Peternakan Dan Perikanan	73.712.000,00
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	117.378.600,00
32	Bagian Hukum	31.487.500,00
33	Bagian Perekonomian Dan Pembangunan	98.532.500,00
34	Bagian Perlengkapan	12.518.000,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50.000.000,00
36	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Skpd)	9.100.000,00
37	Kecamatan Garum	47.000.000,00
38	Kecamatan Sutojayan	124.301.000,00
39	Kecamatan Srengat	484.943.000,00
Total		3.596.703.242,00

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.1.2.3 Belanja Tak Terduga	71.758.500,00	916.000,00

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp71.758.500,00 atau 1,44% dari anggarannya, lebih tinggi Rp70.842.500,00 atau 7.733,90 % dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp916.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 23 Rincian Belanja Tak Terduga

No.	Uraian	Nominal (Rp)
1	Pengembalian sisa dana bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta TA. 2018	5.400.000,00
2	Pengembalian Pajak Daerah TA. 2018	21.358.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Nominal (Rp)
3	Droping Air Bersih Tahun 2019	45.000.000,00
Total		71.758.500,00

5.1.3 Transfer

TA 2019
(Rp)

326.827.100.068,00

TA 2018
(Rp)

297.236.888.222,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil selama Tahun 2019 sebesar Rp326.827.100.068,00 atau 99,75% dari anggaran sebesar Rp327.653.274.019,28, lebih tinggi Rp29.590.211.846,00 atau 9,96% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp297.236.888.222,00 dengan rincian sebagai berikut.

TA 2019
(Rp)

11.954.120.468,00

TA2018
(Rp)

12.039.429.922,00

**5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil
Pendapatan**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan selama tahun 2019 sebesar Rp11.954.120.468,00 atau 98,97% dari anggaran sebesar Rp12.078.426.519,28 lebih rendah Rp85.309.454,00 atau 0,71% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp12.039.429.922,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan
TA 2019 dan Realisasi TA 2018**

No	Transfer/Bagi Hasil	Anggaran 2019	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
1)	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	11.192.415.769,28	10.999.975.718,00	11.123.937.422,00
	- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	8.844.300.569,28	8.625.478.388,00	7.449.480.928,00
	- Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	2.348.115.200,00	2.374.497.330,00	3.674.456.494,00
2)	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	886.010.750,00	954.144.750,00	915.492.500,00
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota/ Desa	886.010.750,00	954.144.750,00	915.492.500,00
Jumlah		12.078.426.519,28	11.954.120.468,00	12.039.429.922,00

TA 2019
(Rp)

314.872.979.600,00

TA 2018
(Rp)

285.197.458.300,00

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 terealisasi sebesar Rp314.872.979.600,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp315.574.847.500,00, lebih tinggi Rp29.675.521.300,00 atau 10,41% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp285.197.458.300,00 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 dan Realisasi TA 2018

No	Transfer/Bagi Hasil	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
1)	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	314.528.525.500,00	313.889.016.200,00	284.244.667.300,00
2)	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.046.322.000,00	983.963.400,00	952.791.000,00
Jumlah		315.574.847.500,00	314.872.979.600,00	285.197.458.300,00

Rincian atas Transfer Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut.

- a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari,
 - 1) Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp128.720.598.000,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp128.723.870.500,00;
 - 2) Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp185.168.418.200,00 atau 99,66% dari anggaran sebesar Rp185.804.655.000,00;
- b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan realisasi sebesar Rp983.963.400,00 atau 94,04% dari anggaran sebesar Rp1.046.322.000,00, lebih tinggi Rp31.172.400,00 atau 3,27% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp952.791.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Rincian	Jumlah (Rp)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	284.092.000,00
2.	Partai Amanat Nasional (PAN)	127.628.500,00
3.	Partai Demokrat	66.936.000,00
4.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	57.639.000,00
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	174.479.900,00
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	40.020.000,00
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	120.365.500,00
8.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	86.693.000,00
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	26.109.500,00
Total		983.963.400,00

5.1.4 Pembiayaan

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
Pembiayaan Netto	237.755.424.912,11	94.951.127.474,94

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan, yang terealisasi sebesar Rp237.755.424.912,11 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp237.740.585.410,26, lebih tinggi 150,40% atau Rp142.804.297.437,17 dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp94.951.127.474,94. Anggaran dan realisasi Pembiayaan tahun 2019, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan adalah sebagai berikut.

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2019 dan Realisasi TA 2018

No	Pembiayaan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
1)	Penerimaan Pembiayaan	237.740.585.410,26	237.755.424.912,11	94.951.127.474,94
2)	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto		237.740.585.410,26	237.755.424.912,11	94.951.127.474,94



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	237.755.424.912,11	94.951.127.474,94

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp237.755.424.912,11 atau 100,01% dari anggarannya yaitu sebesar Rp237.740.585.410,26, lebih tinggi 150,40% atau Rp142.804.297.437,17 dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp94.951.127.474,94. Adapun rincian penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut.

**Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
TA 2019 dan Realisasi TA 2018**

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
a)	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	237.737.285.410,26	237.737.285.410,26	94.906.421.577,67
b)	Koreksi SiLPA	0,00	39.501,85	(9.294.102,73)
c)	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
d)	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.300.000,00	18.100.000,00	54.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		237.740.585.410,26	237.755.424.912,11	94.951.127.474,94

Rincian penerimaan kembali pinjaman sebesar Rp18.100.000,00 adalah sebagai berikut.

- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp13.100.000,00.
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat di Dinas Peternakan sebesar Rp5.000.000,00.

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00.

**Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
TA 2019 dan Realisasi TA 2018**

No	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2019	2018
a)	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
b)	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	176.500.198.604,26	237.737.285.410,26

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp176.500.198.604,26 lebih kecil 25,76% atau turun sebesar Rp61.237.086.806,00 dari



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

realisasi SiLPA tahun 2018 sebesar Rp237.737.285.410,26. Rincian realisasi SiLPA Tahun Anggaran (TA) 2019 dan Tahun Anggaran (TA) 2018 sebagai berikut.

**Tabel 29 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
TA 2019 dan TA 2018**

No	SILPA	Realisasi (Rp)	
		Tahun 2019	Tahun 2018
1)	Pendapatan dan Belanja		
	a) Pendapatan	2.401.031.952.735,86	2.352.130.150.237,09
	b) Belanja dan transfer	2.462.287.179.043,71	2.209.343.992.301,77
	Surplus/(Defisit) Anggaran (a-b)	(61.255.226.307,85)	142.786.157.935,32
2)	Pembiayaan		
	a) Penerimaan Pembiayaan	237.755.424.912,11	94.951.127.474,94
	b) Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto (a-b)	237.755.424.912,11	94.951.127.474,94
3)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (1+2)	176.500.198.604,26	237.737.285.410,26

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2019 sebesar Rp176.500.198.604,26 terdiri dari:

1)	Kas Daerah		
	a) Kas Murni	156.441.619.580,84	
	b) Deposito	0,00	
	Jumlah		156.441.619.580,84
2)	Kas di Bendahara FKTP		
	Saldo Awal	0,00	
	Pendapatan	0,00	
	Belanja	0,00	
	Jumlah		0,00
3)	Kas di Bendahara BLUD		
	Saldo Awal	15.908.960.545,01	
	Koreksi SILPA	39.501,85	
	Pendapatan	136.978.121.180,71	
	Koreksi Pendapatan	(8.852.459,25)	
	Belanja	(141.028.014.224,79)	
	Koreksi Belanja	72.115.517,00	
	Jumlah		11.922.370.060,53
4)	Kas di Bendahara BOS		
	Saldo Awal	369.661.917,65	
	Pendapatan	92.994.880.000,00	
	Koreksi Pendapatan	600.000,00	
	Belanja	(85.353.808.379,46)	
	Koreksi Belanja	120.975.424,70	
	Jumlah		8.132.308.962,89
5)	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00
6)	Kas di Bendahara Pengeluaran		3.900.000,00
7)	Utang PFK		0,00
	Jumlah		176.500.198.604,26



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.2. Penjelasan Atas Akun-akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. LPSAL per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>TA 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>TA 2018</u> <u>(Rp)</u>
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	237.737.285.410,26	94.906.421.577,67

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp237.737.285.410,26.

	<u>TA 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>TA 2018</u> <u>(Rp)</u>
5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	237.737.285.410,26	94.906.421.577,67

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2018 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD TA 2019, yaitu sebesar Rp237.737.285.410,26.

	<u>TA 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>TA 2018</u> <u>(Rp)</u>
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	176.500.198.604,26	237.737.285.410,26

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp176.500.198.604,26 turun sebesar Rp61.237.086.806,00 atau 25,76% dari Tahun 2018, diuraikan sebagai berikut.

1. Surplus/Defisit – LRA

Adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan LRA dan Belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit LRA Tahun 2019 Rp(61.255.226.307,85) turun sebesar Rp204.041.384.243,17 atau 142,90% dari Tahun 2018.

2. Pembiayaan Netto

Adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto Tahun 2019 sebesar Rp237.755.424.912,11 naik sebesar Rp142.804.297.437,17 atau 150,40 % dari Tahun 2018.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	39.501,85	(9.294.102,73)

Adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk Tahun 2019 terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp39.501,85 yang merupakan Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BLUD pada Puskesmas berikut ini:

a	Puskesmas Wates	Rp	39.500,00
b	Puskesmas Gandusari	Rp	0,92
c	Puskesmas Ponggok	Rp	0,25
d	Puskesmas Bacem	Rp	0,68
Total		Rp	39.501,85

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.2.5 SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan	176.500.198.604,26	237.737.285.410,26

SiLPA/SiKPA tahun berjalan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 30 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2019 dan Tahun 2018

Uraian	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Trend (%)
Kasdi Kas Daerah	156.441.619.580,84	221.458.662.947,60	(29,36)
Kasdi Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.900.000,00	0,00	-
Kas di Bendahara BOS	8.132.308.962,89	369.661.917,65	2.099,93
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	0,00	10.821.848.183,37	-
Kas BLUD	11.922.370.060,53	5.087.112.361,64	134,36
Jumlah	176.500.198.604,26	237.737.285.410,26	(25,76)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berasal dari Pendapatan, Belanja, Transfer, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 dan Tahun 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Trend (%)
Pendapatan	2.401.031.952.735,86	2.352.130.150.237,09	2,08
Belanja	(2.135.460.078.975,71)	(1.912.107.104.079,77)	11,68
Transfer	(326.827.100.068,00)	(297.236.888.222,00)	9,96
Penerimaan Pembiayaan	237.755.424.912,11	94.951.127.474,94	150,40
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	-
SiLPA	176.500.198.604,26	237.737.285.410,26	(25,76)



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.3 Penjelasan Atas Akun-akun Neraca

	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>
5.3.1 Aset	4.448.281.215.370,09	4.039.394.668.251,50

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.448.281.215.370,09 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32 Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
a.	Aset Lancar	316.620.320.349,73	326.619.148.801,95
b.	Investasi Jangka Panjang	25.590.650.548,03	25.570.347.657,02
c.	Aset Tetap	4.045.576.555.594,55	3.627.424.581.718,41
d.	Dana Cadangan	0,00	0,00
e.	Aset Lainnya	60.493.688.877,78	59.780.590.074,12
	Jumlah Aset	4.448.281.215.370,09	4.039.394.668.251,50

	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>
5.3.1.1 Aset Lancar	316.620.320.349,73	326.619.148.801,95

Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp316.620.320.349,73 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 33 Rincian Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1)	Kas	176.500.198.604,26	237.738.611.473,26
2)	Piutang Pajak Daerah	45.232.494.137,75	42.272.798.237,25
3)	Piutang Retribusi	173.304.276,00	199.484.786,00
4)	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan	1.903.726.239,00	0,00
5)	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	30.095.197.189,98	22.366.109.335,44
6)	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	35.578.540.205,00	9.469.931.806,00
7)	Piutang Pendapatan Lainnya	36.541.556.087,19	36.978.780.100,21
8)	Piutang Lainnya	2.517.054.484,00	2.164.569.252,00
9)	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(51.352.097.286,32)	(50.605.828.242,57)
10)	Beban Dibayar Dimuka	37.500.000,00	37.500.000,00
11)	Persediaan	39.392.846.412,87	25.997.192.054,36
	Jumlah	316.620.320.349,73	326.619.148.801,95

	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>
1. Kas	176.500.198.604,26	237.738.611.473,26

Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp176.500.198.604,26 terdiri atas posisi kas berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 34 Rincian Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Blitar
per 31 Desember 2019 dan 2018**

No.	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
a)	Kas di Kasda	156.441.619.580,84	221.458.662.947,60
b)	Kas di Bendahara BOS	8.132.308.962,89	369.661.917,65
c)	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.900.000,00	1.326.063,00
d)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
e)	Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD	1.233.981.240,10	5.087.112.361,64
f)	Kas di Bendahara FKTP/BLUD Puskesmas	10.688.388.820,43	10.821.848.183,37
Jumlah		176.500.198.604,26	237.738.611.473,26

a. Kas di Kasda sebesar Rp156.441.619.580,84

Kas di Kasda merupakan saldo Kas Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 berupa dana di rekening giro Kas Umum Daerah pada Bank Jatim Cabang Blitar dengan Nomor Rekening 0141000022 sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/399/409.012/KPTS/2010 tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Dana di Rekening Deposito.

**Tabel 35 Rincian Saldo Kas di Kasda Pemerintah Kabupaten Blitar
per 31 Desember 2019**

No	Uraian	Nominal (Rp)	Nilai (Rp)
(1)	Dana Kas Murni (Bank Jatim)		156.441.619.580,84
(2)	Deposito		0,00
Jumlah			156.441.619.580,84

b. Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.132.308.962,89

Penjelasan perubahan Saldo awal BOS yang diserahkan ke Provinsi adalah sebagai berikut.

-	Saldo 2018	Rp	369.661.917,65
-	Pendapatan BOS	Rp	92.995.480.000,00
-	Belanja BOS	Rp	(85.232.832.954,76)
-	Koreksi	Rp	0,00
Sisa Dana BOS		Rp	8.132.308.962,89

Sedangkan mutasi saldo BOS Tahun 2019 sebagai berikut.

**Tabel 36 Rincian Pendapatan dan Belanja serta
Saldo Dana BOSTahun 2019**

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
(1)	SMPN	176.435.838,31	32.536.000.000,00	28.233.625.174,93	4.478.810.663,38
(2)	SDN (UPTD)	193.226.079,34	60.459.480.000,00	56.999.207.779,83	3.653.498.299,51
Jumlah		369.661.917,65	92.995.480.000,00	85.232.832.954,76	8.132.308.962,89

Dana BOS merupakan pendapatan kas yang diterima oleh Satker/Lembaga (SD dan SMP) dan dapat digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Laporan penggunaan Dana BOS selama Tahun 2019 secara rinci pada **Lampiran 13**.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.900.000,00, merupakan uang persediaan Kecamatan Selorejo per 31 Desember 2019 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan masih berada di Bendahara Pengeluaran dalam bentuk kas tunai. Kas tersebut telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 10 Januari 2020.
- d. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.
- e. Kas di Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp11.922.370.060,53 merupakan kas pada RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi dan kas di BLUD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.
- (1) Kas di BLUD RSUD Wlingi 1.233.981.240,10
 - (2) Kas di BLUD Puskesmas 10.688.388.820,43
- 1) Kas di BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi sebesar Rp1.233.981.240,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Nilai (Rp)
(1)	Kas di Bendahara Penerimaan	1.232.880.691,35
(2)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
(3)	Kas di Bank Mandiri Syariah	1.100.548,75
Jumlah		1.233.981.240,10

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan nilai kas murni yang berasal dari pendapatan RSUD Wlingi yang ditampung di rekening giro a.n. Bendahara Penerima BLUD RSU Wlingi pada Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0461006033 setelah dikurangi dengan realisasi belanja sebagai berikut.

(a)	Saldo awal	Rp	5.087.112.361,64
(b)	Penambahan		
	Pendapatan operasional	Rp	96.390.935.614,71
(c)	Pengeluaran		
	Januari s/d Desember	Rp	(100.235.647.885,00)
(d)	Koreksi pendapatan	Rp	(9.518.851,25)
(e)	Koreksi belanja	Rp.	1.100.000,00
Saldo akhir (a)+(b)+(c)+(d)+(e)		Rp	1.233.981.240,10

Rincian realisasi pendapatan operasional dan belanja RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 38 Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kas Murni BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2019

No.	Bulan	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
(1)	Januari	8.137.153.463,54	6.671.628.949,00
(2)	Februari	13.140.114.598,04	5.573.445.378,00
(3)	Maret	2.948.268.344,06	6.546.388.581,00
(4)	April	14.724.931.503,55	7.647.500.394,00
(5)	Mei	9.347.243.372,87	11.398.775.294,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Bulan	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
(6)	Juni	2.872.491.774,15	5.247.697.892,00
(7)	Juli	7.836.306.814,94	7.953.515.557,00
(8)	Agustus	2.906.164.822,88	5.844.170.627,00
(9)	September	7.967.510.441,67	8.170.775.853,00
(10)	Oktober	2.580.378.907,74	5.945.348.770,00
(11)	November	18.315.929.571,01	9.058.171.832,00
(12)	Desember	5.614.442.000,26	20.178.228.758,00
(13)	Pengembalian Pendapatan	(9.519.400,00)	0,00
(14)	Koreksi kurang catat	548,75	0,00
(15)	Setoran ke Bank Syariah yang diakui sebagai belanja	0,00	(1.100.000,00)
Jumlah		96.381.416.763,46	100.234.547.885,00

Saldo Kas SKPD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2019 sebesar Rp1.233.981.240,10 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.232.880.691,35 dan kas di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1.100.548,75.

- 2) Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp10.688.388.820,43 merupakan sisa dana pada 24 Puskesmas dan dilaporkan sebagai bagian dari Kas BUD dengan perhitungan sebagai berikut.

- Saldo 2018 (Kas di FKTP)	Rp	10.821.848.183,37
- Pendapatan	Rp	40.587.851.958,00
- Belanja	Rp	(40.721.350.822,79)
- Koreksi saldo awal	Rp	39.501,85
Sisa Dana Puskesmas	Rp	10.688.388.820,43

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dana JKN merupakan dana yang diperoleh karena pelaksanaan pelayanan kesehatan pada FKTP kepada peserta JKN sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Pada tahun 2019 seluruh Puskesmas telah berstatus sebagai BLUD. Penerimaan dan penggunaan dana BLUD Puskesmas dirinci sebagai berikut.

Tabel 39 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana BLUD Puskesmas Tahun 2019

No	BLUD Puskesmas	Saldo Awal 2019 (Rp)	Koreksi (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir 2019 (Rp)
1	Bakung	149.382.382,00		969.246.048,00	899.702.325,00	218.926.105,00
2	Wonotirto	12.688.328,00		923.509.893,00	878.255.858,00	57.942.363,00
3	Margomulyo	181.379.239,00		1.126.275.756,00	1.113.046.181,00	194.608.814,00
4	Wates	83.687.542,00	39.500,00	1.032.926.089,00	958.745.268,00	157.907.863,00
5	Binangun	281.084.422,00		1.660.108.784,00	1.509.390.486,00	431.802.720,00
6	Sutojayan	197.316.521,00		1.837.671.659,00	1.792.892.854,00	242.095.326,00
7	Kademangan	562.045.482,00		2.325.085.033,00	2.247.618.897,00	639.511.618,00
8	Kanigoro	1.627.180.660,00		2.133.768.273,00	2.020.418.879,00	1.740.530.054,00
9	Talun	521.695.277,00		1.850.980.578,00	1.870.393.193,00	502.282.662,00
10	Selopuro	1.070.468.604,00		1.815.914.799,00	2.029.958.539,00	856.424.864,00
11	Kesamben	355.260.269,00		2.606.170.599,00	2.522.626.952,00	438.803.916,00
12	Boro	254.736.575,00		1.213.145.728,00	1.073.751.413,00	394.130.890,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	BLUD Puskesmas	Saldo Awal 2019 (Rp)	Koreksi (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir 2019 (Rp)
13	Doko	165.073.287,00		1.225.360.224,00	1.165.359.404,00	225.074.107,00
14	Wlingi	706.031.699,00		1.811.272.026,00	2.135.220.047,00	382.083.678,00
15	Gandusari	543.431.904,00	0,92	2.325.225.892,00	2.159.319.198,00	709.338.598,92
16	Slumbung	237.412.063,00		643.606.675,00	510.851.014,00	370.167.724,00
17	Garum	1.081.355.058,37		2.298.830.990,00	2.718.024.165,80	662.161.882,57
18	Nglegok	625.541.676,00		1.902.513.630,00	2.272.562.888,00	255.492.418,00
19	Sanankulon	349.029.499,00		1.837.865.933,00	2.029.852.233,00	157.043.199,00
20	Ponggok	391.390.951,00	0,25	2.223.839.268,00	1.941.532.819,00	673.697.400,25
21	Bacem	110.274.660,00	0,68	1.051.188.416,00	1.095.017.335,00	66.445.741,68
22	Srengat	886.881.973,00		2.870.899.216,00	2.956.757.049,99	801.024.139,01
23	Wonodadi	247.771.821,00		1.636.798.702,00	1.475.581.618,00	408.988.905,00
24	Udanawu	180.728.291,00		1.265.647.747,00	1.344.472.206,00	101.903.832,00
TOTAL		10.821.848.183,37	39.501,85	40.587.851.958,00	40.721.350.822,79	10.688.388.820,43

	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>
1. Piutang Pajak	45.232.494.137,75	42.272.798.237,25

Saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp45.232.494.137,75 dengan rincian sebagai berikut.

Piutang Pajak per 31 Desember 2018	<u>Saldo 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>Saldo 2018</u> <u>(Rp)</u>
a) Pajak Penerangan Jalan	3.616.658.646,00	3.356.934.485,00
b) Pajak Reklame	62.680.990,00	29.150.004,25
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)		
- Tahun 2019	3.784.083.704,75	0,00
- Tahun 2018	3.036.261.617,00	3.935.569.604,00
- Tahun 2017	1.416.704.925,00	1.473.653.694,00
- Tahun 2016	2.043.780.654,00	2.099.084.661,00
- Tahun 2015	1.551.006.499,00	1.595.716.821,00
- Tahun 2014	969.160.057,00	1.010.162.956,00
- Tahun 2013	1.157.248.036,00	1.162.169.567,00
- Tahun 2012	2.234.584.896,00	2.237.450.669,00
- Tahun 2011	2.297.263.875,00	2.301.293.058,00
- s/d Tahun 2010	23.063.060.238,00	23.071.612.718,00
Jumlah (c)	41.553.154.501,75	38.886.713.748,00
Jumlah (a)+(b)+(c)	45.232.494.137,75	42.272.798.237,25

Perhitungan Piutang Pajak Daerah Tahun 2019 beserta penyisihannya dijelaskan pada **Lampiran 14**.

	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>
2. Piutang Retribusi	173.304.276,00	199.484.786,00

Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp173.304.276,00 dengan perhitungan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 40 Rincian Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Blitar
per 31 Desember 2019**

No	SKPD	Jenis	Nilai (Rp)
a)	Dinas PU dan Penataan Ruang	Piutang Retribusi IMB	28.521.725,00
b)	Dinas PU dan Penataan Ruang	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi: - PT Naragita Dinamika Komunika Tahun 2014 dan 2018; - PT XL Axiata 2018; - PT Inforte Solusi Infotek Tahun 2019; - PT Mitra Langgeng Perkasa Tahun 2019	20.434.989,00
c)	Disperindag	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	108.117.300,00
d)	BPKAD – SKPD	Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	4.986.254,00
e)	BPKAD – SKPD	Piutang Retribusi Sewa Rumah Tanah dan Bangunan	0,00
f)	Dinas Lingkungan Hidup	Piutang Retribusi Ijin Gangguan Tahun 2014 dan 2015	11.244.008,00
Jumlah			173.304.276,00

Perhitungan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2019 beserta penyisihannya dijelaskan pada **Lampiran 15**.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.903.726.239,00	0,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.903.726.239,00 merupakan piutang deviden atas penyertaan modal pada Bank Jatim. Deviden Bank Jatim tahun 2018 telah diterima sebesar Rp1.801.430.575,95 pada tanggal 29 Mei 2019 sesuai Tanda Bukti Penerimaan Nomor 00554/STS/4.4.1.1/2019. Perhitungan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 beserta penyisihannya dijelaskan pada **Lampiran 16**.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
4. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	30.095.197.189,98	22.366.109.335,44

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp30.095.197.189,98 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 41 Rincian Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019**

No	Jenis	Nilai (Rp)
a)	Piutang Bunga Pinjaman	158.311.927,00
b)	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.003.000,00
c)	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-Sewa	48.945.000,00
d)	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	55.247.975,00
e)	Piutang Lain-Lain Pendapatan BLUD	19.015.965.229,53
f)	Piutang Lain-lain Pendapatan Denda PBB-P2	10.753.599.602,45



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis	Nilai (Rp)
g)	Piutang Pendapatan Hasil Kerjasama	61.124.456,00
	Jumlah	30.095.197.189,98

Penjelasan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut.

- a. Piutang Bunga Pinjaman sebesar Rp158.311.927,00.

**Tabel 42 Rincian Saldo Piutang Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Blitar
per 31 Desember 2019**

No.	Bunga Pinjaman	Saldo Per 31 Des 2018 (Rp)	Setoran Tahun 2019 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)	Kondisi Pinjaman (Tahun 2019)
a	Dinas Peternakan	34.840.000,00	0,00	34.840.000,00	Macet
b	BP4K	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	Macet
c	Disperindag	113.721.927,00	0,00	113.721.927,00	Macet
	Jumlah	158.311.927,00	0,00	158.311.927,00	

- b. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp2.003.000,00 merupakan penjualan kendaraan Roda Dua Tahun 2015 yang belum terbayar.
- c. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – Sewa sebesar Rp48.945.000,00 merupakan Sewa Kios Eks Kawedanan Lodoyo-Sutojayan Tahun 2018 dan 2019.
- d. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp55.247.975,00 dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 43 Rincian Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
per 31 Desember 2019**

No.	Nama	Nilai (Rp)
a)	An.Cuk Widatmuko	44.747.975,00
b)	An. Hari Purwanto	8.000.000,00
c)	An. Eko Suhariato	1.000.000,00
d)	An. Nuryasin	1.500.000,00
e)	An. Supito	0,00
	Jumlah	55.247.975,00

- e. Piutang Lain-Lain-Pendapatan BLUD pada RSUD “Ngudi Waluyo” sebesar Rp19.015.965.229,53 rincian sebagai berikut.

**Tabel 44 Rincian Piutang Retribusi Lainnya pada RSUD “Ngudi Waluyo”
per 31 Desember 2019**

No.	Jenis	Nilai (Rp)
a)	BPJS-Kesehatan	17.511.126.604,00
b)	Jasa Raharja	0,00
c)	Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan	1.495.280.949,00
d)	Kekurangan Volume Pekerjaan (Asrama)	9.557.676,53
	Jumlah	19.015.965.229,53



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- f. Piutang Lain-Lain Pendapatan Denda PBB-P2 merupakan piutang denda atas Pajak PBB-P2 sebelum Tahun 2010 hingga Tahun 2019 senilai Rp10.753.599.602,45.
- g. Piutang pendapatan Hasil Kerjasama sebesar Rp61.124.456,00 merupakan kerjasama Dinas Parbudpora dengan Pemerintah Desa dan Perhutani dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 45 Rincian Piutang Retribusi Lainnya pada Dinas Parbudpora per 31 Desember 2019

No.	Jenis	Nilai (Rp)
a)	Piutang Pendapatan Hasil Kerjasama – Pantai Jolosutro	7.117.581,00
b)	Piutang Pendapatan Hasil Kerjasama – Pantai Serang	12.569.375,00
c)	Piutang Pendapatan Hasil Kerjasama – Pantai Tambajrejo	41.437.500,00
Jumlah		61.124.456,00

Perhitungan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2019 beserta penyisihannya dijelaskan pada **Lampiran 17**.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
5. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	35.578.540.205,00	9.469.931.806,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp35.578.540.205,00 terdiri dari:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan realisasi penerimaan Kas Triwulan IV Tahun 2019 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp5.795.632.212,00; dan
- b. Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebesar Rp29.782.907.993,00.

Perhitungan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019 beserta penyisihannya dijelaskan pada **Lampiran 18**.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
6. Piutang Pendapatan Lainnya	36.541.556.087,19	36.978.780.100,21

Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Pemerintah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp36.541.556.087,19 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 46 Rincian Saldo Piutang Pendapatan Lainnya
Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019**

No.	Jenis	Nilai (Rp)
a)	Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah	34.816.885.125,00
b)	Piutang Pendapatan Lainnya	1.724.670.962.19
	Jumlah	36.541.556.087,19

Penjelasan Piutang Pendapatan Lainnya Pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah sebesar Rp34.816.885.125,00 adalah Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah yang telah mempunyai penetapan pengadilan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 47 Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah yang Mempunyai
Penetapan Pengadilan**

No	Nama	Tahun	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)	Keterangan
(a)	IM	2004	27.560.635.125,00	IM, mantan Bupati Blitar. Telah penetapan pengadilan melalui surat Kajari Blitar No. B.724/0.5.22/EP.1/05/2008, namun belum ditetapkan Majelis TP/TGR.
(b)	KR	2004	6.600.000.000,00	Kr, mantan Kabag Keu. Kab. Blitar. Telah putusan pengadilan melalui surat Kajari Blitar Nomor B.724/0.5.22/EP.1/05/2008 tanggal 5 Mei 2008. Namun belum ditetapkan Majelis TP/TGR.
(c)	SD	2004	506.250.000,00	SD, telah penetapan pengadilan melalui surat Kajari Blitar Nomor B.724/0.5.22/EP.1/05/2008 tanggal 5 Mei 2008, namun belum ditetapkan Majelis TP/TGR.
(d)	SR	2004	150.000.000,00	Sr, telah penetapan pengadilan melalui surat Kajari Blitar Nomor B.724/0.5.22/EP.1/05/2008 tanggal 5 Mei 2008, namun belum ditetapkan Majelis TP/TGR.
Jumlah			34.816.885.125,00	

Berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Blitar kepada Bupati Blitar Nomor B-3127/0.5.22/Fu/12/2009 tanggal 10 Desember 2009 perihal Klarifikasi Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah antara lain menyebutkan bahwa:

- 1) Piutang Ganti Rugi atas nama Alm. IM (temuan Belanja TA 2003-2004) sebesar Rp27.560.635.125,00 telah dibayar sebesar Rp100.000.000,00 dan disetor ke Kas Negara.
- 2) Piutang Ganti Rugi atas nama KR (temuan Belanja TA 2003-2004) sebesar Rp6.600.000.000,00 telah dibayar sebesar Rp100.000.000,00 dan disetor ke Kas Negara.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 3) Piutang Ganti Rugi atas nama SD dengan rincian uang pengganti sebesar Rp306.250.000,00 dan denda Rp200.000.000,00. Denda dan uang pengganti tidak sanggup dibayar dan memilih menjalani subsidair pidana kurungan serta menjalani pidana penjara.
- 4) Piutang Ganti Rugi atas nama SR (TP 2004) sebesar Rp150.000.000,00 telah dibayar sebesar Rp50.000.000,00 dan disetor ke Kas Negara.

Bahwa dari klarifikasi piutang Ganti Rugi atas kekayaan Daerah, berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Nomor B-3127/0.5.22/Fu/12/2009 tanggal 10 Desember 2009, Bupati Blitar telah mengirimkan Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Nomor X.790/1110/409.207/2016 tanggal 8 November 2016 perihal Permohonan Pendapat Hukum, telah dijawab oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 4 Januari 2017 Nomor B-06/0.5.22/65/01/2017 perihal Pendapat Hukum yang kesimpulannya sebagai berikut adalah “Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut (Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM.; Krisanto, SE., MM.; Samirin Darwoto; Drs. H. Soebiantoro, M.Si.) telah menjalani pidana pokok berupa pidana penjara dan menjalani pidana subsidair dari pidana denda dan uang pengganti, maka ke empat orang tersebut sudah tidak berkewajiban lagi untuk membayar denda maupun uang pengganti, maka dari itu pendapat dari kejaksaan Negeri Blitar bahwa terhadap Sdr. Drs. H. Imam Muhadi, MBA. MM. dkk sudah tidak lagi dibebani untuk mengembalikan kerugian negara dan Pemerintah Kabupaten Blitar tidak berwenang melakukan penagihan kerugian negara kepada Sdr. Drs. H. Imam Muhadi dkk maupun terhadap ahli warisnya”.

- b. Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp1.724.670.962,19 adalah piutang dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.552.433.887,19 dan kekurangan SPJ Belanja sebesar Rp172.237.075,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Kekurangan Volume Pekerjaan

- Dinas Perkim tahun 2019	Rp	28.185.681,59
- Dinas PUPR tahun 2019	Rp	152.607.650,06
- Dinas Perindag tahun 2019	Rp	27.584.891,64
- Dinas Parbudpora tahun 2019	Rp	40.687.784,45
- Dinas Kesehatan tahun 2019	Rp	1.303.367.879,45
Jumlah	Rp	<u>1.552.433.887,19</u>

2. Kekurangan SPJ Belanja

- Kecamatan Sutojayan tahun 2019	Rp	10.599.721,00
- Kecamatan Garum tahun 2018	Rp	500,00
- Kecamatan Garum tahun 2019		6.007.490,00
- Dinas Wlingi tahun 2019	Rp	35.618.384,00
- Dinas Talun tahun 2019	Rp	101.481.480,00
- Dinas Gandusari tahun 2019	Rp	18.529.500,00
Jumlah	Rp	<u>172.237.075,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp34.816.885.125,00 tersebut belum termasuk piutang ganti rugi kekayaan daerah sebesar Rp1.021.897.378,04 yang terdiri dari kasus yang telah disidang oleh Majelis TP-TGR sebesar Rp201.372.000,00, kasus TP-TGR yang masih berupa informasi dari BPK sebesar Rp819.652.399,04, dan berupa informasi dari APIP sebesar Rp872.979,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 48 Rincian Piutang Ganti Rugi Kekayaan Daerah yang Masih Berupa Berita Acara Sidang Majelis TP-TGR, Informasi BPK, dan APIP

No	Nama	Tahun	Saldo Per 31 Des 2018 (Rp)	Keterangan
I. Berupa Berita Acara Sidang Majelis TP-TGR				
1	Mantan Kepala Dinas Hutbun	2004	77.500.000,00	Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor 790/30/409.023/2007 tanggal 26 Januari 2007
2	HS	2006	24.000.000,00	Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor 790/30/409.023/2007 tanggal 26 Januari 2007
3	Alm. Sm	2006	11.200.000,00	Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor 790/30/409.023/2007 tanggal 26 Januari 2007
4	MA. SH	2007	88.672.000,00	Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor 790/30/409.023/2007 tanggal 26 Januari 2007
Jumlah I			201.372.000,00	
II. Informasi dari BPK				
1	a.n Bupati	2005	23.804.899,00	Bupati
3	CVAT Dispendukcapil	2008	771.300.000,00	Denda kekurangan pekerjaan SIAK
4	Dinas Kesehatan	2009	0,75	Kelebihan pembayaran pekerjaan pustu dan puskesmas
5	CVAm, PT AW, PT KDI, S,Y,H pada DPPKAD	2009	0,00	Kekurangan pungutan dan penyetoran pajak galian gol. C
6	DPPKAD	2009	24.547.500,00	Kekurangan penyetoran denda keterlambatan penyetoran retribusi
7	CVBJSDinas Pertanian	2009	(0,71)	Kurang volume pekerjaan
8	CV BJSDinas Pertanian	2009	0,00	Kurang volume pekerjaan
9	CV SA	2011	0,00	Kurang Volume Pekerjaan
Jumlah II			819.652.399,04	
III. Informasi dari APIP				
1	Kelurahan Tawangsari	2008	705.670,00	Lain-lain
2	Kecamatan Selorejo	2010	167.309,00	ADD
Jumlah III			872.979,00	
Jumlah I,II dan III			1.021.897.378,04	

Perhitungan Piutang Pendapatan Lainnya Tahun 2019 beserta penyisihannya dijelaskan pada **Lampiran 19**.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
7. Piutang Lainnya	2.517.054.484,00	2.164.569.252,00

Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.517.054.484,00 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 49 Rincian Saldo Piutang Lainnya
Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019**

No	Jenis	Nilai (Rp)
a)	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor	11.800.000,00
b)	Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji a.n. Wiji Mulyono	18.818.800,00
c)	Piutang Pokok Pinjaman yang dikelola oleh BPR Hambangan Artha Selaras (HAS)	1.884.394.644,00
d)	Piutang Kelebihan Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa	602.041.040,00
	Jumlah	2.517.054.484,00

Penjelasan Piutang Lainnya adalah sebagai berikut.

- a. Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.800.000,00 merupakan hasil lelang kendaraan bermotor oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah pada Tahun 2008 yang belum lunas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 50 Rincian Saldo Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2019

No	Pembeli	Jenis Kendaraan	Harga Pembelian (Rp)	Angsuran 2014 s/d 31 Des 2019 (Rp)	Saldo Piutang (Rp)
(1)	MSR	Mitsubishi Galant	14.000.000,00	2.200.000,00	11.800.000,00
		Jumlah			11.800.000,00

- b. Piutang atas kelebihan pembayaran gaji a.n. WM sebesar Rp18.818.800,00 merupakan kelebihan pembayaran gaji di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar bulan September 2014 s.d Maret 2015 (7 bulan).
- c. Piutang Pokok Pinjaman merupakan Piutang Pinjaman pada Dinas Peternakan, BP4K, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 51 Rincian Saldo Piutang Pokok Pinjaman per 31 Desember 2019

No.	Pokok Pinjaman	Saldo per 31 Des 2018 (Rp)	Setoran Tahun 2019 (Rp)	Saldo per 31 Des 2019 (Rp)	Kondisi Pinjaman (Tahun 2018)
a	Dinas Peternakan	359.700.000,00	5.000.000,00	354.700.000,00	Macet
b	BP4K	107.625.000,00	0,00	107.625.000,00	Macet
c	Disperindag	1.435.169.644,00	13.100.000,00	1.422.069.644,00	Macet
	Jumlah	1.902.494.644,00	18.100.000,00	1.884.394.644,00	

Saldo Piutang Pokok Pinjaman sebesar Rp1.884.394.644,00 merupakan saldo Piutang Pinjaman yang dikelola oleh BPR Hambangan Artha Selaras (HAS).

- d. Piutang Kelebihan Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa (Kelebihan Transfer) merupakan kelebihan transfer bagi hasil hasil pajak dan retribusi ke desa Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 52 Rincian Saldo Piutang Kelebihan Transfer
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa Pemerintah Kabupaten Blitar
per 31 Desember 2019**

No.	Jenis	Nilai (Rp)
	Saldo Awal 31 Desember 2018	227.711.345,00
(+)	Koreksi Pengakuan Piutang (lebih bayar) bagi Hasil Pajak ke Desa	116.015,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Jenis	Nilai (Rp)
	Pengakuan Piutang (lebih bayar) Bagi Hasil Pajak ke Desa Tahun 2019	235.647.849,00
(+)	Koreksi Pengakuan Piutang (lebih bayar) bagi Hasil Retribusi ke Desa	75.502.082,00
	Pengakuan Piutang (lebih bayar) Bagi Hasil Retribusi ke Desa Tahun 2019	63.063.749,00
	Saldo akhir 31 Desember 2019	602.041.040,00

Perhitungan Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 beserta penyisihannya dijelaskan pada **Lampiran 20**. Sedangkan untuk perhitungan kekurangan transfer bagi hasil pajak dan retribusi ke Desa per 31 Desember 2019 dijelaskan pada **Lampiran 21**.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(51.352.097.286,32)	(50.605.828.242,57)

Saldo penyisihan piutang tidak tertagih Pemerintah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2019 bersaldo kredit sebesar Rp51.352.097.286,32 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 53 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019**

No	Jenis	Nilai (Rp)
a)	Penyisihan Piutang Pajak	(30.192.035.282,94)
b)	Penyisihan Piutang Retribusi	(168.649.895,50)
c)	Penyisihan piutang Hasil kekayaan daerah yang Dipisahkan	0,00
d)	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(2.075.661.987,33)
e)	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(141.512.777,65)
f)	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(17.408.442.562,50)
g)	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.365.794.780,40)
	Jumlah	(51.352.097.286,32)

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
9. Belanja Dibayar Dimuka	37.500.000,00	37.500.000,00

Saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp37.500.000,00 karena penyediaan jasa oleh pihak ketiga telah dibayar lunas dan tidak terdapat jasa yang belum digunakan per 31 Desember 2019. Saldo Belanja Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp37.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 54 Rincian Saldo Belanja Dibayar Dimuka
Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019**

No.	Jenis	Saldo (Rp)	Berakhir
a)	Sewa gedung workshop di Kendalrejo Kec Talun	37.500.000,00	30 September 2020
	Jumlah	37.500.000,00	

Perhitungan Belanja dibayar dimuka dijelaskan pada **Lampiran 21**.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
10. Persediaan	39.392.846.412,87	25.997.192.054,36

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Pemerintah Kabupaten Blitar yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo Persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2019 sebesar Rp39.392.846.412,87 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 55 Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2019

No	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.759.232.053,07
b)	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	206.288.635,00
c)	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	18.100.500,00
d)	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	225.141.966,00
e)	Persediaan Bahan Bakar Minyak/ gas	31.059.140,00
f)	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	36.400.000,00
g)	Persediaan Isi Tabung Gas	2.320.000,00
h)	Persediaan Isi Tabung Oksigen	0,00
i)	Persediaan Alat Kesehatan/Alat Lab. Habis Pakai	2.503.498.306,00
j)	Persediaan Cenderamata/Piagam/Karangan Bunga	139.453.200,00
k)	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	39.060.083,00
l)	Persediaan Bahan Cetak	1.622.295.541,00
m)	Persediaan Bahan baku bangunan	143.246.599,00
n)	Persediaan Bahan obat-obatan	14.017.983.214,00
o)	Persediaan Bahan kimia	40.049.482,00
p)	Persediaan Bahan Peralatan	166.067.886,00
q)	Persediaan Bahan Sembako	14.900.000,00
r)	Persediaan Bahan Pakan Hewan	2.833.750,00
s)	Persediaan Bahan Pupuk Tanaman	2.375.000,00
t)	Persediaan Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00
u)	Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	531.890.938,80
v)	Persediaan Pakaian Kerja Lapangan	4.420.000,00
w)	Persediaan Pakaian Korpri	2.680.296.000,00
x)	Persediaan Pakaian Batik Tradisional	0,00
y)	Persediaan Pakaian Olah Raga	63.736.000,00
z)	Persediaan Makanan dan Minuman Pasien	15.723.873,00
a.a)	Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.638.950.246,00
a.b)	Persediaan Barang Hadiah Lomba	487.524.000,00
	Jumlah	39.392.846.412,87

Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2019 untuk setiap SKPD pada **Lampiran 23**.

Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp14.638.950.246,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.098.703.296,00	Ganti Rugi Tanah Kali Bogel yang belum diserahkan ke BBWS
2	Dinas Pertanian	4.540.246.950,00	Lumbung Pangan, Irigasi Air Tanah Dangkal, Dam Parit, JUT dan Drainase, Embung, RMU dan Green House yang belum diserahkan ke Kelompok Tani
Jumlah		14.638.950.246,00	

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang	25.590.650.548,03	25.570.347.657,02

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.570.347.657,02 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.590.650.548,03 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 56 Saldo Investasi Jangka Panjang
Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2019 dan 2018**

No.	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1)	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
2)	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	25.590.650.548,03	25.570.347.657,02
Jumlah Investasi Jangka Panjang		25.590.650.548,03	25.570.347.657,02

Penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp25.590.650.548,03 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 57 Rincian Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2018 dan 2019

No	Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Mutasi TA 2019 (Rp)				Per 31 Des 2019 (Rp)
			Tambahkan Modal (Koreksi)	Bagian Laba/Rugi/Setoran			
				Bagian Laba	Bagian Rugi	Setoran PAD	
1	PDAM	7.169.548.761,82	(186.396.313,71)	699.179.440,72		-	7.682.331.888,83
2	PT Bank Jatim	9.874.098.750,00	-	-		-	9.874.098.750,00
3	PT BPR Jatim	50.000.000,00	-	-		-	50.000.000,00
4	PD Savitri Indah	657.211.145,20	-	7.069.427,00		20.500.000,00	643.780.572,20
5	PT BPR HAS	7.819.489.000,00	(9.331.000,00)	96.597.500,00		566.316.163,00	7.340.439.337,00
Jumlah		25.570.347.657,02	(195.727.313,71)	802.846.367,72	-	586.816.163,00	25.590.650.548,03

Penyertaan modal pada PDAM, PD Savitri Indah, dan BPR Hambangun Artha Selaras (HAS) dihitung dengan metode ekuitas. Perhitungan penyertaan modal dengan metode ekuitas secara rinci pada **Lampiran 24** sampai dengan **Lampiran 26**. Sedangkan perhitungan penyertaan modal dengan metode biaya pada PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim secara rinci pada **Lampiran 27** dan **Lampiran 28**.

Perhitungan saldo penyertaan modal dengan metode ekuitas dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2019 (*audited*), Laporan Keuangan BPR HAS Tahun 2019 (*audited*), dan Laporan Keuangan PD Savitri Indah Tahun 2019 (*unaudited*).



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah Pokok Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp25.570.347.657,02 telah memiliki dasar hukum berupa Perda Pendirian dan Penyertaan Modal Awal dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 58 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019

No	Uraian	Modal Disetor Per 31 Desember 2018 (Rp)	Tambahan Modal 2018 (Rp)	Penyertaan Modal Per 31 Desember 2019 (Rp)	Nilai yang sudah diperdakan (Rp)	%	Dasar Hukum
1	PDAM	27.086.025.020,95	0,00	27.086.025.020,95	27.086.025.020,95	100	Perda Pendirian Nomor 4 Tahun 1993 dan Perda Nomor 11 Tahun 2016
2	PT Bank Jatim	6.656.000.000,00	0,00	6.656.000.000,00	6.656.000.000,00	100	Perda Nomor 19 Tahun 2011 Tgl 15 September 2011 dan Perda Nomor 18 Tahun 2012 Tgl 26 Desember 2012
3	PT BPR Jatim	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100	Perda Nomor 19 Tahun 2012 Tgl 26 Desember 2012
4	PD Savitri Indah	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	100	Perda Nomor 8 Tahun 1976 Tgl 14 Juni 1976 dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tgl 10 Mei 2012
5	PT BPR HAS	7.051.000.000,00	0,00	7.051.000.000,00	7.051.000.000,00	100	Perda Nomor 3 Tahun 2012
Jumlah		41.058.025.020,95	0,00	41.058.025.020,95	41.058.025.020,95		

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
5.3.1.3 Aset Tetap	4.045.576.555.594,55	3.627.424.581.718,41

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.627.424.581.718,41 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.045.576.555.594,55 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 59 Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Blitar
Per 31 Desember 2019 dan 2018**

No	Uraian	Saldo Tahun 2018 (Rp)	Mutasi TA 2019 (Rp)		Saldo Tahun 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	737.892.208.149,76	24.834.115.306,50	2.332.360.500,50	760.393.962.955,76
2	Peralatan dan Mesin	546.450.541.749,65	139.260.100.820,73	44.258.107.811,45	641.452.534.758,93
3	Gedung dan Bangunan	1.075.164.775.861,39	301.260.545.578,36	96.451.861.780,17	1.279.973.459.659,58
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.774.056.961.090,27	312.433.425.428,26	69.008.705.625,65	3.017.481.680.892,88
5	Aset Tetap Lainnya	44.614.477.986,63	32.232.526.385,00	26.352.146.917,00	50.494.857.454,63
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	57.621.342.762,14	30.671.144.047,12	64.201.163.800,14	24.091.323.009,12
7	Akumulasi Penyusutan	(1.608.375.725.881,43)	154.634.288.691,44	274.569.825.946,36	(1.728.311.263.136,35)
	Jumlah Aset Tetap	3.627.424.581.718,41	995.326.146.257,41	577.174.172.381,27	4.045.576.555.594,55



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap dalam Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>
1. Tanah	760.393.962.955,76	737.892.208.149,76

Saldo Tanah Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp760.393.962.955,76 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

SALDO AWAL ASET TANAH	737.892.208.149,76
Penambahan	
Belanja Pegawai	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Belanja Modal	52.138.000,00
Koreksi	22.501.754.806,00
Reklasifikasi	0,50
Mutasi	2.280.222.500,00
Hibah	0,00
Total Penambahan	24.834.115.306,50
Pengurangan	
Penghapusan	0,00
Hibah	0,00
Koreksi	0,00
Reklasifikasi	(52.138.000,50)
Mutasi	(2.280.222.500,00)
Ekstrakomtabel	0,00
Total Pengurangan	(2.332.360.500,50)
SALDO AKHIR ASET TANAH	760.393.962.955,76

Mutasi Aset Tetap Tanah dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penambahan aset tanah sebesar Rp52.138.000,00 merupakan penambahan aset dari Belanja Modal TA 2019 pada Kecamatan Wlingi berupa pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tangkil.
- b. Penambahan aset dari Koreksi Tambah sebesar Rp22.501.754.806,00 pada:

1	Dinas Pendidikan	Rp	2.661.634.675,00
2	Dinas PU dan Penataan Ruang	Rp	17.186.226.308,00
3	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp	13.409.863,00
4	BPKAD	Rp	1.154.146.960,00
5	Kecamatan Wlingi	Rp	37.669.000,00
6	Kecamatan Garum	Rp	1.333.104.000,00
7	Kecamatan Kanigoro	Rp	107.094.000,00
8	Kecamatan Panggungrejo	Rp	8.470.000,00
Total			22.501.754.806,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.661.634.675,00 merupakan penilaian aset tetap tanah untuk bangunan tempat pendidikan sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019.
- 2) Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp17.186.226.308,00 terdiri atas penilaian aset tetap Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-Lepe /Setren sebesar Rp682.377.058,00 sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019 dan penilaian aset tetap Tanah Untuk Bangunan Jalan sebesar Rp16.503.849.250 ,00 sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/495/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya tanggal 20 Agustus 2019.
- 3) Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp13.409.863,00 merupakan penilaian aset tetap tanah untuk bangunan tempat kerja (tanah untuk Bangunan Kantor Pemerintah BPP Kesamben dan BPP Ponggok) sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019.

- 4) BPKAD sebesar Rp 1.154.146.960,00 dengan rincian sebagai berikut:

BPKAD – SKPD

a)	Tanah Tegalan	Rp	5.325.000,00	Penilaian Tanah sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019
b)	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	Rp	43.360.000,00	
c)	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	Rp	994.344.000,00	
d)	Tanah Kosong	Rp	7.766.400,00	
e)	Tanah Untuk Bangunan Air	Rp	6.451.560,00	

BPKAD-SKPB

a)	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	Rp	96.900.000,00	Koreksi kurang catat tanah karena dobel pengurangan pada LK 2017 (telah dimutasi ke Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan SK No188/469/409,06/KPTS /2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
----	--	----	---------------	---



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten
Blitar tanggal 29
Desember 2017

Total		Rp	1.154.146.960,00
5) Kecamatan Wlingi sebesar Rp37.669.000,00 merupakan penilaian aset tetap tanah untuk bangunan tempat Kerja sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019.			
6) Kecamatan Garum sebesar Rp1.333.104.000,00 merupakan penilaian aset tetap tanah sawah sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019.			
7) Kecamatan Kanigoro sebesar Rp107.094.000,00 merupakan penilaian aset tetap Tanah Kosong sebesar Rp101.094.000,00 dan penilaian aset tetap Tanah Lapangan Olahraga sebesar Rp6.000.000,00 sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019.			
8) Kecamatan Panggungrejo sebesar Rp8.470.000,00 merupakan penilaian aset tetap Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019.			
c. Penambahan aset dari reklasifikasi sebesar Rp0,50 merupakan Reklasifikasi asset Tanah Lapangan Olahraga ke Aset Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa pada Kel. Kalipang Kecamatan Sutojayan sesuai dengan KIB A pada Kecamatan Sutojayan.			
d. Mutasi antar SKPD sebesar Rp2.280.222.500,00 merupakan mutasi asset tanah pada :			
1	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp	787.200.000,00
2	Disparbudpora	Rp	1.489.120.000,00
3	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp	3.902.500,00
Total		Rp	2.280.222.500,00
1) Dinas Perpustakaan dan Arsip dari Dinas Pertanian dan Pangan berupa Tanah untuk Industri Makanan sebesar Rp787.200.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pergeseran Barang Milik Daerah Eks Tiwul Instan Dari Dinas Pertanian dan Pangan Ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah No. 900/002/BA-GS/2019.			
2) Disparbudpora dari BPKAD sebesar Rp1.489.120.000,00 berupa Tanah Lapangan Sepak Bola (Stadion Srengat) sesuai dengan Berita Acara Pergeseran Barang Milik Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan			



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Daerah (SKPD) ke Dinas Parbudpora No. 900/011/BA-GS/2019 tgl 30 Desember 2019.

- 3) Dinas Pertanian dan Pangan dari Kecamatan Gandusari sebesar Rp3.902.500,00 berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa/Tinggal sesuai dengan Berita Acara Pergeseran Barang Milik Daerah dari Kecamatan Gandusari ke Dinas Pertanian dan Pangan No. 900/003/BA-GS/2019 tanggal 25 Juni 2019.
- e. Reklasifikasi kurang sebesar Rp52.138.000,50 pada Kecamatan Wlingi sebesar Rp52.138.000,00 merupakan reklasifikasi Aset Tetap Tanah untuk Bangunan Air ke Bangunan Pengaman Irigasi. Sedangkan reklasifikasi kurang sebesar Rp0,50 pada Kecamatan Sutojayan merupakan reklas dari Tanah Lapangan Olah Raga ke Tanah Bangunan Tempat Kerja/Jasa.

Mutasi Aset Tetap –Tanah (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada **Lampiran 28**: Rekap mutasi penambahan dan pengurangan per SKPD Aset Tetap –Tanah Tahun 2018 serta **Lampiran 29**: Rincian Obyek Rekening Tahun 2019.

Rincian Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp760.393.962.955,76 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 60 Rincian Tanah Masing-Masing SKPD per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/Turun (%)
1	Dinas Pendidikan	105.467.106.612,00	102.805.471.937,00	2,59
2	Dinas Kesehatan	12.700.714.650,00	12.700.714.650,00	-
	- Dinas Kesehatan	1.199.277.850,00	1.199.277.850,00	-
	- Puskesmas Bakung	40.312.500,00	40.312.500,00	-
	- Puskesmas Wonotirto	185.040.000,00	185.040.000,00	-
	- Puskesmas Margomulyo	794.380.000,00	794.380.000,00	-
	- Puskesmas Wates	180.000.000,00	180.000.000,00	-
	- Puskesmas Binangun	222.797.500,00	222.797.500,00	-
	- Puskesmas Sutojayan	1.837.532.000,00	1.837.532.000,00	-
	- Puskesmas Kademangan	763.935.000,00	763.935.000,00	-
	- Puskesmas Kanigoro	104.640.000,00	104.640.000,00	-
	- Puskesmas Talun	268.310.000,00	268.310.000,00	-
	- Puskesmas Selopuro	146.000.000,00	146.000.000,00	-
	- Puskesmas Kesamben	778.260.000,00	778.260.000,00	-
	- Puskesmas Boro	403.772.800,00	403.772.800,00	-
	- Puskesmas Doko	122.740.000,00	122.740.000,00	-
	- Puskesmas Wlingi	551.150.000,00	551.150.000,00	-
	- Puskesmas Gandusari	312.710.000,00	312.710.000,00	-
	- Puskesmas Garum	2.396.400.000,00	2.396.400.000,00	-
	- Puskesmas Slumbung	170.830.000,00	170.830.000,00	-
	- Puskesmas Nglegok	370.402.000,00	370.402.000,00	-
	- Puskesmas Sanankulon	257.730.000,00	257.730.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/Turun (%)
	- Puskesmas Ponggok	292.695.000,00	292.695.000,00	-
	- Puskesmas Bacem	289.800.000,00	289.800.000,00	-
	- Puskesmas Srengat	632.000.000,00	632.000.000,00	-
	- Puskesmas Wonodadi	292.000.000,00	292.000.000,00	-
	- Puskesmas Udanawu	88.000.000,00	88.000.000,00	-
3	RSUD	25.960.000.000,00	25.960.000.000,00	-
4	Dinas PU dan Penataan Ruang	185.645.898.575,00	168.459.672.267,00	10,20
5	Dinas Perumahan dan KP	18.305.536.000,00	18.305.536.000,00	-
6	Badan Kesbangpol	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	-
7	BPBD	421.270.000,00	421.270.000,00	-
8	Dinas Sosial	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	-
9	Dinas Nakertrans	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB	213.750.000,00	213.750.000,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.154.996.600,00	2.154.996.600,00	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	9.563.400.000,00	9.563.400.000,00	-
13	Dinas Perhubungan	2.835.330.000,00	2.835.330.000,00	-
14	Dinas Koperasi dan UMKM	784.700.000,00	784.700.000,00	-
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.422.700.000,00	3.422.700.000,00	-
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip	812.148.000,00	24.948.000,00	3.155,36
17	Disparbudpora	54.718.650.000,00	53.229.530.000,00	2,80
18	Dinas Pertanian dan Pangan	21.987.372.563,00	22.757.260.200,00	(3,38)
19	Dinas Peternakan dan Perikanan	6.207.952.400,00	6.207.952.400,00	-
20	Disperindag	18.947.916.000,00	18.947.916.000,00	-
21	Sekretariat Daerah	626.874.500,00	626.874.500,00	-
	- Bagian Pemerintahan	125.274.500,00	125.274.500,00	-
	- Bagian Umum	501.600.000,00	501.600.000,00	-
22	BPKAD	115.750.291.014,00	116.085.264.054,00	(0,29)
	- BPKAD (SKPD)	80.197.411.014,00	0,00	
	- BPKAD (PPKD)	35.552.880.000,00	0,00	
23	Badan Pendapatan Daerah	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	-
24	BKPSDM	4.001.400.000,00	4.001.400.000,00	-
25	Kecamatan Selopuro	406.850.000,00	406.850.000,00	-
26	Kecamatan Wlingi	34.443.633.867,50	34.405.964.867,50	0,11
27	Kecamatan Talun	35.896.038.800,00	35.896.038.800,00	-
28	Kecamatan Gandusari	91.000.000,00	94.902.500,00	(4,11)
29	Kecamatan Doko	198.500.000,00	198.500.000,00	-
30	Kecamatan Garum	20.089.504.000,00	18.756.400.000,00	7,11
31	Kecamatan Kanigoro	11.868.674.000,00	11.761.580.000,00	0,91
32	Kecamatan Sutojayan	17.467.175.574,20	17.467.175.574,20	-
33	Kecamatan Binangun	150.000.000,00	150.000.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/Turun (%)
34	Kecamatan Wates	2.659.072.850,00	2.659.072.850,00	-
35	Kecamatan Panggungrejo	165.970.000,00	157.500.000,00	5,38
36	Kecamatan Wonotirto	97.327.350,00	97.327.350,00	-
37	Kecamatan Bakung	345.197.500,00	345.197.500,00	-
38	Kecamatan Kademangan	6.723.929.775,00	6.723.929.775,00	-
39	Kecamatan Sanankulon	277.500.000,00	277.500.000,00	-
40	Kecamatan Srengat	21.661.601.275,06	21.661.601.275,06	-
41	Kecamatan Wonodadi	341.400.000,00	341.400.000,00	-
42	Kecamatan Udanawu	164.160.000,00	164.160.000,00	-
43	Kecamatan Ponggok	357.000.000,00	357.000.000,00	-
44	Kecamatan Nglegok	10.546.391.050,00	10.546.391.050,00	-
45	Kecamatan Selorejo	411.250.000,00	411.250.000,00	-
46	Kecamatan Kesamben	398.780.000,00	398.780.000,00	-
	TOTAL	760.393.962.955,76	737.892.208.149,76	3,05

Pemerintah Kabupaten Blitar sampai dengan 31 Desember 2019 memiliki tanah sebanyak 2.177 bidang tanah dengan luas seluruhnya 18.864.817,39 m² dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Keadaan per 31 Desember 2019 sebanyak 2.180 bidang seluas 18.869.067,39 m²;
- b. Penambahan dari pencatatan tanah di bawah jalan sebanyak 455 bidang seluas 9.087.942 m²;
- c. Ada pengurangan karena dobel catat sebanyak 2 bidang yaitu:
 1. Tanah Bangunan Kantor Jl Cokroaminoto seluas 4.070 m².
 2. Tanah bangunan tempat kerja Jl AKS Tubun seluas 180 m².
- d. Ada Pengurangan karena bukan merupakan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar sebanyak 1 bidang yaitu Pantai Serang dan Pantai Jolosutro.
- e. Tanah bersertifikat sebanyak 1.039 bidang seluas 6.182.426 m² dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Tanah bersertifikat per 31 Desember 2018 sebanyak 1.022 bidang seluas 5.967.892 m²;
 - 2) Penambahan sertifikat Tahun 2019 sebanyak 17 bidang seluas 104.383 m²;
- f. Tanah belum bersertifikat sebanyak 1.138 bidang seluas 11.649.108.67 m² dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Keadaan per 31 Desember 2019 sebanyak 1.155 bidang seluas 11.753.491.67 m²;
 - 2) Pengurangan karena telah diterbitkan sertifikat pada Tahun 2019 sebanyak 17 bidang seluas 104.383 m²;
- g. Tanah yang diajukan sertifikat pada tahun 2019, masih dalam proses sebanyak 19 bidang dengan luas 97.561.000 m².



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Tetap - Tanah sebesar Rp760.393.962.955,76 di dalamnya, antara lain:

- a. Tanah yang berlokasi di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok seluas 15.300 m² dengan nilai Rp1.139.850.000,00 yang sertifikatnya telah beralih menjadi sertifikat HGU atas pihak ketiga (PT BPPM) dan belum ditentukan statusnya karena masih terdapat permasalahan, dengan kronologi sebagai berikut:

Pada tanggal 23 Juli 2007 terjadi kesepakatan bersama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT Bina Peri Permai Malang Jawa Timur dengan hasil sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kabupaten Blitar menyediakan tanah untuk lokasi pembangunan perumahan untuk PNS, TNI/Polri, dan Umum;
- 2) PT BPPM yang melaksanakan pembangunan perumahan.

Pada jangka waktu setelah MOU ini telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya pada tanggal 20 Desember 2016 Bupati Blitar menyampaikan Surat Nomor 032/1321/409.212/2016 perihal Permohonan Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Jatilengger kepada DPRD Kabupaten Blitar. Atas surat Bupati tersebut DPRD Kabupaten Blitar belum menyampaikan tanggapannya. Saat ini Pansus mengusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk meminta fatwa Kementerian Dalam Negeri. Kronologis pelepasan tanah aset Pemerintah Kabupaten Blitar untuk perumahan Jatilengger terlampir pada **Lampiran 31**.

- b. Tanah milik Pemerintah Kabupaten Blitar yang digunakan untuk Kantor Imigrasi senilai Rp2.382.000.000,00 berdasarkan pada Kesepakatan Bersama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur tentang Penggunaan Gedung Eks Pembantu Bupati di Srengat untuk Kantor Imigrasi Kelas II Blitar Nomor 188/452/409.306/2003 dan Nomor W.10.UM.06.10-340 dan Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur tentang Penggunaan Gedung Ex Pembantu Bupati di Srengat untuk Kantor Imigrasi Kelas II Nomor 188/33/409.306/2004 dan Nomor W.10.PL.01.10-371.
- c. Tanah seluas 5.272m² sebesar Rp1.054.400.000,00 yang terletak di Kelurahan Babadan (Kecamatan Wlingi) dan tercatat sebagai Aset Tetap Dinas Pertanian yang telah ditukar guling dengan pihak swasta, tetapi belum dilakukan proses penghapusan dari daftar inventaris Pemerintah Kabupaten Blitar karena dokumen proses tukar menukar belum ditemukan.
- d. Tanah 97 bidang pada 22 SKPD yang bernilai Rp0,00 dan Rp1,00, sebanyak 91 bidang telah ditetapkan harga perolehannya dengan Keputusan Bupati Nomor 188/678/409.06/KPTS/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan. Sedangkan 6 bidang sisanya masih dalam proses penelusuran dokumen pendukung sebagai dasar penetapan harga perolehannya. Sehingga pada Tahun 2019 sisa tanah Pemerintah Kabupaten Blitar yang masih bernilai Rp0,00 dan Rp1,00 masih tersisa sebanyak 6 bidang, dengan rincian yaitu Aset Tetap Tanah pada Dinas Pendidikan sebanyak 6 bidang.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Namun nilai Aset Tetap – Tanah tersebut tidak termasuk didalamnya penilaian atas 176 saluran irigasi yang berada di Dinas PUPR.

	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>
2. Peralatan dan Mesin	641.452.534.758,93	546.450.541.749,65

Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp641.452.534.758,93 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal **Rp 546.450.541.749,65**

Penambahan Aset

a) Belanja Pegawai	Rp	0,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	204.799.272,00	
c) Belanja Modal	Rp	63.674.475.281,36	
d) Koreksi	Rp	390.170.401,32	
e) Reklasifikasi	Rp	57.850.129.318,38	
f) Mutasi antar SKPD	Rp	11.777.994.455,67	
g) Hibah	Rp	5.362.532.092,00	
Jumlah Penambahan Aset	Rp		139.260.100.820,73

Pengurangan Aset

a) Penghapusan	Rp	(14.629.000,00)	
b) Hibah	Rp	(0,00)	
c) Koreksi	Rp	(417.729.687,40)	
d) Reklasifikasi	Rp	(32.047.754.668,38)	
e) Mutasi antar SKPD	Rp	(11.777.994.455,67)	
f) Ekstrakomtabel	Rp	(0,00)	
Jumlah Pengurangan Aset	Rp		(44.258.107.811,45)

Saldo Akhir **Rp 641.452.534.758,93**

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp204.799.272,00 merupakan belanja pada SKPD :

1	<i>Dinas Kesehatan</i>	<i>Rp</i>	<i>50.350.250,00</i>
	- Dinas Kesehatan	Rp	545.000,00
	- Puskesmas Kanigoro	Rp	1.858.500,00
	- Puskesmas Garum	Rp	1.742.400,00
	- Puskesmas Slumbung	Rp	1.494.200,00
	- Puskesmas Nglegok	Rp	38.528.700,00
	- Puskesmas Bacem	Rp	6.181.450,00
2	<i>RSUD</i>	<i>Rp</i>	<i>37.519.422,00</i>



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3	Dinas PU PR	Rp	74.300.000,00
4	Dinas Pertanian Dan Pangan	Rp	4.942.500,00
5	Kecamatan Garum	Rp	3.740.000,00
6	Kecamatan Kanigoro	Rp	14.367.100,00
7	Kecamatan Srengat	Rp	19.580.000,00
Total		Rp	204.799.272,00

1) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp50.350.250,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a	Dinas Kesehatan	Rp	545.000,00	Belanja Peralatan Rumah Tangga	Rp	545.000,00	Alat Dapur
b	Puskesmas Kanigoro	Rp	1.858.500,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	1.858.500,00	Pompa
c	Puskesmas Garum	Rp	1.742.400,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	1.742.400,00	Alat Pendingin
d	Puskesmas Slumbung	Rp	1.494.200,00	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	Rp	203.900,00	Meubelair
					Rp	457.000,00	Alat Pendingin
					Rp	833.300,00	Personal Komputer
e	Puskesmas Nglegok	Rp	38.528.700,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	3.802.200,00	Pompa
					Rp	30.741.100,00	Alat Kantor Lainnya
					Rp	1.320.000,00	Alat Rumah Tangga
					Rp	2.665.400,00	Lainnya (Home Use)
f	Puskesmas Bacem	Rp	6.181.450,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	6.181.450,00	Meubelair
		Rp	50.350.250,00		Rp	50.350.250,00	

2) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp37.519.422,00 merupakan perolehan Kendaraan Bermotor Khusus dari belanja sebagai berikut:

a)	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	155.000,00
b)	Beban Cetak	Rp	212.500,00
c)	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp	900.000,00
d)	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	755.000,00
e)	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	30.521.922,00
f)	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp	4.100.000,00
g)	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	200.000,00
h)	Beban Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	Rp	675.000,00
TOTAL		Rp	37.519.422,00

3) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp74.300.000,00 merupakan perolehan Perkakas Bengkel Khusus dari belanja Penggantian Suku Cadang.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 4) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp4.942.500 merupakan perolehan Alat Pembersih sebesar Rp2.175.000,00 dari belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan serta Perolehan Aset Alat Laboratorium Penunjang dari Belanja Bahan Peralatan sebesar Rp2.767.500,00.
- 5) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Garum sebesar Rp3.740.000,00 merupakan perolehan Peralatan Studio Video dan Film A dari Belanja Peralatan Rumah Tangga.
- 6) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Kanigoro sebesar Rp14.367.100,00 merupakan perolehan Alat Kantor Lainnya dari Belanja Cetak.
- 7) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Srengat sebesar Rp19.580.000,00 merupakan perolehan Alat Kantor Lainnya sebesar Rp4.200.000,00; Meubelair sebesar Rp14.400.000,00 dan Alat Dapur sebesar Rp980.000,00 dari Belanja Persediaan Peralatan Rumah Tangga, serta Perolehan aset Alat Kantor Lainnya dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.
- b. Mutasi tambah sebesar Rp63.674.475.281,36 merupakan Belanja Modal TA 2019.
- c. Koreksi tambah sebesar Rp390.170.401,32 merupakan Koreksi pada SKPD :
- | | | | |
|----|------------------------------|----|----------------|
| 1 | RSUD | Rp | 163.647.681,00 |
| 2 | Satpol PP | Rp | 1.650.000,00 |
| 3 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Rp | 60.215.000,00 |
| 4 | BPKAD | Rp | 28,00 |
| 5 | Kecamatan Selopuro | Rp | 37.376.923,08 |
| 6 | Kecamatan Wlingi | Rp | 16.150.000,00 |
| 7 | Kecamatan Gandusari | Rp | 11.000.000,00 |
| 8 | Kecamatan Doko | Rp | 6.150.000,00 |
| 9 | Kecamatan Garum | Rp | 9.850.000,00 |
| 10 | Kecamatan Kanigoro | Rp | 21.300.000,00 |
| 11 | Kecamatan Sutojayan | Rp | 11.450.000,00 |
| 12 | Kecamatan Kademangan | Rp | 36.303.846,16 |
| 13 | Kecamatan Srengat | Rp | 15.076.923,08 |

Total	Rp	390.170.401,32
--------------	-----------	-----------------------

- 1) Koreksi Tambah pada RSUD sebesar Rp163.647.681,00 merupakan penilaian Aset Kendaraan Bermotor Khusus (Mobil Ambulance No. Reg 030 Tahun 2008) sebesar Rp110.865.000,00 sesuai SK Bupati Blitar Nomor 188/678/409.06/KPTS/2019 tanggal 18 Desember 2019 dan pengakuan Aset Alat Kedokteran Umum dari Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp52.782.681,00.
- 2) Koreksi Tambah pada Satpol PP sebesar Rp1.650.000,00 merupakan Penilaian Aset Non Senjata Api (Gas Air Mata, No. Reg 001 s/d 010 tahun 2003) sebesar Rp1.650.000,00 sesuai SK Bupati Blitar Nomor 188/495/409.06/KPTS/2019 tanggal 20 Agustus 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 3) Koreksi Tambah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp60.215.000,00 merupakan Penilaian Aset sesuai SK Bupati Blitar Nomor 188/495/409.06/KPTS/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp	29.265.000,00
b	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Rp	50.000,00
c	Alat Kalibrasi	Rp	725.000,00
d	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Rp	2.000.000,00
e	Meubelair	Rp	4.000.000,00
f	Komputer Unit / Jaringan	Rp	800.000,00
g	Personal Komputer	Rp	4.200.000,00
h	Peralatan Komputer Mainframe	Rp	2.400.000,00
i	Peralatan Mini Komputer	Rp	4.000.000,00
j	Peralatan Personal komputer	Rp	7.740.000,00
k	Peralatan Studio Visual	Rp	2.845.000,00
l	Alat Komunikasi Telephone	Rp	890.000,00
m	Alat Laboratorium Kimia	Rp	1.300.000,00
Total		Rp	60.215.000,00

- 4) Koreksi Tambah pada BPKAD sebesar Rp28,00 merupakan koreksi kurang catat saldo awal Laptop Lenovo no reg 0028 sd 0036 th 2013 sesuai KIB B pada BPKAD – SKPB.
- 5) Koreksi Tambah pada Kecamatan Selopuro sebesar Rp37.376.923,08 merupakan Koreksi Penilaian Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) yang semula bernilai Rp0,00 yang dobel catat dengan Bapenda sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp0,00 tahun 2019 Nomor 900/002/BA-KOREKSI/2019 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp21.226.923,08 dan Penilaian Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua yang semula bernilai Rp0,00 sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp0,00 Nomor 900/011/BA-KOREKSI/2019 tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp16.150.000,00.
- 6) Koreksi Tambah pada Kecamatan Wlingi sebesar Rp 16.150.000,00 merupakan Penilaian aset yang semula bernilai Rp0,00 Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp0,00 tahun 2019 Nomor 900/013/BA-KOREKSI/2019 tanggal 20 Oktober 2019.
- 7) Koreksi Tambah pada Kecamatan Gandusari sebesar Rp11.000.000,00 merupakan koreksi dobel catat Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) dengan Bagian Perlengkapan Setda sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp0,00 tahun 2019 Nomor 900/008/BA-KOREKSI/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
- 8) Koreksi Tambah pada Kecamatan Doko sebesar Rp6.150.000,00 merupakan Koreksi Aset Kendaraan Beroda Dua (Sepeda Motor) dobel catat dengan Bapenda sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Barang Milik



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Daerah yang Bernilai Rp0,00 tahun 2019 Nomor 900/003/BA-KOREKSI/2019 tanggal 14 Agustus 2019.

- 9) Koreksi Tambah pada Kecamatan Garum sebesar Rp9.850.000,00 merupakan Penilaian Aset yang semula Bernilai pada asset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp0,00 tahun 2019 Nomor 900/009/BA-KOREKSI/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
 - 10) Koreksi Tambah pada Kecamatan Kanigoro sebesar Rp21.300.000,00 merupakan Koreksi double catat Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) dengan Bagian Perlengkapan sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp0,00 tahun 2019 Nomor 900/010/BA-KOREKSI/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
 - 11) Koreksi Tambah pada Kecamatan Sutojayan sebesar Rp11.450.000,00 merupakan Koreksi Penilaian Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) yang semula bernilai Rp0,00 yang dobel catat dengan Bagian Perlengkapan sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp0,00 Tahun 2019 Nomor 900/004/BA-KOREKSI/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
 - 12) Koreksi Tambah pada Kecamatan Kademangan sebesar Rp36.303.846,16 merupakan Koreksi Penilaian Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) yang semula bernilai Rp1,00 yang dobel catat dengan Bapenda sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp1,00 Tahun 2019 Nomor 900/001/BA-KOREKSI/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
 - 13) Koreksi Tambah pada Kecamatan Srengat sebesar Rp15.076.923,08 merupakan Koreksi Penilaian Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) yang semula bernilai Rp1,00 yang dobel catat dengan Bapenda sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp1,00 Tahun 2019 Nomor 900/012/BA-KOREKSI/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
- d. Reklasifikasi tambah sebesar Rp57.850.129.318,38 yaitu pada SKPD:
- | | | | |
|---|------------------------|----|-------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | Rp | 14.579.028.275,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Rp | 22.406.548.616,16 |
| | - Dinas Kesehatan | Rp | 17.140.046.204,16 |
| | - Puskesmas Bakung | Rp | 107.036.800,00 |
| | - Puskesmas Wonotirto | Rp | 63.600.000,00 |
| | - Puskesmas Margomulyo | Rp | 156.475.924,00 |
| | - Puskesmas Wates | Rp | 137.034.100,00 |
| | - Puskesmas Binangun | Rp | 68.182.600,00 |
| | - Puskesmas Sutojayan | Rp | 170.971.500,00 |
| | - Puskesmas Kademangan | Rp | 209.113.820,00 |
| | - Puskesmas Kanigoro | Rp | 167.825.488,00 |
| | - Puskesmas Talun | Rp | 294.118.193,00 |
| | - Puskesmas Selopuro | Rp | 299.114.772,00 |
| | - Puskesmas Kesamben | Rp | 242.928.402,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	- Puskesmas Boro	Rp	193.079.000,00
	- Puskesmas Doko	Rp	181.766.900,00
	- Puskesmas Wlingi	Rp	233.913.950,00
	- Puskesmas Gandusari	Rp	291.936.663,00
	- Puskesmas Garum	Rp	634.952.192,00
	- Puskesmas Slumbung	Rp	21.431.530,00
	- Puskesmas Nglegok	Rp	400.082.400,00
	- Puskesmas Sanankulon	Rp	192.413.606,00
	- Puskesmas Ponggok	Rp	263.777.354,00
	- Puskesmas Bacem	Rp	77.136.296,00
	- Puskesmas Srengat	Rp	439.185.051,00
	- Puskesmas Wonodadi	Rp	168.583.125,00
	- Puskesmas Udanawu	Rp	251.842.746,00
3	RSUD	Rp	6.322.721.767,00
4	Dinas PU Dan Penataan Ruang	Rp	562.711.300,00
5	Dinas Perumahan dan KP	Rp	70.500.000,00
6	Satpol PP	Rp	22.286.000,00
7	Badan Kesbangpol	Rp	9.850.000,00
8	BPBD	Rp	293.180.750,00
9	Dinas Sosial	Rp	59.126.500,00
10	Dinas Nakertrans	Rp	73.071.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, KB	Rp	807.760.000,00
12	Badan Lingkungan Hidup	Rp	1.300.127.050,00
13	Dinas Kependudukan dan Capil	Rp	959.857.070,20
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Rp	152.293.000,00
15	Dinas Perhubungan	Rp	303.356.500,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Rp	440.964.200,00
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp	16.460.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp	19.822.000,00
19	Disparbudpora	Rp	34.814.000,00
20	Dinas Pertanian Dan Pangan	Rp	419.692.300,00
21	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Rp	1.744.167.000,00
22	Disperindag	Rp	150.018.150,02
23	Sekretariat Daerah	Rp	5.007.949.140,00
	- Bagian Perlengkapan	Rp	5.007.949.140,00
24	Sekretariat DPRD	Rp	247.270.000,00
25	Inspektorat	Rp	900.000,00
26	Bappeda	Rp	134.050.000,00
27	BPKAD	Rp	110.280.000,00
28	Badan Pendapatan Daerah	Rp	626.175.000,00
29	BKD	Rp	72.320.000,00
	Rekap Kecamatan	Rp	902.829.700,00
30	Kecamatan Selopuro	Rp	30.800.000,00
31	Kecamatan Wlingi	Rp	27.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

32	Kecamatan Talun	Rp	160.843.200,00
33	Kecamatan Doko	Rp	15.000.000,00
34	Kecamatan Garum	Rp	56.485.000,00
35	Kecamatan Kanigoro	Rp	178.189.800,00
36	Kecamatan Sutojayan	Rp	168.350.100,00
37	Kecamatan Binangun	Rp	16.490.100,00
38	Kecamatan Wates	Rp	16.000.000,00
39	Kecamatan Panggungrejo	Rp	18.000.000,00
40	Kecamatan Wonotirto	Rp	7.850.000,00
41	Kecamatan Bakung	Rp	37.250.000,00
42	Kecamatan Kademangan	Rp	21.200,00
43	Kecamatan Srengat	Rp	56.000.000,00
44	Kecamatan Nglegok	Rp	55.820.300,00
45	Kecamatan Selorejo	Rp	8.500.000,00
46	Kecamatan Kesamben	Rp	49.830.000,00
TOTAL		Rp	57.850.129.318,38

e. Mutasi tambah antar SKPD sebesar Rp11.777.994.455,67 dengan rincian sebagai berikut.

1	Dinas Pendidikan	Rp	22.351.000,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	5.307.952.285,00
	- Puskesmas Bakung	Rp	175.335.095,00
	- Puskesmas Wonotirto	Rp	206.248.513,00
	- Puskesmas Margomulyo	Rp	205.033.364,00
	- Puskesmas Wates	Rp	224.371.574,00
	- Puskesmas Binangun	Rp	174.791.342,00
	- Puskesmas Sutojayan	Rp	291.234.434,00
	- Puskesmas Kademangan	Rp	214.767.921,00
	- Puskesmas Kanigoro	Rp	185.770.068,00
	- Puskesmas Talun	Rp	287.422.761,00
	- Puskesmas Selopuro	Rp	225.586.142,00
	- Puskesmas Kesamben	Rp	305.997.013,00
	- Puskesmas Boro	Rp	142.573.163,00
	- Puskesmas Doko	Rp	219.659.398,00
	- Puskesmas Wlingi	Rp	191.538.644,00
	- Puskesmas Gandusari	Rp	167.976.878,00
	- Puskesmas Garum	Rp	68.959.213,00
	- Puskesmas Slumbung	Rp	94.926.724,00
	- Puskesmas Nglegok	Rp	438.109.642,00
	- Puskesmas Sanankulon	Rp	216.830.781,00
	- Puskesmas Ponggok	Rp	628.093.566,00
	- Puskesmas Bacem	Rp	155.220.318,00
	- Puskesmas Srengat	Rp	139.548.975,00
	- Puskesmas Wonodadi	Rp	171.232.128,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	- Puskesmas Udanawu	Rp	176.724.628,00
3	RSUD	Rp	57.000.000,00
4	Badan Kesbangpol	Rp	205.303.333,34
5	Dinas Sosial	Rp	162.975.000,00
6	Dinas Nakertrans	Rp	170.300.000,00
7	Dinas Perhubungan	Rp	172.300.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	420.650.100,00
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp	74.524.000,00
10	Disparbudpora	Rp	224.493.554,00
11	Disperindag	Rp	179.400.000,00
12	<i>Sekretariat Daerah</i>	<i>Rp</i>	<i>3.176.588.933,33</i>
	- Bagian Pemerintahan	Rp	269.079.333,33
	- Bagian Kesra	Rp	260.846.000,00
	- Bagian Hukum	Rp	260.846.000,00
	- Bagian Perekonomian Dan Pembangunan	Rp	260.846.000,00
	- Bagian Layanan Pengadaan	Rp	290.527.600,00
	- Bagian Organisasi	Rp	260.846.000,00
	- Bagian Umum	Rp	1.274.976.000,00
	- Bagian Humas dan Protokol	Rp	298.622.000,00
13	Inspektorat	Rp	331.010.000,00
14	BPKAD	Rp	829.300.000,00
	<i>Rekap Kecamatan</i>	<i>Rp</i>	<i>443.846.250,00</i>
15	Kecamatan Selopuro	Rp	3.190.750,00
16	Kecamatan Wlingi	Rp	82.352.200,00
17	Kecamatan Talun	Rp	35.725.350,00
18	Kecamatan Gandusari	Rp	5.166.750,00
19	Kecamatan Garum	Rp	38.868.150,00
20	Kecamatan Kanigoro	Rp	53.343.550,00
21	Kecamatan Sutojayan	Rp	31.752.500,00
22	Kecamatan Binangun	Rp	10.127.100,00
23	Kecamatan Wates	Rp	3.987.500,00
24	Kecamatan Kademangan	Rp	31.752.500,00
25	Kecamatan Srengat	Rp	33.476.400,00
26	Kecamatan Wonodadi	Rp	3.316.800,00
27	Kecamatan Udanawu	Rp	31.752.500,00
28	Kecamatan Nglegok	Rp	31.752.500,00
29	Kecamatan Selorejo	Rp	47.281.700,00
	TOTAL	Rp	11.777.994.455,67

f. Hibah tambah sebesar Rp5.362.532.092,00 pada SKPD yaitu,

1	Dinas Pendidikan	Rp	3.022.657.880,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	86.194.920,00
3	BPBD	Rp	1.626.303.792,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4	Dinas Sosial	Rp	27.688.000,00
5	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Rp	118.300.000,00
6	Disperindag	Rp	72.187.500,00
7	Kecamatan Wlingi	Rp	136.400.000,00
8	Kecamatan Sutojayan	Rp	136.400.000,00
9	Kecamatan Kademangan	Rp	136.400.000,00
TOTAL		Rp	5.362.532.092,00

- 1) Hibah tambah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.022.657.880,00 merupakan Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

a	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Rp	5.200.000,00
b	Alat Kantor Lainnya	Rp	650.000,00
c	Meubelair	Rp	26.160.000,00
d	Alat Pembersih	Rp	700.000,00
e	Personal Komputer	Rp	2.172.672.000,00
f	Peralatan Personal Komputer	Rp	56.650.000,00
g	Peralatan Jaringan	Rp	333.915.880,00
h	Meja Kerja Pejabat	Rp	2.400.000,00
i	Kursi Kerja Pejabat	Rp	600.000,00
j	Peralatan Studio Visual	Rp	422.610.000,00
k	Alat Kedokteran Umum	Rp	810.000,00
l	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Rp	290.000,00

TOTAL	Rp	3.022.657.880,00
--------------	-----------	-------------------------

- 2) Hibah tambah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp86.194.920,00 merupakan Hibah Alat Kedokteran Umum dari Kementrian Kesehatan RI sesuai BAST Nomor KN.01.01/2/4044/2019 tanggal 24 Juli 2019.

- 3) Hibah tambah pada BPBD sebesar Rp1.626.303.792,00 merupakan hibah dari BNPB sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor BA.441/BNPB/08/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang diakui pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a	Mesin Proses	Rp	47.900.000,00
b	Electric Generating Set	Rp	15.950.000,00
c	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp	622.690.000,00
d	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp	289.000.000,00
e	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp	106.921.592,00
f	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	Rp	35.917.200,00
g	Meubelair	Rp	419.210.000,00
h	Alat Komunikasi Telephone	Rp	3.828.000,00
i	Alat Komunikasi Radio SSB	Rp	22.863.500,00
j	Alat Komunikasi Radio VHF	Rp	6.473.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

k	Alat Keamanan	Rp	55.550.000,00
TOTAL		Rp	1.626.303.792,00
4)	Hibah tambah pada Dinas Sosial sebesar Rp27.688.000,00 merupakan hibah Aset Personal Komputer (PC Tablet dan PC Unit) dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI sesuai Berita Acara Serah Terima Alat Pengolah Data Nomor 460/2007.1/409.102.2/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dan Berita Acara Serah Terima Alat Pengolah Data Nomor 460/2009.1/409.102.2/2019 tanggal 7 Oktober 2019.		
5)	Hibah tambah pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp118.300.000,00 merupakan Hibah Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Station Wagon) dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 934/P2HP.2/PL.420/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.		
6)	Hibah tambah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp72.187.500,00 merupakan Hibah Timbangan Elektronik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 020/2527/203.5/2019 dan Nomor 020/240/409.111.1/2019 tanggal 21 Maret 2019.		
7)	Hibah tambah pada Kecamatan Wlingi sebesar Rp136.400.000,00 merupakan Hadiah Lomba Desa dan Kelurahan untuk Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi sesuai dengan BAST Nomor 028/19/BAST/H/409.119/2017 tanggal 5 Oktober 2017.		
8)	Hibah tambah pada Kecamatan Sutojayan sebesar Rp136.400.000,00 merupakan Hadiah Lomba Desa dan Kelurahan untuk Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sutojayan sesuai dengan BAST Nomor 028/12/BAST/H/409.119/2017 tanggal 5 Oktober 2017.		
9)	Hibah tambah pada Kecamatan Kademangan sebesar Rp136.400.000,00 merupakan Hadiah Lomba Desa dan Kelurahan untuk Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan sesuai dengan BAST Nomor 028/41/BAST/H/409.119/2017 tanggal 5 Oktober 2017.		
g.	Penghapusan sebesar Rp14.629.000,00 merupakan penghapusan Aset Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Doko sesuai dengan SK Bupati Blitar Nomor 188/211/409.06/KPTS/2019 tanggal 2 April 2019 dengan rincian sebagai berikut:		
1	Alat Kantor Mesin Ketik	Rp	1.260.000,00
2	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Rp	720.000,00
3	Alat Kantor Lainnya	Rp	720.000,00
4	Meubelair	Rp	8.091.000,00
5	Alat Pengukur Waktu	Rp	90.000,00
6	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp	968.000,00
7	Peralatan Jaringan	Rp	500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

8	Alat Komunikasi Telephone	Rp	2.280.000,00
TOTAL		Rp	14.629.000,00

h. Koreksi kurang sebesar Rp417.729.687,40 pada SKPD yaitu,

1	Dinas Pendidikan	Rp	210.725.495,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	47.726.500,00
3	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Rp	8.902.000,00
4	Disperindag	Rp	900.000,00
5	Sekretariat Daerah	Rp	46.418.000,00
	- Bagian Perlengkapan	Rp	46.418.000,00
6	BPKAD	Rp	9.100.000,08
7	Badan Pendapatan Daerah	Rp	78.757.692,32
8	Kecamatan Sutojayan	Rp	15.200.000,00
TOTAL		Rp	417.729.687,40

1) Koreksi kurang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp210.725.495,00 merupakan Perolehan Aset dari Belanja Modal yang dikoreksi ke Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Alat Peraga/ Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/ Ketrampilan Lain- lain	Rp	210.725.495,00	Beban Alat Tulis Kantor	Rp	15.222.000,00
			Beban Alat Kesehatan/Alat Lab Habis Pakai	Rp	103.728.495,00
			Beban Bahan Persediaan Peralatan	Rp	91.775.000,00

2) Koreksi kurang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp47.726.500,00 merupakan Perolehan Aset dari Belanja Modal yang dikoreksi ke Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

a. Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Rp	3.600.000,00	Beban Alat Kesehatan/Alat Lab Habis Pakai	Rp	3.600.000,00
b. Alat Laboratorium Umum	Rp	44.126.500,00	Beban Cetak	Rp	14.520.000,00
			Beban Alat Kesehatan Habis Pakai	Rp	29.606.500,00

3) Koreksi kurang pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar 8.902.000,00 merupakan Perolehan Aset dari Belanja Modal yang dikoreksi ke Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

a. Alat - Alat Peternakan	Rp	6.710.000,00	Beban Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	2.035.000,00
			Beban Persediaan Pakaian Kerja Lapangan	Rp	4.675.000,00
b. Alat Laboratorium Lainnya	Rp	2.192.000,00	Beban Alat Kesehatan/Alat Lab Habis Pakai	Rp	2.192.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 4) Koreksi kurang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp900.000,00 merupakan Perolehan Aset (Meubelair) yang dikoreksi ke Beban Peralatan Rumah Tangga.
- 5) Koreksi kurang pada Bagian Perlengkapan sebesar Rp46.418.000,00 merupakan Perolehan Aset dari Belanja Modal yang dikoreksi ke Beban Barang dan Jasa serta koreksi dobel catat aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | | | | |
|---|---|----|---------------|---|----|---------------|
| a | Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Rp | 33.900.000,00 | Koreksi dobel catat (penilaian aset Sepeda Motor) pada Kec. Gandusari | Rp | 11.000.000,00 |
| | | | | Koreksi dobel catat (penilaian aset Sepeda Motor) pada Kec. Kanigoro | Rp | 11.450.000,00 |
| | | | | Koreksi dobel catat (penilaian aset Sepeda Motor) pada Kec. Sutojayan | Rp | 11.450.000,00 |
| b | Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) | Rp | 12.518.000,00 | Beban Peralatan Rumah Tangga | Rp | 12.518.000,00 |
- 6) Koreksi kurang pada BPKAD sebesar Rp9.100.000,08 merupakan Koreksi Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) ke Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronika sebesar Rp9.100.000,00 pada BPKAD-SKPD dan Koreksi Lebih Catat Saldo Awal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Sedan No. Reg 1 Th 2010 AG 308 LP) sebesar Rp0,08 sesuai KIB B pada BPKAD-SKPB.
- 7) Koreksi kurang pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp78.757.692,32 merupakan koreksi dobel catat aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) dengan Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--------------|----------------------|----|-------------------------|
| a | Kecamatan Selopuro | Rp | 21.226.923,08 |
| b | Kecamatan Doko | Rp | 6.150.000,00 |
| c | Kecamatan Kademangan | Rp | 36.303.846,16 |
| d | Kecamatan Srengat | Rp | 15.076.923,08 |
| TOTAL | | | Rp 78.757.692,32 |
- 8) Koreksi kurang pada Kecamatan Sutojayan sebesar Rp15.200.000,00 merupakan Perolehan Aset Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) ke Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Ganti Pintu).
- i. Reklasifikasi kurang sebesar Rp32.047.754.668,38 pada SKPD:
- | | | | |
|---|-----------------------------|----|------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | Rp | 6.658.649.880,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Rp | 2.035.908.055,16 |
| 3 | RSUD | Rp | 9.017.472.623,00 |
| 4 | Dinas PU Dan Penataan Ruang | Rp | 562.711.300,00 |
| 5 | Dinas Perumahan dan KP | Rp | 70.500.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6	Satpol PP	Rp	22.286.000,00
7	Badan Kesbangpol	Rp	9.850.000,00
8	BPBD	Rp	437.680.750,00
9	Dinas Sosial	Rp	43.132.500,00
10	Dinas Nakertrans	Rp	73.071.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, KB	Rp	807.760.000,00
12	Badan Lingkungan Hidup	Rp	1.060.514.050,00
13	Dinas Kependudukan dan Capil	Rp	959.857.070,20
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Rp	152.293.000,00
15	Dinas Perhubungan	Rp	303.356.500,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Rp	440.964.200,00
17	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp	46.387.500,00
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp	16.460.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp	19.822.000,00
20	Disparbudpora	Rp	34.814.000,00
21	Dinas Pertanian Dan Pangan	Rp	419.692.300,00
22	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Rp	1.770.445.250,00
23	Disperindag	Rp	163.118.150,02
24	<i>Sekretariat Daerah</i>	<i>Rp</i>	<i>5.007.949.140,00</i>
	- Bagian Perlengkapan	Rp	5.007.949.140,00
25	Sekretariat DPRD	Rp	18.000.000,00
26	Inspektorat	Rp	900.000,00
27	Bappeda	Rp	134.050.000,00
28	BPKAD	Rp	110.280.000,00
29	Badan Pendapatan Daerah	Rp	618.805.000,00
30	BKPSDM	Rp	99.752.000,00
	<i>Rekap Kecamatan</i>	<i>Rp</i>	<i>931.272.400,00</i>
31	Kecamatan Selopuro	Rp	30.800.000,00
32	Kecamatan Wlingi	Rp	27.400.000,00
33	Kecamatan Talun	Rp	103.690.300,00
34	Kecamatan Doko	Rp	25.290.000,00
35	Kecamatan Garum	Rp	56.485.000,00
36	Kecamatan Kanigoro	Rp	188.039.800,00
37	Kecamatan Sutojayan	Rp	165.650.100,00
38	Kecamatan Binangun	Rp	25.400.100,00
39	Kecamatan Wates	Rp	16.000.000,00
40	Kecamatan Panggungrejo	Rp	18.000.000,00
41	Kecamatan Wonotirto	Rp	7.850.000,00
42	Kecamatan Bakung	Rp	37.250.000,00
43	Kecamatan Kademangan	Rp	21.200,00
44	Kecamatan Srengat	Rp	56.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

45	Kecamatan Ponggok	Rp	59.245.600,00
46	Kecamatan Nglegok	Rp	55.820.300,00
47	Kecamatan Selorejo	Rp	8.500.000,00
48	Kecamatan Kesamben	Rp	49.830.000,00
TOTAL		Rp	32.047.754.668,38

j. Mutasi kurang antar SKPD sebesar Rp11.777.994.455,67 merupakan mutasi keluar peralatan dan mesin dari SKPD dibawah ini:

1	Dinas Kesehatan	Rp	5.307.952.285,00
2	Dinas Pengendalian Penduduk, KB	Rp	349.600.000,00
3	Badan Lingkungan Hidup	Rp	451.947.250,00
4	Disperindag	Rp	74.524.000,00
5	Sekretariat Daerah	Rp	4.619.600.820,67
	- Bagian Kesra	Rp	170.300.000,00
	- Bagian Hukum	Rp	170.300.000,00
	- Bagian Organisasi	Rp	172.300.000,00
	- Bagian Perlengkapan	Rp	4.106.700.820,67
6	Sekretariat DPRD	Rp	724.020.000,00
7	BPKAD	Rp	250.350.100,00
TOTAL		Rp	11.777.994.455,67

Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada **Lampiran 32: Rekap mutasi penambahan dan pengurangan per SKPD Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2018** serta **Lampiran 33: Rincian Obyek Rekening Tahun 2019**.

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp641.452.534.758,93 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 61 Rincian Aset Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD
Per 31 Desember 2019 dan 2018**

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/ (Turun) (%)
1	Dinas Pendidikan	112.062.494.181,88	92.749.317.926,88	20,82
2	Dinas Kesehatan	124.490.360.885,16	94.404.203.149,00	31,87
	- Dinas Kesehatan	92.544.028.813,16	73.082.131.024,00	26,63
	- Puskesmas Bakung	812.294.521,68	529.922.626,68	53,29
	- Puskesmas Wonotirto	994.347.251,20	724.498.738,20	37,25
	- Puskesmas Margomulyo	1.058.797.814,60	697.288.526,60	51,85
	- Puskesmas Wates	744.927.530,36	383.521.856,36	94,23
	- Puskesmas Binangun	890.862.733,00	647.888.791,00	37,50
	- Puskesmas Sutojayan	1.440.787.945,00	978.582.011,00	47,23
	- Puskesmas Kademangan	1.385.834.078,00	961.952.337,00	44,06
	- Puskesmas Kanigoro	1.308.115.822,00	952.661.766,00	37,31
	- Puskesmas Talun	1.636.989.650,48	1.055.448.696,48	55,10



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/ (Turun) (%)
	- Puskesmas Selopuro	1.888.306.938,00	1.363.606.024,00	38,48
	- Puskesmas Kesamben	1.417.052.846,28	868.127.431,28	63,23
	- Puskesmas Boro	1.408.023.591,00	1.072.371.428,00	31,30
	- Puskesmas Doko	1.761.534.072,12	1.360.107.774,12	29,51
	- Puskesmas Wlingi	1.227.214.621,00	801.762.027,00	53,06
	- Puskesmas Gandusari	2.106.381.128,13	1.646.467.587,13	27,93
	- Puskesmas Garum	1.840.872.187,52	1.135.218.382,52	62,16
	- Puskesmas Slumbung	478.840.249,92	360.987.795,92	32,65
	- Puskesmas Nglegok	1.719.466.096,00	842.745.354,00	104,03
	- Puskesmas Sanankulon	1.357.270.318,60	948.025.931,60	43,17
	- Puskesmas Ponggok	1.562.305.003,50	670.434.083,50	133,03
	- Puskesmas Bacem	925.922.214,04	687.384.150,04	34,70
	- Puskesmas Srengat	1.731.954.262,20	1.153.220.236,20	50,18
	- Puskesmas Wonodadi	1.232.049.110,37	892.233.857,37	38,09
	- Puskesmas Udanawu	1.016.182.087,00	587.614.713,00	72,93
3	RSUD	112.253.675.956,67	100.052.222.016,67	12,20
4	Dinas PU Dan Penataan Ruang	21.809.747.283,68	19.250.728.663,68	13,29
5	Dinas Perumahan dan KP	6.383.998.225,00	6.240.298.225,00	2,30
6	Satpol PP	6.860.226.797,80	6.851.140.797,80	0,13
7	Badan Kesbangpol	2.079.087.547,34	1.863.934.214,00	11,54
8	BPBD	6.438.184.367,00	4.685.065.575,00	37,42
9	Dinas Sosial	3.074.058.792,00	2.227.144.100,00	38,03
10	Dinas Nakertrans	2.912.887.883,00	2.562.517.353,00	13,67
11	Dinas Pengendalian Penduduk, KB	12.398.862.421,60	11.241.932.421,60	10,29
12	Dinas Lingkungan Hidup	17.110.021.806,00	15.494.525.206,00	10,43
13	Dinas Kependudukan dan Capil	11.156.907.964,98	8.054.968.909,78	38,51
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	2.816.925.600,00	2.639.702.600,00	6,71
15	Dinas Perhubungan	16.569.650.190,00	15.595.001.450,00	6,25
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.685.778.061,30	4.514.329.065,30	48,10
17	Dinas Koperasi dan UMKM	1.570.511.660,00	1.591.374.660,00	1,31)
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.873.449.328,30	3.484.404.328,30	11,17
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.247.755.924,06	2.613.131.824,06	24,29
20	Disparbudpora	4.041.061.244,00	3.489.209.690,00	15,82
21	Dinas Pertanian Dan Pangan	9.868.586.485,24	9.283.165.385,24	6,31
22	Dinas Peternakan Dan Perikanan	10.105.094.419,00	7.693.647.994,00	31,34
23	Disperindag	6.928.660.603,15	5.370.967.753,15	29,00
24	<i>Sekretariat Daerah</i>			
	- Bagian Pemerintahan	639.988.813,33	370.909.480,00	72,55
	- Bagian Kesra	547.605.324,59	457.059.324,59	19,81
	- Bagian Hukum	627.091.370,00	536.545.370,00	16,88



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/ (Turun) (%)
	- Bagian Perekonomian Dan Pembangunan	614.362.993,00	288.028.793,00	113,30
	- Bagian Layanan Pengadaan	2.005.342.615,00	1.714.815.015,00	16,94
	- Bagian Organisasi	738.126.672,00	649.580.672,00	13,63
	- Bagian Umum	19.879.796.539,74	18.604.820.539,74	6,85
	- Bagian Perlengkapan	25.794.049.175,80	23.754.363.086,47	8,59
	- Bagian Humas dan Protokol	1.944.836.125,00	1.646.214.125,00	18,14
25	Sekretariat DPRD	19.708.987.889,70	19.503.423.699,70	1,05
26	Inspektorat	3.616.699.708,00	3.163.957.208,00	14,31
27	Bappeda	3.890.978.093,99	3.436.978.093,99	13,21
28	BPKAD	12.735.179.184,99	11.231.806.657,07	13,38
29	Dinas Pendapatan Daerah	7.878.470.552,71	7.177.438.245,03	9,77
30	BKPSDM	5.411.337.615,00	5.108.420.615,00	5,93
34	Kecamatan Selopuro	843.148.048,08	734.980.375,00	14,72
35	Kecamatan Wlingi	3.623.694.023,10	3.094.332.823,10	17,11
36	Kecamatan Talun	2.414.565.152,50	1.912.236.002,50	26,27
37	Kecamatan Gandusari	895.901.600,00	847.604.850,00	5,70
38	Kecamatan Doko	862.816.500,00	809.715.500,00	6,56
39	Kecamatan Garum	2.442.331.940,50	2.305.426.790,50	5,94
40	Kecamatan Kanigoro	1.575.179.045,00	1.145.395.595,00	37,52
41	Kecamatan Sutojayan	3.447.261.752,50	2.868.649.252,50	20,17
42	Kecamatan Binangun	783.016.950,00	713.832.500,00	9,69
43	Kecamatan Wates	807.770.000,00	735.787.500,00	9,78
44	Kecamatan Panggungrejo	735.082.250,00	672.232.250,00	9,35
45	Kecamatan Wonotirto	851.870.500,00	827.320.500,00	2,97
46	Kecamatan Bakung	799.768.577,50	751.518.577,50	6,42
47	Kecamatan Kademangan	1.379.635.641,66	1.137.179.295,50	21,32
48	Kecamatan Sanankulon	775.014.491,00	726.314.491,00	6,71
49	Kecamatan Srengat	2.983.693.880,58	2.522.128.557,50	18,30
50	Kecamatan Wonodadi	834.405.650,00	796.588.850,00	4,75
51	Kecamatan Udanawu	847.543.125,00	771.440.625,00	9,86
52	Kecamatan Ponggok	766.429.750,00	744.927.100,00	2,89
53	Kecamatan Nglegok	1.248.903.887,50	1.103.714.087,50	13,15
54	Kecamatan Selorejo	787.649.299,00	705.739.599,00	11,61
55	Kecamatan Kesamben	976.012.395,00	926.182.395,00	5,38
	TOTAL	641.452.534.758,93	546.450.541.749,65	16,83



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>
3. Gedung dan Bangunan	1.279.973.459.659,58	1.075.164.775.861,39

Saldo Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.279.973.459.659,58 dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Awal **Rp 1.075.164.775.861,39**

Penambahan Aset

a) Belanja Pegawai	Rp	0,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.724.009.022,00
c) Belanja Modal	Rp	207.849.221.679,34
d) Koreksi	Rp	113.496.380,00
e) Reklasifikasi	Rp	86.178.087.910,97
f) Mutasi	Rp	4.209.078.036,05
g) Hibah	Rp	1.186.652.550,00
Jumlah Penambahan Aset	Rp	301.260.545.578,36

Pengurangan Aset

a) Penghapusan	Rp	(212.142.600,00)
b) Hibah	Rp	(0,00)
c) Koreksi	Rp	(1.785.454.832,07)
d) Reklasifikasi	Rp	(90.245.186.312,05)
e) Mutasi	Rp	(4.209.078.036,05)
f) Ekstrakomtabel	Rp	(0,00)
Jumlah Pengurangan Aset	Rp	(96.451.861.780,17)

Saldo Akhir **Rp 1.279.973.459.659,58**

Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Perolehan Aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.724.009.022,00 yaitu pada SKPD berikut.

1 Dinas Kesehatan	Rp	402.823.472,00
- Puskesmas Kademangan	Rp	24.012.450,00
- Puskesmas Selopuro	Rp	16.164.244,00
- Puskesmas Kesamben	Rp	2.500.000,00
- Puskesmas Wlingi	Rp	10.224.500,00
- Puskesmas Gandusari	Rp	67.594.878,00
- Puskesmas Garum	Rp	5.651.600,00
- Puskesmas Nglegok	Rp	147.443.700,00
- Puskesmas Sanankulon	Rp	33.902.700,00
- Puskesmas Ponggok	Rp	10.018.600,00
- Puskesmas Bacem	Rp	3.944.500,00
- Puskesmas Srengat	Rp	38.953.900,00
- Puskesmas Udanawu	Rp	42.412.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2	Disparbudpora	Rp	192.227.000,00
3	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp	689.247.800,00
4	Disperindag	Rp	57.000.000,00
5	Kecamatan Garum	Rp	49.200.000,00
6	Kecamatan Kanigoro	Rp	333.510.750,00
TOTAL		Rp	1.724.009.022,00

1) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp402.823.472,00 dengan rincian sebagai berikut.

- Puskesmas Kademangan	Rp	24.012.450,00	Bangunan Gedung Garasi/Pool	Rp	24.012.450,00	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Puskesmas Selopuro	Rp	16.164.244,00	Bangunan Gedung Garasi/Pool	Rp	16.164.244,00	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Puskesmas Kesamben	Rp	2.500.000,00	Bangunan Gedung Garasi/Pool	Rp	2.500.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
- Puskesmas Wlingi	Rp	10.224.500,00	Bangunan Kesehatan	Rp	10.224.500,00	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Puskesmas Gandusari	Rp	67.594.878,00	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rp	61.677.435,00	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
			Bangunan Gedung Garasi/Pool	Rp	5.917.443,00	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Puskesmas Garum	Rp	5.651.600,00	Bangunan Kesehatan	Rp	5.651.600,00	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Puskesmas Nglegok	Rp	147.443.700,00	Bangunan Gedung Garasi/Pool	Rp	124.796.700,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
			Tugu/Tanda Batas	Rp	22.647.000,00	
- Puskesmas Sanankulon	Rp	33.902.700,00	Bangunan Gedung Garasi/Pool	Rp	11.204.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
			Tugu/Tanda Batas	Rp	22.698.700,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Puskesmas Ponggok	Rp	10.018.600,00	Bangunan Kesehatan	Rp	10.018.600,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Puskesmas Bacem	Rp	3.944.500,00	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rp	3.944.500,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Puskesmas Srengat	Rp	38.953.900,00	Bangunan Gedung Garasi/Pool	Rp	38.953.900,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Puskesmas Udanawu	Rp	42.412.400,00	Bangunan Gedung Instalasi	Rp	34.931.700,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
			Bangunan Kesehatan	Rp	7.480.700,00	
		402.823.472,00			402.823.472,00	

2) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp192.227.000,00 merupakan Perolehan Aset Bangunan Gedung Tempat Olah Raga (Rehab Stadion Nglegok) dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 3) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp689.247.800,00 merupakan Perolehan Aset Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp407.443.800,00 dan Tugu/Tanda Batas sebesar Rp281.804.000,00 dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
- 4) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp57.000.000,00 merupakan Perolehan Aset Tugu/Tanda Batas dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
- 5) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Garum sebesar Rp49.200.000,00 merupakan Perolehan Aset Gedung Kantor dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
- 6) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Kanigoro sebesar Rp333.510.750,00 merupakan Perolehan Aset Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp9.971.500,00 dan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga sebesar Rp323.539.250,00 dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
- b. Mutasi tambah sebesar Rp207.849.221.679,34 merupakan Belanja Modal TA 2019.
- c. Koreksi tambah sebesar Rp113.496.380,00 yaitu pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

1	Dinas PU dan Penataan Ruang	Rp	82.975.000,00
2	BPKAD-SKPD	Rp	30.521.380,00
TOTAL		Rp	113.496.380,00

- 1) Koreksi Tambah pada Dinas PUPR sebesar Rp82.975.000,00 merupakan pengakuan Aset Bangunan Gedung Kantor dari Utang Pengadaan Aset Tetap (Jasa Konsultansi Perencanaan yang belum dibayar).
 - 2) Koreksi tambah pada BPKAD-SKPD sebesar Rp30.521.380,00 merupakan Penilaian Aset Gedung Korpri sesuai dengan SK Nomor 188/678/409.06/KPTS/2019 tanggal 18 Desember 2019.
 - d. Reklasifikasi tambah sebesar Rp86.178.087.910,97 pada SKPD berikut ini:
- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | Rp | 7.783.694.034,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Rp | 58.432.399.764,42 |
| | - Dinas Kesehatan | Rp | 58.109.631.309,42 |
| | - Puskesmas Bakung | Rp | 35.381.742,00 |
| | - Puskesmas Binangun | Rp | 123.986.713,00 |
| | - Puskesmas Kesamben | Rp | 37.800.000,00 |
| | - Puskesmas Sanankulon | Rp | 125.600.000,00 |
| 3 | RSUD | Rp | 6.678.906.669,00 |
| 4 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Rp | 3.251.158.146,00 |
| 5 | Dinas Sosial | Rp | 160.289.500,00 |
| 6 | Badan Lingkungan Hidup | Rp | 85.322.330,00 |
| 7 | Dinas Perhubungan | Rp | 3.123.060,00 |
| 8 | Disparbudpora | Rp | 2.322.032.515,51 |
| 9 | Dinas Peternakan dan Perikanan | Rp | 275.709.000,00 |
| 10 | Disperindag | Rp | 5.363.777.157,04 |
| 11 | Sekretariat DPRD | Rp | 277.264.500,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

12	Badan Pendapatan Daerah	Rp	174.958.300,00
	<i>Rekap Kecamatan</i>	<i>Rp</i>	<i>1.369.452.935,00</i>
13	Kecamatan Wlingi	Rp	363.275.000,00
14	Kecamatan Talun	Rp	219.348.270,00
15	Kecamatan Gandusari	Rp	33.644.000,00
16	Kecamatan Garum	Rp	152.000.000,00
17	Kecamatan Kanigoro	Rp	174.533.600,00
18	Kecamatan Sutojayan	Rp	185.052.100,00
19	Kecamatan Srengat	Rp	42.945.750,00
20	Kecamatan Nglegok	Rp	198.654.215,00
TOTAL		Rp	86.178.087.910,97
e. Mutasi Tambah Antar SKPD sebesar Rp4.209.078.036,05 merupakan mutasi pada SKPD sebagai berikut:			
1	Dinas Kesehatan	Rp	2.165.899.986,00
	- Puskesmas Bakung	Rp	337.729.240,00
	- Puskesmas Selopuro	Rp	346.552.892,00
	- Puskesmas Doko	Rp	141.471.202,00
	- Puskesmas Nglegok	Rp	789.207.193,00
	- Puskesmas Bacem	Rp	194.410.447,00
	- Puskesmas Srengat	Rp	356.529.012,00
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp	1.761.532.000,00
3	Disparbudpora	Rp	281.646.050,05
TOTAL		Rp	4.209.078.036,05
f. Hibah sebesar Rp1.186.652.550,00 merupakan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:			
1	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rp	966.652.550,00
2	Tugu Tanda Batas	Rp	220.000.000,00
TOTAL		Rp	1.186.652.550,00
g. Penghapusan sebesar Rp212.142.600,00 merupakan penghapusan Aset Gedung dan Bangunan pada SKPD berikut:			
1	RSUD	Rp	107.559.000,00
2	Kecamatan Binangun	Rp	85.272.000,00
3	Kecamatan Nglegok	Rp	19.311.600,00
TOTAL		Rp	212.142.600,00
1) Penghapusan pada RSUD Wlingi sebesar Rp107.559.000,00 merupakan Penghapusan Aset Bangunan Kesehatan sesuai dengan SK Bupati Blitar Nomor 188/443/409.06/KPTS/2019 tanggal 29 Juli 2019.			
2) Penghapusan pada Kecamatan Binangun sebesar Rp85.272.000,00 merupakan Penghapusan Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor sesuai SK Bupati Nomor 188/641/409.06/KPTS/2019 tanggal 1 November 2019.			



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 3) Penghapusan pada Kecamatan Nglegok sebesar Rp19.311.600,00 merupakan penghapusan Rumah Negara Golongan I sesuai SK Nomor 188/641/409.06/KPTS/2019 tanggal 1 November 2019.
- h. Koreksi kurang sebesar Rp1.785.454.832,07 terdiri dari:
- | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | Rp | 8.394.000,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Rp | 1.303.367.879,45 |
| 3 | RSUD Wlingi | Rp | 9.557.676,53 |
| 4 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Rp | 99.300.000,00 |
| 5 | Disparbudpora | Rp | 139.461.784,45 |
| 6 | Dinas Peternakan dan Perikanan | Rp | 64.810.000,00 |
| 7 | Disperindag | Rp | 144.063.491,64 |
| 8 | Kecamatan Srengat | Rp | 16.500.000,00 |
| TOTAL | | Rp | 1.785.454.832,07 |
- 1) Koreksi kurang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.394.000,00 merupakan koreksi Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan (SDN Sumberjo 1 Sanankulon).
- 2) Koreksi kurang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.303.367.879,45 merupakan koreksi kekurangan volume pekerjaan pada Aset Tetap Bangunan Kesehatan.
- 3) Koreksi kurang pada RSUD Wlingi sebesar Rp9.557.676,53 merupakan koreksi kekurangan volume pekerjaan pada Aset Tetap Asrama.
- 4) Koreksi kurang pada Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp99.300.000,00 merupakan koreksi Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor ke Beban Jasa Konsultan Perencanaan (Reviuw Kawasan Kantor Kanigoro).
- 5) Koreksi kurang pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp139.461.784,45 merupakan koreksi Aset Bangunan Gedung Tempat Olah Raga ke Beban Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp98.774.000,00 dan koreksi kekurangan volume pekerjaan pada Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor Rp29.147.933,09 dan Bangunan Gedung Pertokoan/Pasar sebesar Rp11.539.851,36.
- 6) Koreksi kurang pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp64.810.000,00 merupakan Koreksi Aset Bangunan Gedung Pemotongan Hewan ke Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
- 7) Koreksi kurang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp144.063.491,64 terdiri dari:
- a) Koreksi Aset Bangunan gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar ke beban barang jasa sebesar Rp116.478.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|---|--|----|---------------|
| 1 | Beban Sewa Meja Kursi | Rp | 2.500.000,00 |
| 2 | Beban Sewa Tenda | Rp | 17.500.000,00 |
| 3 | Beban Sewa Soundsystem | Rp | 2.500.000,00 |
| 4 | Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Rp | 10.198.600,00 |
| 5 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | Rp | 18.500.000,00 |
| 6 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Rp | 24.800.000,00 |
| 7 | Beban Jasa Konsultansi Penelitian | Rp | 24.530.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

8	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp	15.950.000,00
---	---	----	---------------

TOTAL	Rp	116.478.600,00
--------------	-----------	-----------------------

b) Koreksi kekurangan volume pekerjaan pada Aset Tetap Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp27.584.891,64.

8) Koreksi kurang pada Kecamatan Srengat sebesar Rp16.500.000,00 merupakan koreksi Aset Bangunan Gedung Kantor ke Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

i. Reklasifikasi kurang sebesar Rp90.245.186.312,05 terdiri dari,

1	Dinas Pendidikan	Rp	8.600.660.300,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	53.202.880.918,24
3	Dinas PU dan Penataan Ruang	Rp	15.929.949.600,00
4	Dinas Sosial	Rp	160.289.500,00
5	Badan Lingkungan Hidup	Rp	1.773.737.637,30
6	Dinas Perhubungan	Rp	3.123.060,00
7	Disparbudpora	Rp	3.566.993.031,51
8	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp	302.709.000,00
9	Disperindag	Rp	4.763.512.000,00
10	Sekretariat DPRD	Rp	506.534.500,00
11	Badan Pendapatan Daerah	Rp	174.958.300,00
12	Kecamatan Wlingi	Rp	273.275.000,00
13	Kecamatan Talun	Rp	218.641.300,00
14	Kecamatan Gandusari	Rp	33.644.000,00
15	Kecamatan Garum	Rp	78.000.000,00
16	Kecamatan Kanigoro	Rp	244.026.100,00
17	Kecamatan Sutojayan	Rp	185.652.100,00
18	Kecamatan Srengat	Rp	27.945.750,00
19	Kecamatan Nglegok	Rp	198.654.215,00

TOTAL	Rp	90.245.186.312,05
--------------	-----------	--------------------------

j. Mutasi kurang sebesar Rp4.209.078.036,05 merupakan mutasi antar SKPD dengan rincian sebagai berikut:

1	Dinas Kesehatan	Rp	2.165.899.986,00
2	Disperindag	Rp	1.761.532.000,00
3	BPKAD	Rp	281.646.050,05

TOTAL	Rp	4.209.078.036,05
--------------	-----------	-------------------------

Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir dijelaskan pada **Lampiran 34**: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Tahun 2019 serta **Lampiran 35**: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per Rincian Obyek Rekening Tahun 2019.

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.279.973.459.659,58 masing-masing SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 62 Rincian Aset Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/ (Turun) (%)
1	Dinas Pendidikan	499.465.227.095,35	473.091.403.140,35	5,57
2	<i>Dinas Kesehatan</i>	<i>232.977.212.121,66</i>	<i>90.964.792.247,36</i>	<i>156,12</i>
	- Dinas Kesehatan	209.547.569.103,30	70.426.641.142,00	197,54
	- Puskesmas Bakung	965.024.882,00	591.913.900,00	63,03
	- Puskesmas Wonotirto	1.019.055.950,00	1.019.055.950,00	-
	- Puskesmas Margomulyo	1.082.235.548,00	1.082.235.548,00	-
	- Puskesmas Wates	576.311.350,00	576.311.350,00	-
	- Puskesmas Binangun	977.353.167,00	853.366.454,00	14,53
	- Puskesmas Sutojayan	228.193.475,00	228.193.475,00	-
	- Puskesmas Kademangan	1.700.441.257,00	1.676.428.807,00	1,43
	- Puskesmas Kanigoro	236.930.000,00	236.930.000,00	-
	- Puskesmas Talun	844.246.032,36	844.246.032,36	-
	- Puskesmas Selopuro	1.101.855.736,00	739.138.600,00	49,07
	- Puskesmas Kesamben	546.916.625,00	506.616.625,00	7,95
	- Puskesmas Boro	872.975.072,00	872.975.072,00	-
	- Puskesmas Doko	1.233.685.052,00	1.092.213.850,00	12,95
	- Puskesmas Wlingi	1.732.458.680,00	1.722.234.180,00	0,59
	- Puskesmas Gandusari	1.117.039.890,00	1.049.445.012,00	6,44
	- Puskesmas Garum	566.121.975,00	560.470.375,00	1,01
	- Puskesmas Slumbung	1.578.100.371,00	1.578.100.371,00	-
	- Puskesmas Nglebok	2.143.434.106,00	1.206.783.213,00	77,62
	- Puskesmas Sanankulon	859.453.082,00	699.950.382,00	22,79
	- Puskesmas Ponggok	540.651.684,00	530.633.084,00	1,89
	- Puskesmas Bacem	652.493.547,00	454.138.600,00	43,68
	- Puskesmas Srengat	1.445.643.262,00	1.050.160.350,00	37,66
	- Puskesmas Wonodadi	864.501.725,00	864.501.725,00	-
	- Puskesmas Udanawu	544.520.550,00	502.108.150,00	8,45
3	RSUD	71.705.785.073,47	65.143.995.081,00	10,07
4	Dinas PU Dan Penataan Ruang	41.418.686.348,96	35.640.358.324,96	16,21
5	Dinas Perumahan dan KP	117.968.332.758,00	117.845.749.758,00	0,10
6	Satpol PP	902.134.900,00	902.134.900,00	-
7	Badan Kesbangpol	474.630.406,00	326.584.000,00	45,33
8	BPBD	1.701.374.500,00	1.657.893.000,00	2,62
9	Dinas Sosial	1.260.113.366,00	1.099.823.866,00	14,57
10	Dinas Nakertrans	628.075.094,00	628.075.094,00	-
11	Dinas Pengendalian Penduduk, KB	4.103.534.299,64	4.103.534.299,64	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	8.208.100.287,44	7.313.542.317,44	12,23
13	Dinas Kependudukan dan Capil	1.375.792.900,00	1.026.224.000,00	34,06



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/ (Turun) (%)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1.073.000.339,33	1.073.000.339,33	-
15	Dinas Perhubungan	16.183.264.671,04	15.526.189.811,04	4,23
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	295.544.467,00	295.544.467,00	-
17	Dinas Koperasi dan UMKM	528.335.500,00	469.685.500,00	12,49
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.018.641.207,00	1.841.141.207,00	9,64
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.752.591.101,96	486.075.000,00	466,29
20	Disparbudpora	52.373.011.205,33	49.748.903.424,22	5,27
21	Dinas Pertanian dan Pangan	14.485.560.188,00	13.000.361.388,00	11,42
22	Dinas Peternakan dan Perikanan	28.923.264.256,00	28.526.465.256,00	1,39
23	Disperindag	43.333.174.584,40	33.363.871.670,00	29,88
24	<i>Sekretariat Daerah</i>	<i>57.601.376.507,00</i>	<i>57.216.947.507,00</i>	<i>0,67</i>
	- Bagian Pemerintahan	-	-	
	- Bagian Kesra	-	-	
	- Bagian Hukum	-	-	
	- Bagian Perekonomian dan Pembangunan	-	-	
	- Bagian Layanan Pengadaan	-	-	
	- Bagian Organisasi	-	-	
	- Bagian Umum	3.922.092.970,00	3.922.092.970,00	-
	- Bagian Perlengkapan	53.679.283.537,00	53.294.854.537,00	0,72
	- Bagian Humas dan Protokol	0,00	-	
25	Sekretariat DPRD	3.619.312.000,00	3.342.047.500,00	8,30
26	Inspektorat	46.125.000,00	46.125.000,00	-
27	Bappeda	0,00	-	
28	BPKAD	22.615.836.460,00	22.717.461.130,05	(0,45)
29	Badan Pendapatan Daerah	5.997.914.751,00	5.822.956.451,00	3,00
30	BKPSDM	987.093.000,00	987.093.000,00	-
34	Kecamatan Selopuro	963.870.000,00	963.870.000,00	-
35	Kecamatan Wlingi	8.492.052.200,00	7.206.756.200,00	17,83
36	Kecamatan Talun	3.227.679.940,00	2.707.116.040,00	19,23
37	Kecamatan Gandusari	469.948.358,00	436.304.358,00	7,71
38	Kecamatan Doko	227.757.250,00	227.757.250,00	-
39	Kecamatan Garum	1.934.990.289,00	1.733.790.289,00	11,60
40	Kecamatan Kanigoro	1.514.110.000,00	1.075.558.150,00	40,77
41	Kecamatan Sutojayan	14.468.691.134,00	13.575.925.195,00	6,58
42	Kecamatan Binangun	239.100.000,00	324.372.000,00	(26,29)
43	Kecamatan Wates	361.294.500,00	361.294.500,00	-
44	Kecamatan Panggungrejo	331.694.025,00	331.694.025,00	-
45	Kecamatan Wonotirto	183.510.000,00	162.610.000,00	12,85
46	Kecamatan Bakung	3.663.454.250,00	3.663.454.250,00	-
47	Kecamatan Kademangan	1.514.925.400,00	1.422.504.400,00	6,50



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/ (Turun) (%)
48	Kecamatan Sanankulon	229.881.000,00	229.881.000,00	-
49	Kecamatan Srengat	3.430.198.650,00	3.269.315.650,00	4,92
50	Kecamatan Wonodadi	472.074.000,00	472.074.000,00	-
51	Kecamatan Udanawu	332.026.700,00	332.026.700,00	-
52	Kecamatan Ponggok	297.141.000,00	297.141.000,00	-
53	Kecamatan Nglegok	2.046.187.450,00	1.613.523.050,00	26,81
54	Kecamatan Selorejo	439.897.500,00	439.897.500,00	-
55	Kecamatan Kesamben	109.931.625,00	109.931.625,00	-
TOTAL		1.279.973.459.659,58	1.075.164.775.861,39	19,07

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.017.481.680.892,88	2.774.056.961.090,27

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.017.481.680.892,88 dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Awal **Rp 2.774.056.961.090,27**

Penambahan Aset

a) Belanja Pegawai	Rp	0,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	200.995.800,00
c) Belanja Modal	Rp	217.388.334.422,16
d) Koreksi	Rp	1,00
e) Reklasifikasi	Rp	93.309.281.243,10
f) Mutasi antar SKPD	Rp	1.534.813.962,00
g) Hibah	Rp	0,00

Jumlah Penambahan Aset **Rp 312.433.425.428,26**

Pengurangan Aset

a) Penghapusan	Rp	(0,00)
b) Hibah	Rp	(47.000.000,00)
c) Koreksi	Rp	(1.995.610.431,65)
d) Reklasifikasi	Rp	(65.431.281.232,00)
e) Mutasi antar SKPD	Rp	(1.534.813.962,00)
f) Ekstrakomtable	Rp	0,00

Jumlah Pengurangan Aset **Rp (68.008.705.625,65)**

Saldo Akhir

Rp 3.017.481.680.892,88

Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut.

a. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp200.995.800,00 merupakan perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada SKPD berikut ini:

1	Dinas Kesehatan	Rp	97.149.800,00
	- Puskesmas Kanigoro	Rp	9.816.000,00
	- Puskesmas Kesamben	Rp	54.470.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Puskesmas Nglepok	Rp	12.171.400,00
- Puskesmas Udanawu	Rp	20.691.900,00
2 Kecamatan Garum	Rp	103.846.000,00
TOTAL	Rp	200.995.800,00

- 1) Mutasi tambah asset dari belanja barang dan jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp97.149.800,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Puskesmas Kanigoro	Rp	9.816.000,00	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	Rp	3.280.000,00	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
			Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku	Rp	6.536.000,00	
- Puskesmas Kesamben	Rp	54.470.500,00	Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku	Rp	54.470.500,00	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Puskesmas Nglepok	Rp	12.171.400,00	Jalan Khusus	Rp	12.171.400,00	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Puskesmas Udanawu	Rp	20.691.900,00	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Rp	20.691.900,00	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
97.149.800,00			97.149.800,00			

- 2) Mutasi tambah asset dari belanja barang dan jasa pada Kecamatan Garum sebesar Rp103.846.000,00 merupakan Perolehan Aset Jalan Desa dari Belanja Pemeliharaan Jalan.
- b. Mutasi tambah sebesar Rp217.388.334.422,16 merupakan Belanja Modal TA 2019.
- c. Koreksi tambah sebesar Rp1,00 merupakan koreksi kurang catat Saldo Awal Aset Jaringan Sambungan ke Rumah pada BPKAD-SKPB akibat lebih catat mutasi ke Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2017 sesuai SK Bupati Blitar Nomor 188/431/409.06/KPTS/2017.
- d. Reklasifikasi tambah sebesar Rp93.309.281.243,10 terdiri dari,
- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | Rp | 842.173.016,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Rp | 11.696.675.571,00 |
| | - Dinas Kesehatan | Rp | 11.643.728.684,00 |
| | - Puskesmas Binangun | Rp | 41.258.287,00 |
| | - Puskesmas Gandusari | Rp | 11.688.600,00 |
| 3 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Rp | 53.116.006.343,10 |
| 4 | Dinas Perumahan dan KP | Rp | 17.847.566.150,00 |
| 5 | Badan Lingkungan Hidup | Rp | 91.351.780,00 |
| 6 | Dinas Koperasi dan UMKM | Rp | 3.400.000,00 |
| 7 | Disparbudpora | Rp | 1.244.960.516,00 |
| 8 | Dinas Peternakan dan Perikanan | Rp | 27.000.000,00 |
| 9 | Disperindag | Rp | 4.486.485.400,00 |
| 10 | Kecamatan Wlingi | Rp | 496.297.000,00 |
| 11 | Kecamatan Talun | Rp | 210.527.800,00 |
| 12 | Kecamatan Garum | Rp | 1.205.507.573,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

13	Kecamatan Sutojayan	Rp	1.588.388.275,00
14	Kecamatan Srengat	Rp	112.653.000,00
15	Kecamatan Nglegok	Rp	340.288.819,00
TOTAL		Rp	93.309.281.243,10

- e. Mutasi Tambah Aset (Antar SKPD) sebesar Rp1.534.813.962,00 pada SKPD berikut ini:

1	Dinas Kesehatan	Rp	1.118.140.962,00
	- Puskesmas Sutojayan	Rp	175.969.069,00
	- Puskesmas Selopuro	Rp	213.536.873,00
	- Puskesmas Slumbung	Rp	214.737.252,00
	- Puskesmas Srengat	Rp	513.897.768,00
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp	332.273.000,00
3	Disparbudpora	Rp	84.400.000,00
TOTAL		Rp	1.534.813.962,00

- f. Mutasi Kurang Aset dari Hibah sebesar Rp47.000.000,00 merupakan Aset Jalan Desa pada Kecamatan Garum yang akan diserahkan ke masyarakat.

- g. Koreksi kurang sebesar Rp1.995.610.431,65 terdiri dari,

1	Dinas Kesehatan	Rp	111.080.000,00
2	Dinas PU dan Penataan Ruang	Rp	1.379.492.300,06
	Dinas Perumahan dan Kawasan	Rp	28.185.681,59
3	Pemukiman		
4	Kecamatan Sutojayan	Rp	8.409.450,00
5	Kecamatan Srengat	Rp	468.443.000,00
TOTAL		Rp	1.995.610.431,65

- 1) Koreksi kurang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp111.080.000,00 merupakan koreksi Aset Bangunan Pembuang Irigasi ke Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

- 2) Koreksi kurang pada Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp1.379.492.300,06 terdiri dari:

- a) Koreksi ke Beban Barang jasa sebesar Rp1.226.884.650,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1	Jalan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	279.950.000,00	Beban Jasa Konsultansi Penelitian
2	Bangunan Pembawa Irigasi	Rp	92.989.000,00	Beban Jasa Konsultansi Penelitian
3	Bangunan Pembuang Pengamanan	Rp	114.448.000,00	Koreksi pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap Tahun 2018
4	Jaringan Distribusi	Rp	739.497.650,00	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Total	Rp	1.226.884.650,00
--------------	-----------	-------------------------

- b) Koreksi kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp189.202.781,65 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1	Dinas PU dan Penataan Ruang	Rp	144.914.681,42	Jalan Kabupaten
		Rp	7.692.968,64	Jalan Desa
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp	28.185.681,59	Jalan Desa
3	Kecamatan Sutojayan	Rp	8.409.450,00	Bangunan Pengaman Irigasi

Total Rp 189.202.781,65

3) Koreksi kurang pada Kecamatan Srengat sebesar Rp468.443.000,00 merupakan koreksi Aset Jalan Desa ke Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

h. Reklasifikasi kurang sebesar Rp65.431.281.232,00 terdiri dari,

1	Dinas Kesehatan	Rp	423.723.800,00
2	Dinas PU dan Penataan Ruang	Rp	43.124.363.945,00
3	Dinas Perumahan dan KP	Rp	17.847.566.150,00
4	Dinas Sosial	Rp	15.994.000,00
5	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp	3.400.000,00
6	Kecamatan Wlingi	Rp	444.159.000,00
7	Kecamatan Talun	Rp	236.236.670,00
8	Kecamatan Garum	Rp	1.279.507.573,00
9	Kecamatan Sutojayan	Rp	1.588.388.275,00
10	Kecamatan Srengat	Rp	127.653.000,00
11	Kecamatan Nglegok	Rp	340.288.819,00

TOTAL Rp 65.431.281.232,00

i. Mutasi Kurang Antar SKPD sebesar Rp1.534.813.962,00 pada SKPD berikut ini:

1	Dinas Kesehatan	Rp	1.118.140.962,00
2	Disperindag	Rp	332.273.000,00
3	BPKAD	Rp	84.400.000,00

Total Rp 1.534.813.962,00

Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada **Lampiran 35**: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2019 dan **Lampiran 36**: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Rincian Obyek Rekening Tahun 2019.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.017.670.883.674,53 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 63 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan masing-masing SKPD
Per 31 Desember 2019 dan 2018**

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/Turun %
1	Dinas Pendidikan	2.290.698.524,33	1.448.525.508,33	58,14



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/Turun %
2	Dinas Kesehatan	17.574.842.186,00	6.179.377.815,00	184,41
	- Dinas Kesehatan	15.722.435.137,00	5.595.208.415,00	181,00
	- Puskesmas Bakung	0,00	0,00	-
	- Puskesmas Wonotirto	103.546.200,00	103.546.200,00	-
	- Puskesmas Margomulyo	40.000.000,00	40.000.000,00	-
	- Puskesmas Wates	0,00	0,00	-
	- Puskesmas Binangun	41.258.287,00	0,00	-
	- Puskesmas Sutojayan	175.969.069,00	0,00	-
	- Puskesmas Kademangan	39.211.200,00	39.211.200,00	-
	- Puskesmas Kanigoro	19.816.000,00	10.000.000,00	98,16
	- Puskesmas Talun	27.540.000,00	27.540.000,00	-
	- Puskesmas Selopuro	213.536.873,00	0,00	-
	- Puskesmas Kesamben	54.470.500,00	0,00	-
	- Puskesmas Boro	0,00	0,00	-
	- Puskesmas Doko	8.700.000,00	8.700.000,00	-
	- Puskesmas Wlingi	0,00	0,00	-
	- Puskesmas Gandusari	35.112.600,00	23.424.000,00	49,90
	- Puskesmas Garum	0,00	0,00	-
	- Puskesmas Slumbung	260.380.252,00	45.643.000,00	470,47
	- Puskesmas Nglegok	12.171.400,00	0,00	-
	- Puskesmas Sanankulon	151.800.000,00	151.800.000,00	-
	- Puskesmas Ponggok	9.280.000,00	9.280.000,00	-
	- Puskesmas Bacem	90.325.000,00	90.325.000,00	-
	- Puskesmas Srengat	540.397.768,00	26.500.000,00	1.939,24
	- Puskesmas Wonodadi	8.200.000,00	8.200.000,00	-
	- Puskesmas Udanawu	20.691.900,00	0,00	-
3	RSUD	5.095.839.181,00	5.095.839.181,00	-
4	Dinas PU dan Penataan Ruang	2.654.778.571.309,10	2.482.012.827.265,90	6,96
5	Dinas Perumahan dan KP	247.303.880.011,45	211.428.927.716,04	16,97
6	Satpol PP	2.500.000,00	2.500.000,00	-
7	Badan Kesbangpol	0,00	0,00	-
8	BPBD	46.142.776.000,00	40.334.111.500,00	14,40
9	Dinas Sosial	84.698.009,00	84.698.009,00	-
10	Dinas Nakertrans	8.375.000,00	8.375.000,00	-
11	Dinas Pengendalian Penduduk, KB	54.535.250,00	54.535.250,00	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.156.720.906,00	1.944.615.326,00	10,91
13	Dinas Kependudukan dan Capil	215.646.100,00	215.646.100,00	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	23.150.000,00	23.150.000,00	-
15	Dinas Perhubungan	179.052.140,00	179.052.140,00	-
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/Turun %
17	Dinas Koperasi dan UMKM	4.420.000,00	4.420.000,00	-
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	29.500.000,00	29.500.000,00	-
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	332.273.000,00	0,00	-
20	Disparbudpora	1.735.334.966,00	405.974.450,00	327,45
21	Dinas Pertanian dan Pangan	435.908.108,00	435.908.108,00	-
22	Dinas Peternakan dan Perikanan	5.134.653.782,00	5.083.133.782,00	1,01
23	Disperindag	4.500.650.400,00	346.438.000,00	1.199,12
24	Sekretariat Daerah	514.064.461,00	514.064.461,00	-
	- Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	-
	- Bagian Kesra	0,00	0,00	-
	- Bagian Hukum	0,00	0,00	-
	- Bagian Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	-
	- Bagian Layanan Pengadaan	0,00	0,00	-
	- Bagian Organisasi	0,00	0,00	-
	- Bagian Umum	514.064.461,00	514.064.461,00	-
	- Bagian Perlengkapan	0,00	0,00	-
	- Bagian Humas dan Protokol	0,00	0,00	-
25	Sekretariat DPRD	105.088.650,00	105.088.650,00	-
26	Inspektorat	69.723.500,00	69.723.500,00	-
27	Bappeda	0,00	0,00	-
28	BPKAD	212.082.300,00	296.482.299,00	(28,47)
29	Badan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-
30	BKPSDM	0,00	0,00	-
34	Kecamatan Selopuro	0,00	0,00	-
35	Kecamatan Wlingi	4.689.748.194,00	3.451.219.194,00	35,89
36	Kecamatan Talun	2.687.229.395,00	1.679.047.925,00	60,04
37	Kecamatan Gandusari	-	-	-
38	Kecamatan Doko	437.210.000,00	437.210.000,00	-
39	Kecamatan Garum	3.787.285.000,00	1.476.692.500,00	156,47
40	Kecamatan Kanigoro	130.340.000,00	130.340.000,00	-
41	Kecamatan Sutojayan	8.485.578.272,00	4.880.018.610,00	73,88
42	Kecamatan Binangun	0,00	0,00	-
43	Kecamatan Wates	0,00	0,00	-
44	Kecamatan Panggungrejo	4.000.000,00	4.000.000,00	-
45	Kecamatan Wonotirto	0,00	0,00	-
46	Kecamatan Bakung	0,00	0,00	-
47	Kecamatan Kademangan	523.386.000,00	35.981.000,00	1.354,62
48	Kecamatan Sanankulon	0,00	0,00	-
49	Kecamatan Srengat	6.201.682.898,00	4.719.265.800,00	31,41
50	Kecamatan Wonodadi	0,00	0,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/Turun %
51	Kecamatan Udanawu	28.400.000,00	28.400.000,00	-
52	Kecamatan Ponggok	65.718.000,00	65.718.000,00	-
53	Kecamatan Nglegok	1.354.289.350,00	744.324.000,00	81,95
54	Kecamatan Selorejo	1.830.000,00	1.830.000,00	-
55	Kecamatan Kesamben	0,00	0,00	-
TOTAL		3.017.481.680.892,88	2.774.056.961.090,27	8,78

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	50.494.857.454,63	44.614.477.986,63
Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp50.494.857.454,63 dengan rincian sebagai berikut.		
Saldo Awal	Rp	44.614.477.986,63
Penambahan Aset		
a) Belanja Pegawai	Rp 0,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 0,00	
c) Belanja Modal	Rp 28.468.841.417,00	
d) Koreksi	Rp 36.743.000,00	
e) Reklasifikasi	Rp 3.496.383.553,00	
f) Mutasi antar SKPD	Rp 30.092.700,00	
g) Hibah	Rp 200.465.715,00	
Jumlah Penambahan Aset	Rp	32.232.526.385,00
Pengurangan Aset		
a) Penghapusan	Rp 0,00	
b) Hibah	Rp 0,00	
c) Koreksi	Rp (198.671.497,00)	
d) Reklasifikasi	Rp (26.123.382.720,00)	
e) Mutasi antar SKPD	Rp (30.092.700,00)	
f) Ekstrakomtabel	Rp 0,00	
Jumlah Pengurangan Aset	Rp	(26.352.146.917,00)
Saldo Akhir	Rp	50.494.857.454,63

Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Mutasi tambah sebesar Rp28.468.841.417,00 merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019.
- Koreksi tambah sebesar Rp36.743.000,00 merupakan Penilaian Aset Tetap Lainnya (Buku) sebesar Rp36.743.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan SK Bupati Blitar Nomor 188/495/409.06/KPTS/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya.
- Reklasifikasi tambah sebesar Rp3.495.383.553,00 pada,



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1	Dinas Pendidikan	Rp	3.206.307.099,00
2	RSUD	Rp	44.215.600,00
3	Dinas PU Dan Penataan Ruang	Rp	192.018.454,00
4	Badan Lingkungan Hidup	Rp	31.087.500,00
5	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp	15.880.900,00
6	Kecamatan Binangun	Rp	15.000,00
7	Kecamatan Srengat	Rp	6.859.000,00
Total		Rp	3.496.383.553,00

- d. Mutasi tambah antar SKPD sebesar Rp30.092.700,00 merupakan Mutasi Aset Tetap Lainnya dari Dinas Lingkungan Hidup kepada SKPD berikut ini :

1	Dinas Pendidikan	Rp	4.974.000,00
2	Kecamatan Selopuro	Rp	1.243.500,00
3	Kecamatan Wlingi	Rp	6.714.900,00
4	Kecamatan Talun	Rp	2.984.400,00
5	Kecamatan Gandusari	Rp	2.487.000,00
6	Kecamatan Garum	Rp	1.243.500,00
7	Kecamatan Kanigoro	Rp	4.227.900,00
8	Kecamatan Binangun	Rp	2.487.000,00
9	Kecamatan Srengat	Rp	1.243.500,00
10	Kecamatan Wonodadi	Rp	1.243.500,00
11	Kecamatan Selorejo	Rp	1.243.500,00
Total		Rp	30.092.700,00

- e. Mutasi tambah dari Hibah sebesar Rp200.465.715,00 merupakan Hibah Buku Umum sebesar Rp4.500.000,00 dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Dinas Pendidikan dan Hibah Aset Alat Olah Raga Air sebesar Rp195.965.715,00 dari BNPB kepada BPBD sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor BA.441/BNPB/08/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang diakui pada tahun 2019.

- f. Koreksi kurang sebesar Rp198.671.497,00 pada SKPD:

1	Dinas Pendidikan	Rp	18.279.000,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	55.783.497,00
-	Puskesmas Wates	Rp	1.730.000,00
-	Puskesmas Kademangan	Rp	3.750.679,00
-	Puskesmas Kanigoro	Rp	6.583.044,00
-	Puskesmas Talun	Rp	1.864.973,00
-	Puskesmas Selopuro	Rp	1.506.850,00
-	Puskesmas Kesamben	Rp	1.917.500,00
-	Puskesmas Boro	Rp	338.000,00
-	Puskesmas Doko	Rp	2.215.500,00
-	Puskesmas Wlingi	Rp	3.970.000,00
-	Puskesmas Gandusari	Rp	506.990,00
-	Puskesmas Garum	Rp	5.071.000,00
-	Puskesmas Nglegok	Rp	800.000,00
-	Puskesmas Sanankulon	Rp	11.041.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Puskesmas Ponggok	Rp	1.381.361,00
- Puskesmas Bacem	Rp	80.000,00
- Puskesmas Srengat	Rp	9.871.500,00
- Puskesmas Wonodadi	Rp	1.725.000,00
- Puskesmas Udanawu	Rp	1.430.000,00
3 BPKAD	Rp	15.508.000,00
4 Kecamatan Sutojayan	Rp	109.101.000,00
Total	Rp	198.671.497,00

1) Dinas Pendidikan sebesar Rp18.279.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a Aset Tetap Lainnya BOS - SD	Rp	7.135.000,00	Beban Persediaan ATK	Rp	600.000,00
			Beban Persediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	1.125.000,00
			Beban Persediaan Bahan Praktek/ Pelatihan	Rp	600.000,00
			Beban Pakaian KORPRI	Rp	1.750.000,00
			Beban Pakaian Adat Daerah	Rp	3.060.000,00
b Aset Tetap Lainnya BOS - SMP	Rp	11.144.000,00	Beban Persediaan ATK	Rp	1.574.000,00
			Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	9.570.000,00
		18.279.000,00	18.279.000,00		

2) Dinas Kesehatan sebesar Rp55.783.497,00 merupakan koreksi Aset Tetap Lainnya BLUD pada Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

- Puskesmas Wates	Rp	1.730.000,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	1.730.000,00
- Puskesmas Kademangan	Rp	3.750.679,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	3.750.679,00
- Puskesmas Kanigoro	Rp	6.583.044,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	6.583.044,00
- Puskesmas Talun	Rp	1.864.973,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	1.864.973,00
- Puskesmas Selopuro	Rp	1.506.850,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	1.506.850,00
- Puskesmas Kesamben	Rp	1.917.500,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	1.917.500,00
- Puskesmas Boro	Rp	338.000,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	338.000,00
- Puskesmas Doko	Rp	2.215.500,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	2.215.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Puskesmas Wlingi	Rp	3.970.000,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	3.970.000,00
- Puskesmas Gandusari	Rp	506.990,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	506.990,00
- Puskesmas Garum	Rp	5.071.000,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	5.071.000,00
- Puskesmas Nglegok	Rp	800.000,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	800.000,00
- Puskesmas Sanankulon	Rp	11.041.100,00	Beban Persediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	6.770.200,00
			Beban Jasa Listrik	Rp	4.270.900,00
- Puskesmas Ponggok	Rp	1.381.361,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	1.381.361,00
- Puskesmas Bacem	Rp	80.000,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	80.000,00
- Puskesmas Srengat	Rp	9.871.500,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	9.871.500,00
- Puskesmas Wonodadi	Rp	1.725.000,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	1.725.000,00
- Puskesmas Udanawu	Rp	1.430.000,00	Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai	Rp	1.430.000,00
	Rp	55.783.497,00		Rp	55.783.497,00

3) Koreksi Kurang pada BPKAD sebesar Rp15.508.000,00 merupakan Koreksi Saldo Awal Buku Pengetahuan Praktis Rp6.008.000,00 (karena sudah dimutasi ke Dispertapa tahun 2017) dan Tanaman Perkebunan Rp9.500.000,00 (karena sudah dimutasi ke Disnakan tahun 2017) sesuai dengan SK Bupati Blitar Nomor 188/496/409.06/KPTS/2017.

4) Koreksi Kurang pada Kecamatan Sutojayan sebesar Rp109.101.000,00 merupakan perolehan barang dan jasa dari belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

a	Arsitektur, Kesenian, Olahraga	Rp	6.500.000,00	Beban Bahan Peralatan
b	Alat Olahraga Lainnya	Rp	2.601.000,00	Beban Bahan Peralatan
c	Tanaman Hias	Rp	100.000.000,00	Beban Persediaan Bibit Tanaman

Total	Rp	109.101.000,00
--------------	-----------	-----------------------

g. Reklasifikasi Kurang sebesar Rp26.123.382.720,00 terdiri dari,

1	Dinas Pendidikan	Rp	11.151.892.244,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	5.642.217.754,00
-	Puskesmas Bakung	Rp	142.418.542,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Puskesmas Wonotirto	Rp	63.600.000,00
- Puskesmas Margomulyo	Rp	156.475.924,00
- Puskesmas Wates	Rp	137.034.100,00
- Puskesmas Binangun	Rp	233.427.600,00
- Puskesmas Sutojayan	Rp	170.971.500,00
- Puskesmas Kademangan	Rp	209.113.820,00
- Puskesmas Kanigoro	Rp	167.825.488,00
- Puskesmas Talun	Rp	294.118.193,00
- Puskesmas Selopuro	Rp	299.114.772,00
- Puskesmas Kesamben	Rp	280.728.402,00
- Puskesmas Boro	Rp	193.079.000,00
- Puskesmas Doko	Rp	181.766.900,00
- Puskesmas Wlingi	Rp	233.913.950,00
- Puskesmas Gandusari	Rp	303.625.263,00
- Puskesmas Garum	Rp	634.952.192,00
- Puskesmas Slumbung	Rp	21.431.530,00
- Puskesmas Nglegok	Rp	400.082.400,00
- Puskesmas Sanankulon	Rp	318.013.606,00
- Puskesmas Ponggok	Rp	263.777.354,00
- Puskesmas Bacem	Rp	77.136.296,00
- Puskesmas Srengat	Rp	439.185.051,00
- Puskesmas Wonodadi	Rp	168.583.125,00
- Puskesmas Udanawu	Rp	251.842.746,00
3 RSUD	Rp	9.174.796.822,00
4 Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp	15.880.900,00
5 Badan Pendapatan Daerah	Rp	7.370.000,00
6 Kecamatan Wlingi	Rp	90.000.000,00
7 Kecamatan Talun	Rp	32.151.000,00
8 Kecamatan Sutojayan	Rp	2.100.000,00
9 Kecamatan Binangun	Rp	15.000,00
10 Kecamatan Srengat	Rp	6.859.000,00
11 Kecamatan Ponggok	Rp	100.000,00
TOTAL	Rp	26.123.382.720,00

- h. Mutasi Kurang Antar SKPD sebesar Rp30.092.700,00 merupakan Mutasi Aset Tetap Lainnya – Barang Kerajinan dari DLH ke SKPD.

Mutasi aset tetap lainnya (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada **Lampiran 38**: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 serta **Lampiran 39**: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya, per Rincian Obyek Rekening Tahun 2019.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp50.494.857.454,63 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 64 Rincian Aset Tetap Lainnya masing-masing SKPD
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/Turun %
1	Dinas Pendidikan	38.541.557.662,36	33.552.408.763,36	14,87
2	Dinas Kesehatan	693.200,00	693.200,00	-
	- Puskesmas Binangun	428.000,00	428.000,00	-
	- Puskesmas Kanigoro	25.200,00	25.200,00	-
	- Puskesmas Srengat	240.000,00	240.000,00	-
3	RSUD	68.292.000,00	24.076.400,00	183,65
4	Dinas PU dan Penataan Ruang	261.490.454,00	69.472.000,00	276,40
5	Dinas Perumahan dan KP	2.679.713.500,00	2.679.713.500,00	-
6	BPBD	212.665.715,00	16.700.000,00	1.173,45
7	Dinas Lingkungan Hidup	734.545.350,00	733.550.550,00	0,14
8	Dinas Perhubungan	1.150.000,00	1.150.000,00	-
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip	778.024.565,00	714.453.265,00	8,90
10	Disparbudpora	4.593.353.908,27	4.236.300.908,27	8,43
11	Dinas Pertanian dan Pangan	6.008.000,00	6.008.000,00	-
12	Dinas Peternakan dan Perikanan	246.845.000,00	246.845.000,00	-
13	Disperindag	85.651.000,00	61.000.000,00	40,41
14	Sekretariat Daerah	1.011.436.900,00	1.011.436.900,00	-
	- Bagian Hukum	21.720.900,00	21.720.900,00	-
	- Bagian Perekonomian dan Pembangunan	4.500.000,00	4.500.000,00	-
	- Bagian Umum	780.412.500,00	780.412.500,00	-
	- Bagian Perlengkapan	6.875.000,00	6.875.000,00	-
	- Bagian Humas dan Protokol	197.928.500,00	197.928.500,00	-
15	Sekretariat DPRD	176.043.350,00	176.043.350,00	-
16	Inspektorat	40.000,00	40.000,00	-
17	Bappeda	277.865.500,00	277.865.500,00	-
18	BPKAD	0,00	15.508.000,00	(100,00)
19	Badan Pendapatan Daerah	860.000,00	860.000,00	-
20	Kecamatan Selopuro	1.243.500,00	0,00	-
21	Kecamatan Wlingi	300.476.900,00	293.762.000,00	2,29
22	Kecamatan Talun	11.614.400,00	8.630.000,00	34,58
23	Kecamatan Gandusari	2.487.000,00	0,00	-
24	Kecamatan Doko	18.000,00	18.000,00	-
25	Kecamatan Garum	130.299.350,00	129.055.850,00	0,96
26	Kecamatan Kanigoro	8.572.900,00	4.345.000,00	97,30
27	Kecamatan Sutojayan	51.770.000,00	48.520.000,00	6,70
28	Kecamatan Binangun	2.502.000,00	15.000,00	16.580,00
29	Kecamatan Wates	38.140.000,00	38.140.000,00	-
30	Kecamatan Panggungrejo	72.500.000,00	72.500.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/Turun %
31	Kecamatan Wonotirto	18.500.000,00	18.500.000,00	-
32	Kecamatan Bakung	36.960.000,00	36.960.000,00	-
33	Kecamatan Kademangan	28.795.000,00	28.795.000,00	-
34	Kecamatan Srengat	56.055.300,00	54.811.800,00	2,27
35	Kecamatan Wonodadi	32.743.500,00	31.500.000,00	3,95
36	Kecamatan Ponggok	0,00	100.000,00	(100,00)
37	Kecamatan Nglegok	24.700.000,00	24.700.000,00	-
38	Kecamatan Selorejo	1.243.500,00	0,00	-
	TOTAL	50.494.857.454,63	44.614.477.986,63	13,17

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	24.091.323.009,12	57.621.342.762,14
Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp24.091.323.009,12 merupakan reklasifikasi atas pembangunan yang belum selesai dikerjakan dengan rincian sebagai berikut.		
Saldo Awal	Rp	57.621.342.762,14
Penambahan Aset		
a) Belanja Pegawai	Rp 0,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 0,00	
c) Belanja Modal	Rp 0,00	
d) Koreksi	Rp 0,00	
e) Reklasifikasi	Rp 29.730.759.241,12	
f) Mutasi antar SKPD	Rp 940.384.806,00	
g) Hibah	Rp 0,00	
Jumlah Penambahan Aset	Rp	30.671.144.047,12
Pengurangan Aset		
a) Penghapusan	Rp 0,00	
b) Hibah	Rp 0,00	
c) Koreksi	Rp (1,00)	
d) Reklasifikasi	Rp (63.260.778.993,14)	
e) Mutasi antar SKPD	Rp (940.384.806,00)	
f) Ekstrakomtable	Rp 0,00	
Jumlah Pengurangan Aset	Rp	(64.201.163.800,14)
Saldo Akhir	Rp	24.091.323.009,12
Penambahan Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp30.671.144.047,12 dijelaskan sebagai berikut.		
a. Reklasifikasi Tambah yang menambah Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp29.730.759.241,12, yaitu pada SKPD		
1 Dinas Kesehatan	Rp	1.024.427.687,82
2 RSUD	Rp	6.262.106.069,00
3 Dinas PU dan Penataan Ruang	Rp	20.945.946.497,00
4 Dinas Lingkungan Hidup	Rp	1.326.363.027,30
5 Disparbudpora	Rp	171.915.960,00
Jumlah reklasifikasi yang menambah Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp	29.730.759.241,12



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Mutasi tambah antar SKPD sebesar Rp940.384.806,00 merupakan mutasi dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas sebagai berikut :

1	Puskesmas Wonotirto	Rp	320.809.278,00
2	Puskesmas Wates	Rp	352.429.710,00
3	Puskesmas Wonodadi	Rp	267.145.818,00
Total		Rp	940.384.806,00

- c. Koreksi kurang KDP sebesar Rp1,00 merupakan koreksi lebih catat KDP Jalan sebesar Rp0,99 dan KDP Bangunan Pengaman sebesar Rp0,01 pada Dinas PU dan Penataan Ruang sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi BMD Semester II TA 2019 dengan Bidang Aset.

- d. Reklasifikasi Kurang yang mengurangi Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp63.260.778.993,14 dapat dijelaskan pada SKPD sebagai berikut.

1	Dinas Kesehatan	Rp	32.255.321.112,00
2	RSUD	Rp	6.405.746.469,00
3	Dinas PU Dan Penataan Ruang	Rp	19.341.044.895,10
4	Disparbudpora	Rp	171.915.960,00
5	Disperindag	Rp	5.086.750.557,04
Total		Rp	63.260.778.993,14

- e. Mutasi Kurang Antar SKPD sebesar Rp940.384.806,00 merupakan Mutasi KDP Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp352.429.710,00 ke Puskesmas Wates, KDP Bangunan Kesehatan ke Puskesmas Wonotirto sebesar Rp320.809.278 dan ke Puskesmas Wonodadi sebesar Rp267.145.818,00.

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada **Lampiran 40:** Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2019 dan **Lampiran 41:** Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan per Rincian Obyek Rekening Tahun 2019, serta **Lampiran 42:** Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2019.

Rincian Aset Tetap - Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 65 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing SKPD
Per 31 Desember 2019 dan 2018**

No	SKPD	Rincian KDP			
		No	Nama Kontruksi	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1	KDP Bangunan Gedung Kantor	352.429.710,00	0,00
		2	KDP Bangunan Kesehatan	799.669.074,82	32.417.962.709,00
		3	KDP Instalasi Air Kotor	34.970.500,00	0,00
			Jumlah	1.187.069.284,82	32.417.962.709,00
2	RSUD	1	KDP Bangunan Gedung	0,00	37.706.000,00
		2	KDP Bangunan Kesehatan	0,00	105.934.400,00
			Jumlah	0,00	143.640.400,00
3	Dinas PU dan	1	KDP Bangunan Gedung Kantor	4.368.034.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Rincian KDP			
		No	Nama Kontruksi	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	Penataan Ruang	2	KDP Bangunan Kesehatan	2.576.766.000,00	0,00
		3	KDP Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	2.054.603.000,00	0,00
		4	Bangunan Gedung Garasi/ Pool	2.542.023.000,00	0,00
		5	KDP Jalan	1.159.532.853,00	14.615.754.175,19
		6	KDP Jalan Khusus	1.484.411.000,00	0,00
		7	KDP Jembatan	5.871.045.398,00	1.054.396.520,00
		8	KDP Bangunan Pembawa Irigasi	278.586.446,00	2.435.094.000,00
		9	KDP Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	874.034.200,91
		10	KDP Lainnya	911.706.500,00	662.527.700,00
			Jumlah	21.246.708.197,00	19.641.806.596,10
4	Dinas Perumahan dan KP	1	KDP Bangunan Gedung Kantor	66.103.500,00	66.103.500,00
			Jumlah	66.103.500,00	66.103.500,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	1	KDP Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00
		2	KDP Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.326.363.027,30	0,00
			Jumlah	1.329.863.027,30	3.500.000,00
6	Dinas Parbudpora	1	KDP Tanah untuk Bangunan Gedung	65.247.000,00	65.247.000,00
			Jumlah	65.247.000,00	65.247.000,00
7	Disperindag	1	KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pertokoan/Koperasi/Pasar	196.332.000,00	5.283.082.557,04
			Jumlah	196.332.000,00	5.283.082.557,04
TOTAL				24.091.323.009,12	57.621.342.762,14

	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>
7. Akumulasi Penyusutan	(1.728.311.263.136,35)	(1.608.375.725.881,43)

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 bersaldo kredit sebesar Rp(1.728.311.263.136,35) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 66 Rincian Akumulasi Penyusutan masing-masing SKPD
Per 31 Desember 2019 dan 2018**

No.	Akumulasi Penyusutan per SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(246.594.580.481,64)	(238.723.072.708,27)
2	Dinas Kesehatan	(87.825.119.881,58)	(83.848.373.310,35)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(84.499.560.205,30)	(82.492.734.436,80)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(911.876.384.156,65)	(834.744.891.928,25)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(113.249.190.107,27)	(106.837.103.959,27)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(5.807.213.953,68)	(5.754.581.539,68)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.940.797.691,00)	(1.785.207.059,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Akumulasi Penyusutan per SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(15.913.072.306,29)	(13.233.518.211,00)
9	Dinas Sosial	(2.150.747.898,00)	(1.870.787.986,00)
10	Dinas Tenaga Kerja	(2.664.590.611,00)	(2.441.218.143,00)
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(9.304.977.875,00)	(9.233.613.283,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(11.708.927.109,00)	(11.017.755.484,00)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(6.722.115.621,60)	(6.083.803.048,60)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(2.438.966.978,00)	(2.258.187.090,00)
15	Dinas Perhubungan	(17.793.086.567,57)	(17.122.165.606,57)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	(3.471.425.836,16)	(2.888.794.608,30)
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	(1.475.652.030,00)	(1.535.331.798,00)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(3.136.246.531,30)	(2.898.105.827,30)
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	(2.283.293.467,84)	(2.023.328.574,84)
20	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	(18.354.391.466,24)	(15.856.243.696,58)
21	Dinas Pertanian dan Pangan	(10.798.697.651,57)	(10.270.023.972,57)
22	Dinas Peternakan dan Perikanan	(10.795.394.863,57)	(10.061.302.114,74)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(7.310.900.643,00)	(6.436.332.255,00)
24	<i>Sekretariat Daerah</i>		
	Bagian Pemerintahan	(359.219.205,00)	(326.611.070,00)
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	(261.443.272,49)	(377.237.340,49)
	Bagian Hukum	(341.110.310,00)	(454.001.862,00)
	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	(283.820.451,00)	(239.879.740,00)
	Bagian Layanan Pengadaan	(1.575.690.937,00)	(1.469.611.404,00)
	Bagian Organisasi	(441.671.055,00)	(554.954.142,00)
	Bagian Umum	(15.589.119.609,11)	(15.058.074.024,11)
	Bagian Perlengkapan	(24.804.938.592,68)	(22.116.219.010,68)
	Bagian Humas dan Protokol	(1.538.436.450,14)	(1.484.512.377,14)
25	Sekretariat DPRD	(16.616.453.032,00)	(15.761.712.871,00)
26	Kecamatan Selopuro	(1.156.525.407,08)	(940.785.547,00)
27	Kecamatan Wlingi	(6.009.880.685,00)	(5.775.452.688,00)
28	Kecamatan Talun	(3.262.116.630,14)	(3.269.607.138,14)
29	Kecamatan Gandusari	(916.467.882,00)	(899.222.585,00)
30	Kecamatan Doko	(1.120.490.479,00)	(1.090.195.714,00)
31	Kecamatan Garum	(3.429.797.620,00)	(3.357.207.566,00)
32	Kecamatan Kanigoro	(1.518.907.722,00)	(1.305.028.947,00)
33	Kecamatan Sutojayan	(11.212.249.540,14)	(9.559.331.715,14)
34	Kecamatan Binangun	(612.442.398,00)	(649.382.272,00)
35	Kecamatan Wates	(749.834.215,00)	(677.029.430,00)
36	Kecamatan Panggungrejo	(660.054.981,00)	(585.353.493,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Akumulasi Penyusutan per SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
37	Kecamatan Wonotirto	(729.868.903,00)	(725.695.642,00)
38	Kecamatan Bakung	(4.138.075.431,00)	(4.181.652.110,00)
39	Kecamatan Kademangan	(1.658.726.798,16)	(1.346.895.609,00)
40	Kecamatan Sanankulon	(692.600.651,00)	(622.216.603,00)
41	Kecamatan Srengat	(4.619.468.784,50)	(4.353.891.287,42)
42	Kecamatan Wonodadi	(848.655.949,43)	(759.829.921,43)
43	Kecamatan Udanawu	(863.875.682,43)	(786.949.106,43)
44	Kecamatan Ponggok	(613.928.679,00)	(641.223.172,00)
45	Kecamatan Nglegok	(1.880.768.732,00)	(1.669.791.757,00)
46	Kecamatan Selorejo	(770.546.157,00)	(685.478.358,00)
47	Kecamatan Kesamben	(828.080.786,00)	(773.608.907,00)
48	Inspektorat Daerah	(2.531.779.441,00)	(2.424.287.884,00)
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(2.519.916.660,00)	(2.377.730.431,00)
50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	(17.350.841.607,11)	(15.399.838.045,00)
51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	(6.240.162.155,33)	(5.385.539.376,33)
52	Badan Pendapatan Daerah	(7.464.307.430,68)	(7.270.546.074,00)
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(3.983.654.881,67)	(3.602.664.020,00)
	Jumlah	(1.728.311.263.136,35)	(1.608.375.725.881,43)

Akumulasi sebesar Rp(1.728.311.263.136,35) belum termasuk penyusutan Peralatan dan mesin sebesar Rp44.657.539,00 serta Bangunan Gedung sebesar Rp412.825.550,00 pada Dinas Pendidikan perolehan Tahun 2015 sebelumnya yang sampai saat penyusunan belum dapat disusutkan karena belum dicatat dalam Buku Inventaris Barang (BMD).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah pasal 19, rincian akumulasi penyusutan ekstrakomptabel sampai dengan 2019 pada SKPD adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai Ekstrakomptabel (Rp)	Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel s.d 2019 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.211.242.080	422.938.624,64
2	Rumah Sakit Umum Daerah	132.580.000	121.616.464
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	205.197.740	122.604.093
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	62.111.537	3.858.219
5	Satuan Polisi Pamong Praja	19.872.500	7.901.815
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.330.000	3.402.083
7	Dinas Tenaga Kerja	275.001	169.584
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	174.196.681	11.410.796
9	Dinas Lingkungan Hidup	222.003.000	14.477.790



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

10	Dinas Perhubungan	1.525.585.195	700.386.766
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.410.000	587.500
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.905.000	484.167
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	76.583.000	12.246.661
14	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	156.646.300	45.089.192
15	Dinas Pertanian dan Pangan	31.371.100	7.659.620
16	Dinas Peternakan dan Perikanan	88.915.328	20.524.502
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.314.483	1.825.559
18	Bagian Umum	63.981.900	41.092.790
19	Sekretariat DPRD	12.778.000	1.523.208
20	Kecamatan Selopuro	11.200.000	6.693.333
21	Kecamatan Wlingi	192.380.066	40.737.104
22	Kecamatan Talun	114.493.001	19.393.179
23	Kecamatan Doko	4.500.000	2.625.000
24	Kecamatan Garum	95.318.683	22.764.816
25	Kecamatan Kanigoro	102.588.007	23.783.617
26	Kecamatan Sutojayan	154.146.003	23.412.170
27	Kecamatan Panggunrejo	8.500.008	4.358.341
28	Kecamatan Wonotirto	880.000	542.667
29	Kecamatan Bakung	19.775.000	6.522.548
30	Kecamatan Kademangan	54.347.000	6.360.755
31	Kecamatan Sanankulon	4.700.000	1.880.952
32	Kecamatan Srengat	47.443.000	12.811.476
33	Kecamatan Wonodadi	7.500.000	4.464.286
34	Kecamatan Udanawu	7.750.000	4.797.619
35	Kecamatan Ponggok	19.800.008	4.661.056
36	Kecamatan Nglegok	37.990.000	7.490.333
37	Kecamatan Selorejo	8.800.008	2.704.175
38	Kecamatan Kesamben	1.500.000	1.075.000
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	745.500	608.825
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	42.943.500	29.766.726
41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	5.300.000	1.996.667
42	Badan Pendapatan Daerah	12.122.000	8.523.625
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.236.000	1.336.483
JUMLAH		4.978.256.629	1.779.110.187

Adapun rekap penyusutan per SKPD pada **Lampiran 43** dan rekap penyusutan per rekening aset pada **Lampiran 44**.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
5.3.1.4 Dana Cadangan	0,00	0,00
Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.		

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
5.3.1.5 Aset Lainnya	60.493.688.877,78	59.780.590.074,12
Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp60.493.688.877,78 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp59.780.590.074,12 dengan rincian sebagai berikut.		

Tabel 67 Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1)	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.748.036.916,00	4.825.486.916,00
2)	Aset Tak berwujud	8.266.639.645,64	7.376.410.645,64
3)	Aset Lain-lain	47.479.012.316,14	47.578.692.512,48
Jumlah Aset Lainnya		60.493.688.877,78	59.780.590.074,12

Jumlah Aset Lainnya Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp713.098.803,66 (Rp60.493.688.877,78 - Rp59.780.590.074,12) dari jumlah Aset Lainnya Tahun 2018. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.748.036.916,00	4.825.486.916,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.748.036.916,00 merupakan TGR yang sudah ada SK Pembebanannya dengan rincian pada **Lampiran44**.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
2. Aset Tidak Berwujud	8.266.639.645,64	7.376.410.645,64

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.266.639.645,64 merupakan *software*/perangkat lunak dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Awal **Rp 7.376.410.645,64**

Penambahan Aset

a)	Belanja Pegawai	Rp	0,00
b)	Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
c)	Belanja Modal	Rp	965.589.500,00
d)	Koreksi	Rp	0,00
e)	Reklasifikasi	Rp	890.229.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

f) Mutasi antar SKPD	Rp	0,00
g) Hibah	Rp	0,00
Jumlah Penambahan Aset	Rp	1.855.818.500,00
Pengurangan Aset		
a) Penghapusan	Rp	0,00
b) Hibah	Rp	0,00
c) Koreksi	Rp	(965.589.500,00)
d) Reklasifikasi	Rp	0,00
e) Mutasi antar SKPD	Rp	0,00
f) Ekstrakomptabel	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan Aset	Rp	(965.589.500,00)
Saldo Akhir	Rp	8.266.639.645,64
a. Belanja Modal sebesar Rp965.589.500,00 berupa pengadaan <i>software</i> aplikasi pada dengan rincian sebagai berikut.		
1 Dinas Pendidikan	Rp	127.775.000,00
2 Dinas Kesehatan	Rp	48.000.000,00
3 Dinas Kependudukan dan Capil	Rp	128.290.000,00
4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Rp	49.850.000,00
5 Dinas Perhubungan	Rp	28.985.000,00
6 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	248.230.000,00
7 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp	59.904.000,00
8 Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp	14.730.500,00
9 Dinas Pertanian Dan Pangan	Rp	79.805.000,00
10 <i>Sekretariat Daerah</i>	<i>Rp</i>	<i>130.020.000,00</i>
- Bagian Hukum	Rp	31.487.500,00
- Bagian Perekonomian dan Pembangunan	Rp	98.532.500,00
11 Bappeda	Rp	50.000.000,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	965.589.500,00
b. Reklasifikasi tambah sebesar Rp.890.229.000,00 merupakan reklasifikasi tambah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut.		
1 Dari Bangunan Gedung Kantor (DED Block Office Kantor Bupati)	Rp	790.729.000,00
2 Dari Bangunan Gedung Pertemuan (DED Gedung Pertemuan Kelurahan Beru)	Rp	99.500.000,00
Jumlah Reklasifikasi Tambah	Rp	890.229.000,00
c. Koreksi kurang sebesar Rp965.589.500,00 dengan rincian sebagai berikut.		
1 Dinas Pendidikan	Rp	127.775.000,00
2 Dinas Kesehatan	Rp	48.000.000,00
3 Dinas Kependudukan dan Capil	Rp	128.290.000,00
4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Rp	49.850.000,00
5 Dinas Perhubungan	Rp	28.985.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	248.230.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp	59.904.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp	14.730.500,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp	79.805.000,00
10	Sekretariat Daerah	Rp	130.020.000,00
	- Bagian Hukum	Rp	31.487.500,00
	- Bagian Perekonomian dan Pembangunan	Rp	98.532.500,00
11	Bappeda	Rp	50.000.000,00

Jumlah koreksi/penyesuaian kurang	Rp	965.589.500,00
--	-----------	-----------------------

- 1) Koreksi Kurang Dinas Pendidikan sebesar Rp127.775.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud ke Beban Belanja Jasa Konsultan Perencanaan.
- 2) Koreksi Kurang Dinas Kesehatan sebesar Rp48.000.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan.
- 3) Koreksi Kurang Dinas Kependudukan dan Capil sebesar Rp128.290.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan.
- 4) Koreksi Kurang Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp49.850.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud ke ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan.
- 5) Koreksi Kurang Dinas Perhubungan sebesar Rp28.985.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan.
- 6) Koreksi Kurang Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp248.230.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan.
- 7) Koreksi Kurang Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp59.904.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan.
- 8) Koreksi Kurang Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp14.730.500,00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan.
- 9) Koreksi Kurang Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp79.805.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan.
- 10) Koreksi Kurang Sekretariat Daerah sebesar Rp130.020.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud pada
 - Bagian Hukum sebesar Rp31.487.500,00 koreksi ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan.
 - Bagian Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp98.532.500,00 koreksi kurang ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan.
- 11) Koreksi Kurang Bappeda sebesar Rp50.000.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan.

Mutasi Aset Tidak Berwujud (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada **Lampiran 46**: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Aset Tidak Berwujud Tahun 2019 dan **Lampiran 47**: Rekap Mutasi



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penambahan dan Pengurangan Aset Tidak Berwujud per Rincian Obyek Rekening Tahun 2019.

Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.266.639.645,64 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 68 Rincian Aset Tidak Berwujud masing-masing SKPD
Per 31 Desember 2019 dan 2018**

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/Turun %
1	Dinas Pendidikan	129.225.000,00	129.225.000,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	211.850.897,00	211.850.897,00	0,00
3	Dinas PU dan Penataan Ruang	953.931.000,00	63.702.000,00	1.397,49
4	Dinas Sosial	103.700.000,00	103.700.000,00	0,00
5	Dinas Nakertrans	142.440.000,00	142.440.000,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
7	Dinas Kependudukan dan Capil	476.695.000,00	476.695.000,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	289.400.000,00	289.400.000,00	0,00
9	Dinas Perhubungan	38.450.000,00	38.450.000,00	0,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	644.536.863,00	644.536.863,00	0,00
11	Dinas Koperasi dan UMKM	283.100.000,00	283.100.000,00	0,00
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	406.105.000,00	406.105.000,00	0,00
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	153.464.435,64	153.464.435,64	0,00
14	Disparbudpora	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00
15	Dinas Pertanian dan Pangan	59.720.000,00	59.720.000,00	0,00
16	Disperindag	98.202.200,00	98.202.200,00	0,00
17	<i>Sekretariat Daerah</i>			
	- Bagian Pemerintahan	19.602.000,00	19.602.000,00	0,00
	- Bagian Kesra	0,00	0,00	0,00
	- Bagian Hukum	13.832.500,00	13.832.500,00	0,00
	- Bagian Perekonomian dan Pembangunan	125.174.500,00	125.174.500,00	0,00
	- Bagian Layanan Pengadaan	79.460.000,00	79.460.000,00	0,00
	- Bagian Organisasi	520.641.000,00	520.641.000,00	0,00
18	Sekretariat DPRD	247.800.000,00	247.800.000,00	0,00
19	Inspektorat	36.541.750,00	36.541.750,00	0,00
20	Bappeda	286.580.000,00	286.580.000,00	0,00
21	BPKAD	590.330.500,00	590.330.500,00	0,00
22	Badan Pendapatan Daerah	1.787.282.000,00	1.787.282.000,00	0,00
23	BKPSDM	496.200.000,00	496.200.000,00	0,00
24	Kecamatan Wlingi	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00
25	Kecamatan Sutojayan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
26	Kecamatan Wates	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
27	Kecamatan Srengat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
	TOTAL	8.266.639.645,64	7.376.410.645,64	12,07

Nilai Aset Tidak Berwujud tidak dilakukan amortisasi karena termasuk kriteria Aset Tidak Berwujud yang memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas sehingga tidak dilakukan amortisasi, sebagaimana dalam Perbup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2014.

	<u>31 Desember 2019 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2018 (Rp)</u>
3. Aset Lain-lain	47.479.012.316,14	47.578.692.512,48

Saldo Aset Lain-Lain merupakan aset dihibahkan dan aset rusak per 31 Desember 2019 sebesar Rp47.479.012.316,14 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Awal **Rp 47.578.692.512,48**

Penambahan Aset

a) Belanja Pegawai	Rp	0,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
c) Belanja Modal	Rp	0,00
d) Koreksi	Rp	(4.976.799.575,34)
e) Reklasifikasi	Rp	5.705.651.659,00
f) Mutasi antar SKPD	Rp	0,00
g) Hibah	Rp	0,00
Jumlah Penambahan Aset		Rp 728.852.083,66

Pengurangan Aset

a) Penghapusan	Rp	(828.532.280,00)
b) Hibah	Rp	0,00
c) Koreksi	Rp	0,00
d) Reklasifikasi	Rp	0,00
e) Mutasi antar SKPD	Rp	0,00
f) Ekstrakomtabel	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan Aset		Rp (828.532.280,00)

Saldo Akhir **Rp 47.479.012.316,14**

a. Mutasi Tambah sebesar Rp728.852.083,66 terdiri atas koreksi sebesar Rp(4.976.799.573,34) dan Reklasifikasi sebesar Rp5.705.651.659,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Penambahan dari koreksi sebesar Rp(4.976.799.575,34) dengan rincian sebagai berikut :

1	Dinas Kesehatan	Rp	498.378.378,00
2	RSUD	Rp	(5.123.176.634,67)
3	BPBD	Rp	(125.577.381,00)
4	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp	(45.916.666,67)
5	Dinas Peternakan dan perikanan	Rp	(18.403.041,67)
6	Dinas Perndag	Rp	(13.100.000,00)
7	BKPSDM	Rp	(27.293.333,33)
8	Kecamatan Doko	Rp	(10.290.000,00)
9	Kecamatan Kanigoro	Rp	(49.576.546,00)
10	Kecamatan Binangun	Rp	(2.598.750,00)
11	Kecamatan Ponggok	Rp	(59.245.600,00)
Jumlah Koreksi		Rp	(4.976.799.575,34)



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Koreksi tambah Dinas kesehatan sebesar Rp498.378.378,00 merupakan koreksi tambah dari Persediaan obat-obatan (obat *expired*) ke Aset Lain-Lain .
2. Koreksi tambah RSUD sebesar Rp(5.123.176.634,67) terdiri atas Akumulasi Penyusutan atas perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (karena rusak berat) sebesar Rp(301.785.766,67) sesuai BA Ubah Kondisi Nomor 900/002/BA-UK/2019 tanggal 27 Maret 2019 dan Akumulasi Penyusutan atas perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (karena rusak berat) sebesar Rp(4.821.390.86,00) sesuai BA Ubah Kondisi Nomor 900/0/BA-UK/2019 tanggal 23 September 2019.
3. Koreksi tambah BPBD sebesar Rp(125.577.381,00) merupakan Akumulasi Penyusutan perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (Kendaraan) sesuai BA Nomor 900/014/2019 tanggal 16 Desember 2019.
4. Koreksi tambah Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp(45.916.666,67) merupakan Akumulasi Penyusutan atas perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (karena rusak berat) BA Ubah Kondisi Nomor 900/005/BA-UK/2019 tanggal 1 Agustus 2019.
5. Koreksi tambah Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp(18.403.041,67) merupakan Akumulasi Penyusutan atas perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (karena rusak berat) BA Ubah Kondisi Nomor 900/008/BA-UK/2019 tanggal 3 September 2019.
6. Koreksi tambah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp(13.100.000,00) merupakan Akumulasi Penyusutan atas Perubahan Kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-lain (karena rusak berat) BA Ubah Kondisi Nomor 900/006/BA-UK/2019 tanggal 6 Agustus 2019.
7. Koreksi tambah BKPSDM sebesar Rp(27.293.333,33) Akumulasi Penyusutan atas perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (karena rusak berat) BA Ubah Kondisi Nomor 900/010/BA-UK/2019 tanggal 23 September 2019.
8. Koreksi tambah Kecamatan Doko sebesar Rp(10.290.000,00) merupakan Akumulasi Penyusutan perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (karena rusak berat) sesuai BA Ubah Kondisi Nomor 900/.../BA-UK/2019.
9. Koreksi tambah Kecamatan Kanigoro sebesar Rp(49.576.546,00) terdiri atas Akumulasi Penyusutan perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (kendaraan hilang) sebesar Rp(9.850.000,00) sesuai BA Nomor 900/015/BA-UK/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan Akumulasi Penyusutan Gedung Rumah Negara Gol III yang diubah kondisi menjadi Aset Lain-Lain sebesar Rp(39.726.546,00) Sesuai BAR ASET SMT II 2019.
10. Koreksi tambah Kecamatan Binangun sebesar Rp(2.598.750,00) merupakan Akumulasi Penyusutan perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (laptop hilang) sesuai BA Nomor 900/016/BA-UK/2019 tanggal 16 Desember 2019.
11. Koreksi tambah Kecamatan Ponggok sebesar Rp(59.245.600,00) merupakan Akumulasi Penyusutan perubahan kondisi Aset Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

menjadi aset Lain-Lain (karena rusak berat) sesuai BA Ubah Kondisi Nomor 900/003/BA-UK/2019.

- Penambahan dari reklasifikasi sebesar Rp5.705.651.659,00 dengan rincian sebagai berikut :

1	RSUD	Rp	5.290.065.809,00
2	BPBD	Rp	144.500.000,00
3	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp	46.387.500,00
4	Dinas Peternakan dan perikanan	Rp	26.278.250,00
5	Dinas Perindag	Rp	13.100.000,00
6	BKPSDM	Rp	27.432.000,00
7	Kecamatan Doko	Rp	10.290.000,00
8	Kecamatan Kanigoro	Rp	79.342.500,00
9	Kecamatan Binangun	Rp	8.910.000,00
10	Kecamatan Ponggok	Rp	59.345.600,00
Jumlah Reklasifikasi		Rp	5.705.651.659,00

1. Reklasifikasi tambah RSUD sebesar Rp5.290.065.809,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain karena rusak berat sesuai dengan SK Bupati Nomor 900/002/BA-UK/2019 tanggal 27 Maret 2019 dan SK Bupati Nomor 900/009/BA-UK/2019.
2. Reklasifikasi tambah BPBD sebesar Rp144.500.000,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap yang hilang menjadi Aset Lain-Lain sesuai dengan BA Nomor 900/014/2019 tanggal 16 Desember 2019.
3. Reklasifikasi tambah Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp46.387.500,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain BA Ubah Kondisi Nomor 900/005/BA-UK/2019.
4. Reklasifikasi tambah Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp26.278.250,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain sesuai dengan BA Ubah Kondisi Nomor 900/008/2019 tanggal 3 September 2019.
5. Reklasifikasi tambah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp13.100.000,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain sesuai dengan BA Ubah Kondisi Nomor 900/006/2019 tanggal 6 Agustus 2019.
6. Reklasifikasi tambah BKPSDM sebesar Rp27.432.000,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain sesuai dengan BA Ubah Kondisi Nomor 900/010/2019.
7. Reklasifikasi tambah Kecamatan Doko sebesar Rp10.290.000,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain sesuai dengan BA Ubah Kondisi Nomor 900/0/2019.
8. Reklasifikasi tambah Kecamatan Kanigoro sebesar Rp79.342.500,00 terdiri atas ubah kondisi Aset Tetap hilang menjadi Aset Lain-Lain sebesar Rp9.850.000,00 sesuai dengan BA Ubah Kondisi Nomor 900/015/BA-UK/2019 dan aset gedung rumah Negara gol III yang diubah kondisi menjadi aset lain-lain sebesar Rp69.492.500,00 sesuai dengan BAR ASET SMT II 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

9. Reklasifikasi tambah Kecamatan Binangun sebesar Rp8.910.000,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap hilang menjadi Aset Lain-Lain sesuai dengan BA Ubah Kondisi Nomor 900/016/BA-UK/2019 tanggal 16 Desember 2019.
10. Reklasifikasi tambah Kecamatan Ponggok sebesar Rp59.345.600,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap hilang menjadi Aset Lain-Lain sesuai dengan BA Ubah Kondisi Nomor 900/003/BA-UK/2019.

b. Penghapusan sebesar Rp828.532.280,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1	RSUD	Rp	166.889.174,33
2	BPBD	Rp	17.205.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	36.721.800,00
4	Dinas Kependudukan dan Capil	Rp	177.481.843,34
5	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp	470.833,33
6	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp	7.995.208,33
7	Dinas Perindag	Rp	53.018.800,00
8	BKPSDM	Rp	268.986.666,67
9	Kecamatan Kanigoro	Rp	29.765.954,00
10	Kecamatan Binangun	Rp	1.510.000,00
11	Kecamatan Wates	Rp	68.387.000,00
12	Kecamatan Ponggok	Rp	100.000,00
Jumlah Penghapusan		Rp	828.532.280,00

Mutasi Aset Lain-Lain (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada **Lampiran 48**: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Aset Lain-Lain Tahun 2018 dan **Lampiran 49**: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain per Rincian Obyek Rekening Tahun 2018.

Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.266.639.645,64 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 69 Rincian Aset Lain-Lain masing-masing SKPD
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/Turun %
1	Dinas Pendidikan	39.998.987.502,16	39.998.987.502,16	-
2	Dinas Kesehatan			
	-Dinas Kesehatan Murni	510.388.378,00	21.693.366,00	2.252,74
	-Puskesmas Selopuro	20,00	0,00	-
	-Puskesmas Boro	1.143.325,00	0,00	-
	-Puskesmas Doko	5.140.021,00	0,00	-
	-Puskesmas Sanankulon	900.000,00	0,00	-
	-Puskesmas Udanawu	2.500.000,00	0,00	-
3	RSUD	3.251.826.930,00	3.251.826.930,00	-
4	Dinas PU Dan Penataan Ruang	442.718.000,00	442.718.000,00	-
5	Dinas Perumahan dan KP	377.441.347,00	377.441.347,00	-
6	Badan Kesbangpol	67.248.000,00	67.248.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Naik/Turun %
7	BPBD	57.050.419,00	55.332.800,00	3,10
8	Dinas Sosial	1.250.000,00	1.250.000,00	-
9	Dinas Nakertrans	0,00	36.721.800,00	(100,00)
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB	27.300.062,40	27.300.062,40	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	50.000.000,00	50.000.000,00	-
12	Dinas Kependudukan dan Capil	3.840.000,00	181.321.843,34	(97,88)
13	Dinas Koperasi dan UMKM	0,00	0,00	-
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	179.193.125,00	179.193.125,00	-
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.840.000,00	1.840.000,00	-
16	Disparbudpora	7.600.000,00	7.600.000,00	-
17	Dinas Pertanian Dan Pangan	616.171.661,08	616.171.661,08	-
18	Dinas Peternakan Dan Perikanan	42.876.500,00	42.996.500,00	(0,28)
19	Disperindag	0,00	53.018.800,00	(100)
20	Sekretariat Daerah			
	- Bagian Pemerintahan	29.450.000,00	29.450.000,00	-
	- Bagian Umum	360.419.700,00	360.419.700,00	-
	- Bagian Humas dan Protokol	1.575.000,00	1.575.000,00	-
21	Sekretariat DPRD	22.804.000,00	22.804.000,00	-
22	Inspektorat	0,00	0,00	-
23	Bappeda	0,00	0,00	-
24	BPKAD	887.933.903,00	887.933.903,00	-
25	Badan Pendapatan Daerah	6.410.300,00	6.410.300,00	-
26	BKPDM	1.220.000,00	270.068.000,00	(99,55)
27	Kecamatan Selopuro	10.070.000,00	10.070.000,00	-
28	Kecamatan Wlingi	241.340.480,00	241.340.480,00	-
29	Kecamatan Talun	70.056.000,00	70.056.000,00	-
30	Kecamatan Gandusari	0,00	0,00	-
31	Kecamatan Doko	0,00	0,00	-
32	Kecamatan Garum	3.578.000,00	3.578.000,00	-
33	Kecamatan Kanigoro	24.786.400,00	24.786.400,00	-
34	Kecamatan Sutojayan	15.056.480,00	15.056.480,00	-
35	Kecamatan Binangun	6.311.250,00	1.510.000,00	317,96
36	Kecamatan Wates	0,00	68.387.000,00	(100)
37	Kecamatan Panggungrejo	0,00	0,00	-
38	Kecamatan Wonotirto	210.000,00	210.000,00	-
39	Kecamatan Bakung	47.537.500,00	47.537.500,00	-
40	Kecamatan Kademangan	31.070.000,00	31.070.000,00	-
41	Kecamatan Sanankulon	0,00	0,00	-
42	Kecamatan Srengat	37.097.437,50	37.097.437,50	-
43	Kecamatan Wonodadi	12.835.575,00	12.835.575,00	-
44	Kecamatan Udanawu	6.580.000,00	6.580.000,00	-
45	Kecamatan Ponggok	0,00	0,00	-
46	Kecamatan Selorejo	17.255.000,00	17.255.000,00	-
47	Kecamatan Kesamben	0,00	0,00	-
	TOTAL	47.479.012.316,14	47.578.692.512,48	(0,21)

Aset Lain-Lain sebesar Rp47.479.012.316,14 terdiri dari aset dihibahkan sebesar Rp12.284.515.948,60 dan aset rusak sebesar Rp36.830.188.954,63 serta Akumulasi Aset Lain-Lain sebesar Rp(1.635.692.587,09) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 70 Rincian Kondisi Aset Lain-Lain masing-masing SKPD
Per 31 Desember 2019**

No.	SKPD	Hibah (Rp)	Rusak (Rp)	Akumulasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	12.075.413.848,60	28.883.630.188,45	(960.056.534,89)	39.998.987.502,16



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Hibah (Rp)	Rusak (Rp)	Akumulasi (Rp)	Jumlah (Rp)
2	Dinas Kesehatan	0,00	510.388.378,00	0,00	510.388.378,00
	-Puskesmas Selopuro	0,00	20,00	0,00	20,00
	-Puskesmas Boro	0,00	1.143.325,00	0,00	1.143.325,00
	-Puskesmas Doko	0,00	5.140.021,00	0,00	5.140.021,00
	-Puskesmas Sanankulon	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	-Udanawu	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3	RSUD	0,00	3.723.448.080,00	(471.621.150,00)	3.251.826.930,00
4	Dinas PU Dan Penataan Ruang	0,00	442.718.000,00	0,00	442.718.000,00
5	Dinas Perumahan dan KP	0,00	377.441.347,00	0,00	377.441.347,00
6	Badan Kesbangpol	0,00	67.248.000,00	0,00	67.248.000,00
7	BPBD	0,00	182.627.800,00	(125.577.381,00)	57.050.419,00
8	Dinas Sosial	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
9	Dinas Nakertrans	0,00	0,00	0,00	-
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB	0,00	27.300.062,40	0,00	27.300.062,40
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Capil	0,00	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00
13	Dinas Koperasi dan UMKM	0,00	0,00	0,00	-
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	179.193.125,00	0,00	179.193.125,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
16	Disparbudpora	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
17	Dinas Pertanian Dan Pangan	209.102.100,00	407.069.561,08	0,00	616.171.661,08
18	Dinas Peternakan Dan Perikanan	0,00	42.876.500,00	0,00	42.876.500,00
19	Disperindag	0,00	0,00	0,00	-
20	Sekretariat Daerah				
	- Bagian Pemerintahan	0,00	29.450.000,00	0,00	29.450.000,00
	- Bagian Umum	0,00	360.419.700,00	0,00	360.419.700,00
	- Bagian Perlengkapan	0,00	75.838.771,2	(75.838.771,20)	-
	- Bagian Humas dan Protokol	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
21	Sekretariat DPRD	0,00	22.804.000,00	0,00	22.804.000,00
22	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	-
23	Bappeda	0,00	0,00	0,00	-
24	BPKAD	0,00	887.933.903,00	0,00	887.933.903,00
25	Badan Pendapatan Daerah	0,00	6.410.300,00	0,00	6.410.300,00
26	BKPSDM	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
27	Kecamatan Selopuro	0,00	10.070.000,00	0,00	10.070.000,00
28	Kecamatan Wlingi	0,00	241.340.480,00	0,00	241.340.480,00
29	Kecamatan Talun	0,00	70.056.000,00	0,00	70.056.000,00
30	Kecamatan Doko	0,00	0,00	0,00	-
31	Kecamatan Garum	0,00	3.578.000,00	0,00	3.578.000,00
32	Kecamatan Kanigoro	0,00	24.786.400,00	0,00	24.786.400,00
33	Kecamatan Sutojayan	0,00	15.056.480,00	0,00	15.056.480,00
34	Kecamatan Binangun	0,00	8.910.000,00	(2.598.750,00)	6.311.250,00
35	Kecamatan Wates	0,00	0,00	0,00	-
36	Kecamatan Panggungrejo	0,00	0,00	0,00	-
37	Kecamatan Wonotirto	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
38	Kecamatan Bakung	0,00	47.537.500,00	0,00	47.537.500,00
39	Kecamatan Kademangan	0,00	31.070.000,00	0,00	31.070.000,00
40	Kecamatan Sanankulon	0,00	0,00	0,00	-
41	Kecamatan Srengat	0,00	37.097.437,50	0,00	37.097.437,50



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Hibah (Rp)	Rusak (Rp)	Akumulasi (Rp)	Jumlah (Rp)
42	Kecamatan Wonodadi	0,00	12.835.575,00	0,00	12.835.575,00
43	Kecamatan Udanawu	0,00	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
44	Kecamatan Selorejo	0,00	17.255.000,00	0,00	17.255.000,00
	TOTAL	12.284.515.948,60	36.830.188.954,63	(1.635.692.587,09)	47.479.012.316,14

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
5.3.2 Kewajiban	35.650.690.466,09	17.761.295.977,75

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp35.650.690.466,09 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1. Kewajiban Jangka Pendek	35.650.690.466,09	17.761.295.977,75

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu Tahun. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp35.650.690.466,09 dan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp17.761.295.977,75. Jumlah Utang Jangka Pendek tersebut merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

a. Utang PFK sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 71 Rincian Utang PFK per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1)	Kec. Selopuro	0,00	672.000,00
2)	Kec. Gandusari	0,00	108.563,00
3)	Kec. Selorejo	0,00	545.500,00
	Jumlah Utang	0,00	1.326.063,00

Utang Jangka Pendek merupakan Utang Penerimaan PFK yang sampai saat penyusunan Laporan Keuangan belum disetorkan ke kas negara.

b. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp192.394.615,84 merupakan pendapatan dari Pendapatan Retribusi Daerah yang dibayar dimuka dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 72 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019

No	Uraian	2019 (Rp)
1)	Dinas Peternakan dan Perikanan	17.131.666,67
2)	BPKAD	175.262.949,17
	Jumlah Utang Beban	192.394.615,84

Untuk perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka pada **Lampiran 50**.

c. Utang Belanja sebesar Rp25.255.571.570,25 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 73 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2019

No	Uraian	2019 (Rp)
1)	Utang Belanja Pegawai	7.238.338.724,00
2)	Utang Belanja Barang dan Jasa	12.481.171.725,25
3)	Utang Belanja Transfer	5.536.060.921,00
	Jumlah Utang Belanja	25.255.571.370,25



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Utang Belanja Pegawai merupakan sebesar Rp7.238.338.724,00 merupakan Utang Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai/TPP bulan Desember 2019 yang harus dibayar tahun 2020 sebesar Rp6.887.713.724,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 74 Rincian Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2019

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	609.976.354,00
2	DINAS KESEHATAN	240.683.414,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	222.996.393,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	139.998.554,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	157.954.069,00
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	87.807.645,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	81.043.569,00
8	DINAS SOSIAL	119.682.307,00
9	DINAS TENAGA KERJA	99.765.233,00
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	105.982.671,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	145.289.183,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	118.877.937,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	101.868.359,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	130.959.359,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	90.752.842,00
16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	96.649.397,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	110.963.969,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	79.300.335,00
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	137.395.648,00
20	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	596.726.644,00
21	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	211.039.654,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	163.225.844,00
23	BAGIAN UMUM	404.818.088,00
24	SEKRETARIAT DPRD	158.291.615,00
25	KECAMATAN SELOPURO	49.148.883,00
26	KECAMATAN WLINGI	145.664.135,00
27	KECAMATAN TALUN	121.870.002,00
28	KECAMATAN GANDUSARI	52.915.511,00
29	KECAMATAN DOKO	57.948.090,00
30	KECAMATAN GARUM	123.386.131,00
31	KECAMATAN KANIGORO	86.978.595,00
32	KECAMATAN SUTOJAYAN	183.330.803,00
33	KECAMATAN BINANGUN	54.915.917,00
34	KECAMATAN WATES	51.135.840,00
35	KECAMATAN PANGGUNGREJO	42.010.560,00
36	KECAMATAN WONOTIRTO	43.525.887,00
37	KECAMATAN BAKUNG	53.568.662,00
38	KECAMATAN KADEMANGAN	74.740.991,00
39	KECAMATAN SANANKULON	49.579.071,00
40	KECAMATAN SRENGAT	128.808.393,00
41	KECAMATAN WONODADI	57.051.058,00
42	KECAMATAN UDANAWU	51.499.780,00
43	KECAMATAN PONGGOK	60.727.259,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Nilai (Rp)
44	KECAMATAN NGLEGOK	70.139.976,00
45	KECAMATAN SELOREJO	43.975.217,00
46	KECAMATAN KESAMBEN	51.141.041,00
47	INSPEKTORAT DAERAH	219.663.694,00
48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	130.896.253,00
49	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	168.322.896,00
50	BADAN PENDAPATAN DAERAH	141.149.944,00
51	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	161.570.052,00
TOTAL		6.887.713.724,00

Dan Utang Belanja Pegawai Insentif Pemungutan PBB-P2 Triwulan IV Tahun 2019 pada Bapenda yang dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp350.625.000,00.

Sedangkan perincian Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp12.481.171.725,25 sebagai berikut :

Tabel 75 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2019

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	17.560.596,00
2	DINAS KESEHATAN	255.924.303,00
3	PUSKESMAS BAKUNG	1.069.728,00
4	PUSKESMAS WONOTIRTO	35.720.260,00
5	PUSKESMAS MARGOMULYO	50.631.067,00
6	PUSKESMAS WATES	67.244.739,00
7	PUSKESMAS BINANGUN	59.581.500,00
8	PUSKESMAS SUTOJAYAN	78.152.606,00
9	PUSKESMAS KADEMANGAN	106.879.446,00
10	PUSKESMAS KANIGORO	93.658.895,00
11	PUSKESMAS TALUN	79.258.397,00
12	PUSKESMAS SELOPURO	67.410.651,00
13	PUSKESMAS KESAMBEN	175.764.064,00
14	PUSKESMAS BORO	56.872.651,00
15	PUSKESMAS DOKO	76.356.294,00
16	PUSKESMAS WLINGI	74.623.964,00
17	PUSKESMAS GANDUSARI	223.896.730,00
18	PUSKESMAS SLUMBUNG	30.156.980,00
19	PUSKESMAS GARUM	74.493.263,25
20	PUSKESMAS NGLEGOK	248.907.285,00
21	PUSKESMAS SANANKULON	22.615.898,00
22	PUSKESMAS PONGGOK	115.093.580,00
23	PUSKESMAS BACEM	56.704.760,00
24	PUSKESMAS SRENGAT	138.417.886,00
25	PUSKESMAS WONODADI	69.377.070,00
26	PUSKESMAS UDANAWU	59.131.517,00
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7.843.890.870,00
28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.023.621,00
29	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.060.483,00
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	102.591,00
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.138.600,00
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.515.497,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Nilai (Rp)
33	DINAS SOSIAL	3.934.868,00
34	DINAS TENAGA KERJA	3.195.800,00
35	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.655.684,00
36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	56.854.906,00
37	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.743.179,00
38	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.067.535,00
39	DINAS PERHUBUNGAN	9.884.519,00
40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	269.102,00
41	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	4.460.508,00
42	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.819.625,00
43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	4.523.446,00
44	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	18.676.229,00
45	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	292.655,00
46	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	13.746.960,00
47	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.505.891,00
48	BAGIAN UMUM	113.280.238,00
49	SEKRETARIAT DPRD	25.069.243,00
50	KECAMATAN SELOPURO	566.766,00
51	KECAMATAN WLINGI	3.824.140,00
52	KECAMATAN TALUN	4.931.705,00
53	KECAMATAN GANDUSARI	735.005,00
54	KECAMATAN DOKO	552.536,00
55	KECAMATAN GARUM	1.071.390,00
56	KECAMATAN KANIGORO	1.615.221,00
57	KECAMATAN SUTOJAYAN	3.620.197,00
58	KECAMATAN BINANGUN	483.184,00
59	KECAMATAN WATES	370.986,00
60	KECAMATAN PANGGUNGREJO	1.129.669,00
61	KECAMATAN WONOTIRTO	442.000,00
62	KECAMATAN BAKUNG	466.108,00
63	KECAMATAN KADEMANGAN	36.500,00
64	KECAMATAN SANANKULON	1.034.550,00
65	KECAMATAN SRENGAT	2.132.061,00
66	KECAMATAN WONODADI	1.738.158,00
67	KECAMATAN UDANAWU	353.966,00
68	KECAMATAN PONGGOK	757.946,00
69	KECAMATAN NGLEGOK	1.039.154,00
70	KECAMATAN SELOREJO	715.991,00
71	KECAMATAN KESAMBEN	1.066.051,00
72	INSPEKTORAT DAERAH	424.509,00
73	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	193.110,00
74	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	5.842.533,00
75	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.948.365.189,00
76	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.446.920,00
TOTAL		12.481.171.725,25

Sedangkan Utang Belanja Transfer sebesar Rp5.536.060.921,00 dengan perincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 76 Rincian Utang Belanja Transfer per 31 Desember 2019

No	Uraian	Nilai (Rp)
1)	Utang Bagi Hasil Retribusi ke Propinsi Jawa Timur	295.399.000,00
2)	Utang Bagi Hasil Retribusi ke Polres	125.985.176,00
3)	Utang Bagi Hasil Pajak Ke Desa	4.039.468.633,00
4)	Utang Bagi Hasil Retribusi ke Desa	1.075.208.111,00
Jumlah Utang Belanja Transfer		5.536.060.921,00

Untuk perhitungan kurang bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa pada **Lampiran 20**.

- d. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp10.202.724.480,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 77 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019

No	Uraian	2019 (Rp)
1)	Utang Jangka Pendek Lainnya pada BPKAD (PPKD)	10.066.966.799,00
2)	Utang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD (Utang Pengadaan Aset Tetap BLUD Alat Kedokteran Umum)	52.762.681,00
3)	Utang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.975.000,00
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya		10.202.724.480,00

Utang Jangka Pendek Lainnya pada BPKAD sebesar Rp10.066.966.799,00 terdiri dari Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp71.923.750,00 dan Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil sebesar Rp9.995.043.049,00, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 78 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada BPKAD per 31 Desember 2019

Tabel Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - JALIN MATRA yang harus dikembalikan ke Provinsi Jawa Timur	715.000,00
2	Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - TMMD 2019 yang harus dikembalikan ke Provinsi Jawa Timur	560.000,00
3	Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - Bantuan Operasional Kesehatan untuk Pendampingan Poskestren 2019 yang harus dikembalikan ke Provinsi Jawa Timur	5.250.000,00
4	Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - Bantuan Operasional Kesehatan untuk Pengembangan Taman Posyandu 2019 yang harus dikembalikan ke Provinsi Jawa Timur	6.200.000,00
5	Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - Hari Aksara TA 2019 yang harus dikembalikan ke Provinsi Jawa Timur	250.000,00
6	Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - Honor kinerja guru non PNS Jenjang pendidikan SD TA 2019	9.000.000,00
7	Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - honorarium Kinerja guru Non PNS jenjang pendidikan SMP TA 2019	24.000.000,00
8	Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - BOP Madin TA 2019	348.750,00
9	Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - honorarium guru Non PNS jenjang pendidikan TK TA 2019	25.000.000,00
10	Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - Honorarium Kinerja Kepala/guru TK/PAUD Non PNS TA 2019	600.000,00
TOTAL		71.923.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil

No	Rekening	NILAI	DASAR
1	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil PPH PASAL 25/29 s.d Tahun 2017	2.863.477.130,00	PMK No. 140/PMK.07/2019
2	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan s.dTahun 2017 (Bagian Daerah)	294.511.764,00	PMK No. 140/PMK.07/2019
3	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan s.dTahun 2017 (Biaya Pemungutan)	12.271.288,00	PMK No. 140/PMK.07/2019
4	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil CHT s.d Tahun 2017	412.224.601,00	PMK No. 140/PMK.07/2019
5	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi 15% s.d Tahun 2017	5.963.326.270,00	PMK No. 140/PMK.07/2019
6	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi 0,5% s.d Tahun 2017	236.282.127,00	PMK No. 140/PMK.07/2019
7	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi 30% s.d Tahun 2017	418.466,00	PMK No. 140/PMK.07/2019
8	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi 0,5% s.d Tahun 2017	6.850,00	PMK No. 140/PMK.07/2019
9	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil PPH PASAL 21 Tahun 2018	179.202.321,00	PMK No. 140/PMK.07/2019
10	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 (Sektor Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya)	365.314,00	PMK No. 140/PMK.07/2019
11	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 (Sektor Biaya Pemungutan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya)	12.684,00	PMK No. 140/PMK.07/2019
12	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan Tahun 2018	32.076.558,00	PMK No. 140/PMK.07/2019
13	Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi Tahun 2018	867.676,00	PMK No. 140/PMK.07/2019
Total		9.995.043.049,00	

	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>
2. Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>
5.3.3 Ekuitas	4.412.630.524.904,00	4.021.633.372.273,75

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blitar. Ekuitas Dana per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.412.630.524.904,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2019 yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional.

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.4.1 Pendapatan- LO	2.424.893.949.744,58	2.336.181.236.037,51

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

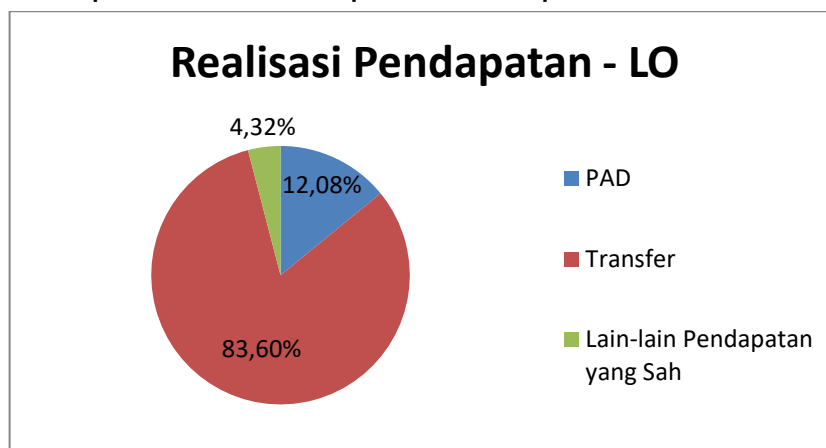
Pendapatan-LO Kabupaten Blitar adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.424.893.949.744,58 lebih besar Rp88.712.713.707,07 atau 3,80 % dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp2.336.181.236.037,51, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 79 Saldo Pendapatan – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Pendapatan – LO	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah– LO	292.892.000.319,87	248.785.055.924,69
2.	Pendapatan Transfer– LO	2.027.144.623.372,00	1.982.267.323.937,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	104.857.326.052,71	105.128.856.175,82
	Jumlah	2.424.893.949.744,58	2.336.181.236.037,51

Komposisi Realisasi Pendapatan-LO Kabupaten Blitar sebagaimana tergambar pada diagram berikut.

Gambar 1
Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Kabupaten Blitar Tahun 2019



	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO	292.892.000.319,87	248.785.055.924,69

Pendapatan Asli Daerah - LO Kabupaten Blitar adalah Pendapatan Asli Daerah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp292.892.000.319,87, lebih besar Rp44.106.944.395,18 atau 17,73% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp248.785.055.924,69 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 80 Saldo Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pajak Daerah -LO	99.472.196.109,31	92.333.308.250,80	7,73
2	Retribusi Daerah -LO	19.436.803.123,67	23.103.678.847,17	(15,87)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.492.692.402,00	14.399.000,00	3.990,33
4	Lain Lain PAD yang Sah- LO	171.490.308.684,89	133.333.669.826,72	28,62
Jumlah		292.892.000.319,87	248.785.055.924,69	16,96

1. Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2019 sebesar Rp99.472.196.109,31 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 81 Saldo Rincian Pajak Daerah-LO Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Pajak Hotel-LO	101.310.000,00	91.305.000,00	10,96
2.	Pajak Restoran-LO	3.991.530.185,95	3.259.845.500,45	22,45
3.	Pajak Hiburan-LO	1.104.869.654,00	875.764.350,00	26,16
4.	Pajak Reklame-LO	769.893.712,19	735.747.190,70	4,64
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	40.658.909.358,00	38.333.111.437,00	6,07
6.	Pajak Parkir-LO	130.983.100,00	123.550.000,00	6,02
7.	Pajak Air Tanah-LO	140.166.778,76	136.169.039,65	2,94
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	308.872.500,00	290.967.250,00	6,15
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	30.724.669.121,00	32.118.512.497,00	(4,34)
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	21.540.991.699,41	16.368.335.986,00	31,60
Jumlah		99.472.196.109,31	92.333.308.250,80	7,73

a. Pajak Hotel-LO

Pajak Hotel-LO pada tahun 2019 sebesar Rp101.310.000,00 terdiri dari:

Tabel 82 Saldo Rincian Pajak Hotel – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Hotel - LO	51.200.000,00	51.050.000,00	0,29
2	Losmen-LO	50.110.000,00	40.255.000,00	24,48
Jumlah		101.310.000,00	91.305.000,00	10,96

Pendapatan Pajak Hotel-LO mengalami kenaikan sebesar Rp10.035.000,00 atau 10,96% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp91.305.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

b. Pajak Restoran-LO

Pajak Restoran-LO pada tahun 2019 sebesar Rp3.991.530.185,95 terdiri dari:

Tabel 83 Saldo Rincian Pajak Restoran – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Rumah Makan - LO	166.075.045,90	194.812.691,30	(14,75)
2	Kafetaria - LO	13.735.000,00	13.730.000,00	0,04
3	Kantin - LO	13.495.000,00	18.505.000,00	(27,07)
4	Jasa Boga/Katering - LO	3.798.225.140,05	3.032.797.809,15	25,24
Jumlah		3.991.530.185,95	3.259.845.500,45	22,45

Pendapatan Pajak Restoran-LO mengalami kenaikan sebesar Rp731.684.685,50 atau 22,45% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp3.259.845.500,45.

c. Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO pada tahun 2019 sebesar Rp1.104.869.654,00 terdiri dari:

Tabel 84 Saldo Rincian Pajak Hiburan – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	1.094.869.654,00	857.114.350,00	27,74
2	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	5.000.000,00	12.400.000,00	(59,68)
3	Pertandingan Olahraga - LO	5.000.000,00	6.250.000,00	(20,00)
Jumlah		1.104.869.654,00	875.764.350,00	26,16

Pendapatan Pajak Hiburan-LO mengalami kenaikan sebesar Rp229.105.304,00 atau 26,16% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp875.764.350,00.

d. Pajak Reklame-LO

Pajak Reklame-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp769.893.712,19 terdiri dari:

Tabel 85 Saldo Rincian Pajak Reklame – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	584.412.931,19	558.642.670,70	4,61
2	Pajak Reklame Kain - LO	146.825.781,00	134.004.520,00	9,57
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO	38.655.000,00	43.100.000,00	(10,31)
Jumlah		769.893.712,19	735.747.190,70	4,64

Pendapatan Pajak Reklame-LO mengalami kenaikan sebesar Rp34.146.521,49 atau 4,64% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp735.747.190,70.

e. Pajak Penerangan Jalan-LO

Pajak Penerangan Jalan-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp40.658.909.358,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.325.797.921,00 atau 6,07% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp38.333.111.437,00.

f. Pajak Parkir-LO

Pajak Parkir-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp130.983.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.433.100,00 atau 6,02% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp123.550.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

g. Pajak Air Tanah-LO

Pajak Air Tanah-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp140.166.778,76 mengalami kenaikan sebesar Rp3.997.739,11 atau 2,94% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp136.169.039,65.

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp308.872.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.905.250,00 atau 6,15% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp290.967.250,00.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp30.724.669.121,00 mengalami penurunan sebesar Rp(1.393.843.376,00) atau (4,34)% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp32.118.512.497,00.

j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp21.540.991.699,41 mengalami kenaikan sebesar Rp5.172.655.713,41 atau 31,60 % jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp16.368.335.986,00.

2. Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2019 sebesar Rp19.436.803.123,67 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86 Saldo Rincian Retribusi Daerah – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	30.670.000,00	2.009.731.000,00	(98,47)
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	286.814.000,00	253.368.800,00	13,20
c.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -LO	8.198.350.000,00	7.883.480.000,00	3,99
d.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	4.071.270.000,00	3.888.899.000,00	4,69
e.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	1.104.870.000,00	1.086.955.000,00	1,65
f.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	177.677.900,00	134.272.700,00	32,33
g.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	686.136.540,00	658.114.120,00	4,26
h.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LO	776.491.906,67	3.387.968.892,17	(77,08)
i.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan-LO	0,00	1.800.000,00	100
j.	Retribusi Terminal-LO	106.062.000,00	99.354.000,00	6,75
k.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa-LO	17.500.000,00	21.250.000,00	(17,65)
l.	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	93.070.000,00	96.280.000,00	(3,33)
m.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-LO	2.658.191.000,00	2.443.027.000,00	8,81
n.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	75.150.000,00	73.370.000,00	2,43
o.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.154.351.777,00	1.064.968.335,00	8,39
p.	Retribusi Izin Trayek-LO	198.000,00	840.000,00	(76,43)
Jumlah		19.436.803.123,67	23.103.678.847,17	(15,87)



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2019 sebesar Rp2.492.692.402,00 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87 Saldo Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a.	PT. BPD Jatim	1.903.726.239,00	0,00	100,00
b.	PT. BPR Jatim	2.150.000,00	1.899.000,00	13,22
c.	PD. Savitri Indah	20.500.000,00	12.500.000,00	64,00
d.	PT. BPR HAS	566.316.163,00	0,00	100,00
Jumlah		2.492.692.402,00	14.399.000,00	3.990,33

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2019 sebesar Rp171.490.308.684,89 yaitu dengan rincian sebagai berikut

Tabel 88 Saldo Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO	121.186.628,00	115.203.800,00	5,19
b.	Penerimaan Jasa Giro-LO	2.061.744.539,18	2.219.136.952,55	(7,09)
c.	Pendapatan Bunga-LO	18.823.525.048,00	15.448.343.270,39	21,85
d.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO	285.697.975,00	216.896.364,00	31,72
e.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.296.390.520,42	960.619.733,94	34,95
f.	Pendapatan Denda Pajak-LO	425.684.842,45	767.798.775,31	(44,56)
g.	Pendapatan Denda Retribusi-LO	30.185.500,00	25.258.900,00	19,50
h.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.399.326.730,56	3.356.275.395,27	(58,31)
i.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	2.522.190.326,66	0,00	100,00
j.	Pendapatan BLUD-LO	142.985.435.084,46	80.947.056.070,72	76,64
k.	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya-LO	1.107.161.612,83	1.779.285.333,54	(37,77)
l.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum-LO	34.915.833,33	1.207.500,00	2.791,58
m.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LO	0,00	27.239.420.468,00	100
n.	Pendapatan Hasil Kerjasama-LO	396.864.044,00	257.167.263,00	54,32
Jumlah		171.490.308.684,89	133.333.669.826,72	28,62

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.4.1.2 Pendapatan Transfer– LO	2.027.144.623.372,00	1.982.267.323.937,00

Pendapatan Transfer-LO Kabupaten Blitar adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.027.144.623.372,00 lebih besar Rp44.877.299.435,00 atau 2,26% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp1.982.267.323.937,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 89 Saldo Pendapatan Transfer – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan– LO	1.630.819.542.519,00	1.599.499.305.169,00	1,96



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	208.803.347.200,00	199.355.009.000,00	4,74
3.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	178.465.914.653,00	125.068.109.768,00	42,69
4.	Bantuan Keuangan– LO	9.055.819.000,00	58.344.900.000,00	(84,48)
Jumlah (1+2+3+4)		2.027.144.623.372,00	1.982.267.323.937,00	2,26

Rincian masing-masing jenis Pendapatan Transfer-LO adalah sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.630.819.542.519,00 terdiri dari:

Tabel 90 Saldo Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan–LO Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a.	Bagi Hasil Pajak-LO	21.007.874.001,00	24.042.193.334,00	(12,62)
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	80.908.245.380,00	83.601.164.013,00	(3,22)
c.	Dana Alokasi Umum-LO	1.153.914.324.000,00	1.109.812.753.000,00	3,97
d.	Dana Alokasi Khusus-LO	374.989.099.138,00	382.043.194.822,00	(1,85)
Jumlah		1.630.819.542.519,00	1.599.499.305.169,00	1,96

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO sebesar Rp208.803.347.200,00. merupakan penerimaan dana penyesuaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 91 Saldo Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a.	Dana Insentif Daerah-LO	23.279.135.000,00	36.250.000.000,00	(38,54)
b.	Dana Desa-LO	185.524.212.200,00	163.105.009.000,00	13,75
Jumlah		208.803.347.200,00	199.355.009.000,00	4,74

3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp178.465.914.653,00 merupakan Bagi Hasil Pajak dari propinsi dengan rincian:

Tabel 92 Saldo Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	71.454.218.494,00	36.682.591.957,00	94,79
b.	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	29.223.342.745,00	21.683.904.681,00	34,77
c.	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	37.213.020.047,00	32.851.102.545,00	13,28
d.	Bagi Hasil Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan-LO	732.835.711,00	540.335.048,00	35,63
e.	Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	39.842.497.656,00	33.310.175.537,00	19,61
Jumlah		178.465.914.653,00	125.068.109.768,00	42,69

4. Bantuan Keuangan-LO

Pendapatan Bantuan Keuangan-LO sebesar Rp9.055.819.000,00 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	TA2019 (Rp)	TA2018 (Rp)
5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	104.857.326.052,71	105.128.856.175,82

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Kabupaten Blitar merupakan pendapatan hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun pihak lain untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp104.857.326.052,71 lebih kecil Rp271.530.123,11 atau 0,26% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp105.128.856.175,82 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 93 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO
Tahun 2019 dan Tahun 2018**

No.	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	6.021.011.404,71	17.579.956.662,00	(291,98)
b.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi-LO	5.840.834.648,00	2.306.931.183,00	153,19
c.	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta-LO	0,00	62.084.000,00	(100)
d.	Pendapatan Hibah BOS-LO	92.995.480.000,00	85.179.884.330,82	9,18
Jumlah		104.857.326.052,71	105.128.856.175,82	(0,26)

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.4.2 Beban	2.202.583.603.149,48	2.081.994.443.669,91

Jumlah Beban Kabupaten Blitar untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.202.583.603.149,48 lebih besar Rp120.589.159.479,57 atau 5,79% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp2.081.994.443.669,91 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 94 Saldo Beban Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Beban	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
1.	Beban Operasi	1.874.661.721.918,48	1.783.386.516.922,91
2.	Beban Transfer	327.921.881.231,00	298.607.926.747,00
	Jumlah	2.202.583.603.149,48	2.081.994.443.669,91

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.4.2.1 Beban Operasi	1.874.661.721.918,48	1.783.386.516.922,91

Beban Operasi Kabupaten Blitar adalah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.874.661.721.918,48 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 95 Saldo Beban Operasi Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Beban	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
1	Beban Pegawai – LO	957.485.205.315,25	953.988.698.932,25
2	Beban Barang dan Jasa	597.318.049.065,74	529.204.022.127,52
3	Beban Hibah	51.981.252.549,35	49.603.445.750,00
4	Beban Bantuan Sosial	7.620.200.000,00	5.670.227.300,00
5	Beban Penyusutan	259.417.519.756,69	244.869.796.828,32
6	Beban Penyisihan Piutang	839.495.231,45	50.325.984,82
Jumlah		1.874.661.721.918,48	1.783.386.516.922,91

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
1. Beban Pegawai	957.485.205.315,25	953.988.698.932,25

Beban Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp957.485.205.315,25 lebih kecil Rp3.496.506.383,00 atau 0,37% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp953.988.698.932,25 terdiri atas.

Tabel 96 Beban Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	880.846.180.890,00	878.805.385.298,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	62.248.680.087,00	62.772.607.091,00
3.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	8.820.000.000,00	6.259.575.000,00
4.	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.422.150.282,00	4.167.346.603,00
5.	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	586.943.056,25	908.814.940,25
6.	Beban Uang Lembur – LO	561.251.000,00	1.074.970.000,00
Jumlah		957.485.205.315,25	953.988.698.932,25

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	597.318.049.065,74	529.204.022.127,52

Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 sebesar Rp597.318.049.065,74 lebih besar Rp68.114.026.938,22 atau 12,87% lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp529.204.022.127,52 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan, dikelompokkan menjadi empat beban yaitu Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas. Adapun nilai keempat beban tersebut yaitu Beban Persediaan sebesar Rp183.908.073.299,71, Beban Jasa sebesar Rp300.550.992.421,33, Beban Pemeliharaan sebesar Rp32.444.221.041,20, dan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp80.414.762.303,50. Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dapat dirinci pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 97 Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
A.	Beban Persediaan	183.908.073.299,71	155.158.859.153,26
1.	Beban Bahan Pakai Habis	54.019.421.180,08	39.680.273.144,58
2.	Beban Persediaan Bahan/ Material	49.048.039.482,15	32.008.146.930,68
3.	Beban Cetak dan Penggandaan	32.948.717.405,42	29.686.823.829,00
4.	Beban Makanan dan Minuman	37.944.054.087,56	32.834.400.664,00
5.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.137.823.107,50	732.751.485,00
6.	Beban Pakaian Kerja Lapangan	1.779.722.965,00	1.422.311.250,00
7.	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.935.857.072,00	1.061.217.350,00
8.	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.094.438.000,00	17.732.934.500,00
B.	Beban Jasa	300.550.992.421,33	280.103.905.552,45
1.	Beban Jasa Kantor	204.934.749.839,73	144.984.760.130,40
2.	Beban Premi Asuransi	701.073.728,60	6.885.159,00
3.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.932.532.451,00	2.417.404.054,00
4.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	2.542.065.500,00	1.878.109.819,00
5.	Beban Sewa Alat Berat	5.150.000,00	1.435.000,00
6.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.175.761.325,00	4.287.563.530,00
7.	Beban Jasa Konsultasi	20.799.978.921,00	14.212.793.648,00
8.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	13.200.000,00	39.996.000,00
9.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	21.551.902.429,00	11.294.209.180,00
10.	Beban Honorarium Non Pegawai	571.383.123,00	193.768.000,00
11.	Beban Honorarium PNS – LO	18.324.497.750,00	11.692.050.750,00
12.	Beban Honorarium Non PNS – LO	5.487.962.478,00	0,00
13.	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.025.454.000,00	11.414.321.975,00
14.	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	73.550.000,00	97.425.000,00
15.	Beban Barang Dana BOS	0,00	0,00
16.	Beban Honorarium Pengelola BLUD	381.035.876,00	6.441.589.640,00
17.	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	71.116.373.667,05
18.	Beban Sewa Lahan Pertanian-LO	28.200.000,00	18.800.000,00
19.	Beban Sewa Alat Dapur	2.495.000,00	6.420.000,00
C.	Beban Pemeliharaan	32.444.221.041,20	23.065.109.198,81
1.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	5.549.740.576,00	4.334.878.765,00
2.	Beban Pemeliharaan	26.894.480.465,20	18.730.230.433,81
D.	Beban Perjalanan Dinas	80.414.762.303,50	70.876.148.223,00
1.	Beban Perjalanan Dinas	80.414.762.303,50	70.876.148.223,00
2.	Beban Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00
Jumlah (A+B+C+D)		597.318.049.065,74	529.204.022.127,52



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
3. Beban Hibah	51.981.252.549,35	49.603.445.750,00

Beban Hibah Tahun 2019 sebesar Rp51.981.252.549,35 lebih besar Rp2.377.806.799,35 atau 4,79% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp49.603.445.750,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 98 Beban Hibah Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah	16.849.084,00	0,00
2.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	3.761.177.965,35	7.181.145.750,00
3.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	48.203.225.500,00	42.422.300.000,00
JUMLAH		51.981.252.549,35	49.603.445.750,00

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
4. Beban Bantuan Sosial	7.620.200.000,00	5.670.227.300,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 sebesar Rp7.620.200.000,00 lebih besar Rp1.949.972.700,00 atau 34,39% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp5.670.227.300,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 99 Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	TA2019 (Rp)	TA2018 (Rp)
1.	Beban Bantuan Sosial	7.620.200.000,00	5.670.227.300,00
Jumlah		7.620.200.000,00	5.670.227.300,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 sebesar Rp7.620.200.000,00 merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat, yaitu program PAMSIMAS dan Belanja Bantuan Rumah Swadaya, LKSA dan BKSM Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut.

a.	Bantuan Sosial Program PAMSIMAS	1.024.800.000,00
b.	Bantuan Rumah Swadaya	4.130.000.000,00
c.	LKSA	718.800.000,00
d.	BKSM	1.746.600.000,00
Jumlah		7.620.200.000,00

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5. Beban Penyusutan	259.417.519.756,69	244.869.796.828,32

Beban Penyusutan Tahun 2019 sebesar Rp259.417.519.756,69 lebih besar Rp14.547.722.928,37 atau 5,94% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp244.869.796.828,32 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 100 Beban Penyusutan Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	65.540.666.330,34	60.304.126.485,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.660.463.992,95	19.899.657.657,34
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	172.216.389.433,40	164.666.012.685,98
JUMLAH		259.417.519.756,69	244.869.796.828,32

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
6. Beban Penyisihan Piutang	839.495.231,45	50.325.984,82

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 sebesar Rp839.495.231,45 lebih besar Rp789.169.246,63 atau 1.568,11% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp50.325.984,82 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 101 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	798.900.461,85	48.444.104,82
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	40.594.769,60	1.881.880,00
JUMLAH		839.495.231,45	50.325.984,82

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 merupakan penyisihan piutang Kabupaten Blitar yang terdapat pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 102 Realisasi Beban Penyisihan Piutang per SKPD Tahun 2019 dan Tahun 2018

No.	SKPD	Beban Penyisihan PiutangTA 2019 (Rp)	Beban Penyisihan Piutang TA 2018 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.922.187,50	16.408.047,80
2.	Dinas Lingkungan Hidup	3.822.500,00	4.610.004,00
3.	Bagian Umum Sekretariat Daerah	0,00	1.881.880,00
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	688.930,00	788.353,33
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	182.107.547,25	0,00
6.	Badan Pendapatan Daerah	586.018.191,70	13.087.124,69
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49.935.875,00	13.550.575,00
Jumlah		839.495.231,45	50.325.984,82

Secara ringkas, jumlah Beban Operasi yang ada di masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 103 Realisasi Beban Operasi per SKPD Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Uraian	Beban Operasi TA 2019 (Rp)	Beban Operasi TA 2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	791.149.033.301,71	791.379.480.920,21
2	Dinas Kesehatan	117.293.362.500,35	155.263.147.317,63
3	Puskesmas Bakung	1.271.123.367,00	0,00
4	Puskesmas Wonotirto	1.247.752.317,00	0,00
5	Puskesmas Margomulyo	1.552.469.904,00	0,00
6	Puskesmas Wates	1.509.656.728,00	0,00
7	Puskesmas Binangun	1.889.596.437,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Beban Operasi TA 2019 (Rp)	Beban Operasi TA 2018 (Rp)
8	Puskesmas Sutojayan	2.506.332.009,00	0,00
9	Puskesmas Kademangan	2.842.149.826,00	0,00
10	Puskesmas Kanigoro	2.513.565.725,00	0,00
11	Puskesmas Talun	2.485.836.869,00	0,00
12	Puskesmas Selopuro	2.414.416.180,00	0,00
13	Puskesmas Kesamben	3.160.826.430,00	0,00
14	Puskesmas Boro	1.501.914.835,00	0,00
15	Puskesmas Doko	1.738.087.684,00	0,00
16	Puskesmas Wlingi	2.699.523.788,00	0,00
17	Puskesmas Gandusari	2.721.972.281,00	0,00
18	Puskesmas Slumbung	886.590.726,00	0,00
19	Puskesmas Garum	3.115.188.254,05	0,00
20	Puskesmas Nglegok	2.450.006.018,00	0,00
21	Puskesmas Sanankulon	2.381.709.748,00	0,00
22	Puskesmas Ponggok	2.519.868.312,00	0,00
23	Puskesmas Bacem	1.492.452.172,00	0,00
24	Puskesmas Srengat	3.833.056.780,99	0,00
25	Puskesmas Wonodadi	2.032.175.398,00	0,00
26	Puskesmas Udanawu	1.726.892.920,00	0,00
27	Rumah Sakit Umum Daerah	132.475.620.585,92	119.675.044.179,84
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	175.621.219.215,90	162.145.641.750,27
29	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.110.033.906,00	20.535.666.351,27
30	Satuan Polisi Pamong Praja	11.779.050.891,00	9.771.384.012,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.571.116.424,00	7.257.550.340,00
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.199.196.947,00	8.138.351.638,00
33	Dinas Sosial	8.423.028.197,00	7.747.436.090,00
34	Dinas Tenaga Kerja	7.558.196.228,00	4.280.373.141,00
35	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.935.507.231,00	10.965.097.881,00
36	Dinas Lingkungan Hidup	13.405.637.137,76	10.616.618.453,00
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.384.662.320,10	8.263.495.252,00
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.779.711.385,00	11.044.392.639,00
39	Dinas Perhubungan	12.520.211.853,10	10.833.722.376,77
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.259.175.421,60	8.995.062.567,00
41	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	7.935.247.919,67	6.375.494.187,00
42	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	6.016.227.582,00	4.695.152.771,00
43	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.060.012.073,00	3.004.012.897,00
44	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	16.949.438.799,25	12.371.002.591,33
45	Dinas Pertanian dan Pangan	40.256.635.243,00	40.544.065.868,00
46	Dinas Peternakan dan Perikanan	13.860.637.934,50	9.977.957.212,00
47	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.977.718.222,00	9.939.870.862,00
48	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	24.405.299.974,00	20.575.473.995,00
49	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	167.724.352,00	167.609.692,00
50	Bagian Pemerintahan	1.836.565.541,00	1.635.779.655,00
51	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3.340.251.156,00	1.959.330.377,00
52	Bagian Hukum	1.400.834.803,00	1.084.225.043,00
53	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	1.966.718.449,00	1.946.200.458,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Beban Operasi TA 2019 (Rp)	Beban Operasi TA 2018 (Rp)
54	Bagian Layanan Pengadaan	1.785.042.976,00	1.649.836.753,00
55	Bagian Organisasi	1.129.238.573,00	1.118.779.823,00
56	Bagian Umum	25.667.219.478,00	20.162.145.594,00
57	Bagian Perlengkapan	8.602.700.269,73	8.071.583.527,57
58	Bagian Humas dan Protokol	2.829.902.808,00	2.857.802.497,00
59	Sekretariat DPRD	42.480.430.626,00	41.566.201.329,00
60	Kecamatan Selopuro	1.949.579.990,00	1.261.869.259,00
61	Kecamatan Wlingi	7.502.791.110,00	4.589.387.028,00
62	Kecamatan Talun	7.022.424.491,00	4.058.286.806,00
63	Kecamatan Gandusari	2.673.491.427,00	1.647.972.506,00
64	Kecamatan Doko	2.446.312.611,50	1.559.510.573,00
65	Kecamatan Garum	5.415.109.861,00	3.466.775.553,00
66	Kecamatan Kanigoro	4.663.857.488,00	2.726.686.280,00
67	Kecamatan Sutojayan	9.322.911.270,00	5.667.686.793,00
68	Kecamatan Binangun	2.709.066.698,50	1.564.809.345,00
69	Kecamatan Wates	2.300.683.655,00	1.430.658.760,00
70	Kecamatan Panggungrejo	1.974.047.378,00	1.280.826.553,00
71	Kecamatan Wonotirto	2.125.756.716,00	1.242.675.377,00
72	Kecamatan Bakung	2.389.364.853,00	1.595.899.008,00
73	Kecamatan Kademangan	3.558.337.057,00	2.172.904.738,00
74	Kecamatan Sanankulon	2.319.950.109,50	1.517.630.916,00
75	Kecamatan Srengat	7.662.073.087,00	4.277.218.698,00
76	Kecamatan Wonodadi	2.725.612.504,00	1.682.739.950,00
77	Kecamatan Udanawu	2.655.454.899,00	1.847.960.357,00
78	Kecamatan Ponggok	3.013.221.506,50	1.935.145.351,00
79	Kecamatan Nglegok	3.531.942.347,00	2.345.954.819,00
80	Kecamatan Selorejo	2.045.324.417,00	1.519.005.433,00
81	Kecamatan Kesamben	2.742.271.195,00	1.708.341.233,00
82	Inspektorat Daerah	11.314.187.446,40	8.102.915.261,00
83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.562.848.974,50	11.991.346.465,00
84	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	16.530.767.095,00	78.422.551.999,33
85	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	56.156.608.817,25	48.298.381.616,00
86	Badan Pendapatan Daerah	42.261.598.188,70	38.559.643.840,69
87	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.460.421.692,00	10.296.742.364,00
Total		1.874.661.721.918,48	1.783.386.516.922,91

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.4.2.2 Beban Transfer	327.921.881.231,00	298.607.926.747,00

Jumlah Beban Transfer untuk Tahun 2019 sebesar Rp327.921.881.231,00 lebih besar Rp29.313.954.484,00 atau 9,82% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp298.607.926.747,00 yang berada di BPKAD (PPKD) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 104 Saldo Beban Transfer Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Beban	TA 2019 (Rp)	TA2018 (Rp)
1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.072.561.251,00	8.643.822.282,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Beban	TA 2019 (Rp)	TA2018 (Rp)
2.	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.918.234.630,00	3.749.457.265,00
3.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	1.058.105.750,00	1.017.188.900,00
4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	313.889.016.200,00	284.244.667.300,00
5.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	983.963.400,00	952.791.000,00
	Jumlah	327.921.881.231,00	298.607.926.747,00

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.4.3 Defisit Non Operasional	(272.316.121,66)	0,00
Defisit Non Operasional Tahun 2019 sebesar Rp(272.316.121,66) dan Tahun 2018 sebesar Rp0,00.		
	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.4.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp0,00.		
	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.4.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp0,00.		
	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.4.3.3 Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp0,00.		
	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.4.3.4 Defisit Penjualan Aset Non Lancar	43.919.925,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2019 sebesar Rp43.919.925,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp0,00.		
	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.4.3.5 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp0,00.		



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.4.3.6 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	228.396.196,66	0,00

Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp228.396.196,66 lebih besar daripada Tahun 2018 sebesar Rp0,00.

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.4.4 Pos Luar Biasa	62.434.500,00	916.000,00

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa Tahun 2019 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Untuk Tahun 2019 Beban Luar Biasa LO sebesar Rp62.434.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembalian pajak daerah TA. 2018 (pajak restoran) an. Yeyet Setyo Rahayu	Rp	950.000,00
- Pengembalian pajak daerah TA. 2018 (BPHTB) an. Novi Dewi Mariam	Rp	7.075.000,00
- Pengembalian pajak daerah TA. 2018 (pajak restoran) an. TK. Al Hidayah Babadan 02 Wlingi	Rp	1.411.000,00
- Pengembalian pajak daerah TA. 2018 (pajak restoran) an. Yulianti Mustikaningtyas	Rp	313.500,00
- Pengembalian pajak daerah TA. 2018 (pajak restoran) an. TK. Pertiwi I Tegalsari	Rp	695.000,00
- Pengembalian pajak daerah TA. 2018 (BPHTB) an. Nurkholis	Rp	3.150.000,00
- Pengembalian denda pemungutan BPHTB TA. 2017 an. Hari Setiyana, S.Sos.	Rp	3.000.000,00
- Pengembalian pajak daerah TA. 2018 (pajak restoran) an. TK Al Hidayah II	Rp	840.000,00
- Pencairan Belanja Tidak terduga (BTT) dropping air bersih Kab. Blitar TA. 2019	Rp	45.000.000,00
	Rp	62.434.500,00

5.4.5 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan LRA

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
5.4.5.1 Pendapatan Asli Daerah	292.892.000.319,87	285.742.715.698,86	7.149.284.621,01

Pendapatan Asli Daerah – LO sebesar Rp292.892.000.319,87 berbeda dengan Pendapatan Asli Daerah – LRA yaitu sebesar Rp285.742.715.698,86 sehingga terdapat selisih sebesar Rp7.149.284.621,01 (Rp292.892.000.319,87– Rp285.742.715.698,86). Selisih sebesar Rp7.149.284.621,01 dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA **Rp 285.742.715.698,86**

Penambahan

1	Piutang Murni 2019	27.222.299.516,76	
2	Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	104.451.743,33	
3	Koreksi Kurang Catat Pendapatan	208.244.647,00	
Total Penambahan			27.534.995.907,09

Pengurangan

4	Setoran Piutang Tahun Sebelumnya	20.332.913.907,41	
5	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan	52.131.666,67	
6	Koreksi Lebih Catat Pendapatan	665.712,00	
Total Pengurangan			Rp 20.385.711.286,08

PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO **Rp 292.892.000.319,87**

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
5.4.5.2 Pendapatan Transfer	2.027.144.623.372,00	2.022.293.757.037,00	4.850.866.335,00

Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp2.027.144.623.372,00 tidak sama dengan Pendapatan Transfer – LRA sebesar Rp2.022.293.757.037,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.850.866.335,00, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Transfer –LRA **Rp 2.022.293.757.037,00**

Penambahan

-	Piutang Murni Tahun 2019	Rp 21.427.262.440,00	
Total Penambahan			Rp 21.427.262.440,00

Pengurangan

-	Setoran Piutang Tahun 2018	Rp 16.576.396.105,00	
Total Pengurangan			Rp 16.576.396.105,00

Pendapatan Transfer – LO **Rp 2.027.144.623.372,00**

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
5.4.5.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	104.857.326.052,71	92.995.480.000,00	11.861.846.052,71

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp104.857.326.052,71 tidak sama dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LRA sebesar Rp92.995.480.000,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp11.861.846.052,71 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah–LRA **Rp 92.995.480.000,00**

Penambahan

-	Penerimaan Hibah Barang dan Jasa	Rp 7.098.247.291,00	
-	Penerimaan Hibah Aset Tetap	Rp 4.763.598.761,71	
Total Penambahan			Rp 11.861.846.052,71



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengurangan

- Setoran Piutang Tahun 2018	Rp	0,00
Total Pengurangan	Rp	0,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah- LO	Rp	104.857.326.052,71

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp104.857.326.052,71 tidak sama dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada LRA yaitu sebesar Rp92.995.480.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp11.861.846.052,71. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dengan rincian sebagai berikut.

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	Rp	6.021.011.404,71
b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	Rp	5.840.834.648,00
Jumlah	Rp	11.861.846.052,71

Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO sebesar Rp6.021.011.404,71 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang berupa Hibah Barang dan Jasa sebesar Rp1.257.412.643,00 dan Hibah Aset (yang diakui sebesar nilai buku aset) sebesar Rp4.763.598.761,71, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Hibah Barang dan Jasa	Hibah Aset Tetap	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	Rp 588.757.450,00	Rp 4.213.810.430,00	Rp 4.802.567.880,00
-	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp 20.172.450,00	-	
-	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp 2.907.000,00	-	
-	Persediaan Bahan Obat-obatan	Rp 3.070.000,00	-	
-	Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	Rp 2.875.000,00	-	
-	Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp 655.000,00	-	
-	Jasa Tenaga Ahli Instruktur/Narasumber	Rp 15.200.000,00	-	
-	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	Rp 1.614.000,00	-	
-	Cetak	Rp 1.500.000,00	-	
-	Makanan dan Minuman Rapat	Rp 29.196.000,00	-	
-	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 13.500.000,00	-	
-	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 479.993.000,00	-	
-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp 16.500.000,00	-	
-	Uang Untuk Hadiah Lomba	Rp 1.575.000,00	-	
	Alat Penyimpanan	-	Rp 5.200.000,00	
	Perlengkapan Kantor	-	Rp 650.000,00	
	Alat Kantor Lainnya	-	Rp 26.160.000,00	
	Meubelair	-	Rp 700.000,00	
	Alat Pembersih	-	Rp 2.172.672.000,00	
	Personal Komputer	-		



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Hibah Barang dan Jasa	Hibah Aset Tetap	Jumlah
	Peralatan Personal Komputer	- Rp	56.650.000,00	
	Peralatan Jaringan	- Rp	333.915.880,00	
	Meja Kerja Pejabat	- Rp	2.400.000,00	
	Kursi Kerja Pejabat	- Rp	600.000,00	
	Peralatan Studio Visual	- Rp	422.610.000,00	
	Alat Kedokteran Umum	- Rp	810.000,00	
	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	- Rp	290.000,00	
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	- Rp	966.652.550,00	
	Tugu Tanda Batas	- Rp	220.000.000,00	
	Buku Umum	- Rp	4.500.000,00	
2	Dinas Kesehatan	Rp 134.819.693,00	Rp 86.194.920,00	Rp 221.014.613,00
	- Persediaan Alat Kesehatan	Rp 21.671.000,00	Rp -	
	- Bahan Cetak	Rp 113.148.693,00	Rp -	
	- Alat Kedokteran Umum	Rp	Rp 86.194.920,00	
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp -	Rp 386.613.744,71	Rp 386.613.744,71
	- Mesin Proses	Rp	Rp 13.970.833,33	
	- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp	Rp 61.798.809,52	
	- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp	Rp 21.679.864,48	
	- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp	Rp 79.130.952,38	
	- Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	Rp	Rp 14.067.570,00	
	- Alat Olahraga Air	Rp	Rp 195.965.715,00	
4	Dinas Sosial	Rp -	Rp 27.688.000,00	Rp 27.688.000,00
	- Personal Komputer	Rp	Rp 27.688.000,00	
5	Dinas Kependudukan dan Capil	Rp 533.835.500,00	Rp -	Rp 533.835.500,00
	- Bahan Cetak	533.835.500,00	Rp -	
6	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp -	Rp 49.291.667,00	Rp 49.291.667,00
	- Station Wagon	Rp	Rp 49.291.667,00	
	Jumlah	Rp 1.257.412.643,00	Rp 4.763.598.761,71	Rp 6.021.011.404,71

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp5.840.834.648,00 berupa Hibah Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Hibah Barang dan Jasa	Hibah Aset	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	Rp 5.840.834.648,00	Rp -	Rp 5.840.834.648,00
	- Alat Tulis Kantor	Rp 7.211.820,00	Rp -	
	- Alat Kesehatan/Habis Pakai	Rp 999.931.049,00	Rp -	
	- Cindra Mata/Piagam/Karangan Bunga	Rp 58.630.000,00	Rp -	
	- Obat-obatan	Rp 4.699.421.750,00	Rp -	
	- Cetak	Rp 75.640.029,00	Rp -	
	Jumlah	Rp 5.840.834.648,00	Rp -	Rp 5.840.834.648,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.4.6 Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja LRA

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
5.4.6.1 Belanja Pegawai	957.485.205.315,25	954.631.029.391,25	2.854.175.924,00

Beban Pegawai pada LO sebesar Rp957.485.205.315,25 tidak sama dengan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp954.631.029.391,25 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.854.175.924,00. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

BELANJA PEGAWAI – LRA		Rp	954.631.029.391,25
Penambahan			
1	Utang Beban Pegawai 2019	Rp	7.238.338.724,00
	Total Penambahan	Rp	7.238.338.724,00
Pengurangan			
2	Pembayaran Utang Beban Pegawai 2018	Rp	4.384.162.800,00
	Total Pengurangan	Rp	4.384.162.800,00
BEBAN PEGAWAI – LO		Rp	957.485.205.315,25

1. Utang Beban Pegawai tahun 2019 sebesar Rp7.238.338.724,00 terdiri atas Rp6.887.713.724,00 merupakan Utang Beban Pegawai – Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Pemkab Blitar Bulan Desember 2019 yang dibayarkan pada bulan Januari 2020 dan Rp350.625.000,00 merupakan Utang Insentif PBB-P2 Tw IV TA 2019.
2. Pembayaran Utang Beban Pegawai tahun 2018 sebesar Rp4.384.162.800,00 merupakan Pembayaran Utang Beban Pegawai - Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai.

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
5.4.6.2 Belanja Barang Dan Jasa	597.318.049.065,74	588.135.137.073,25	9.182.911.992,49

Berdasarkan rincian Beban Barang dan Jasa, dapat dijelaskan beberapa poin sebagai berikut.

Beban Barang BOS pada Tahun 2019 telah diatribusikan ke dalam jenis beban sesuai dengan kode rekening Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Blitar.

Total Nilai Beban Barang dan Jasa sebesar Rp597.318.049.065,74 tidak sama dengan Belanja Barang dan Jasa di LRA sebesar Rp588.135.137.073,25 sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.182.911.992,49. Hal ini dikarenakan timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan penurunan umur manfaat atau potensi jasa, dan lain-lain. Selisih sebesar Rp9.182.911.992,49 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Belanja Barang dan Jasa – LRA		Rp	588.135.137.073,25
Penambahan			
1	Beban dari Persediaan Awal Barang dan Jasa (1 Januari 2019)	Rp	25.498.813.676,36
2	Mutasi Tambah Persediaan	Rp	11.230.115.525,00
3	Reklasifikasi Beban (Tambah)	Rp	202.183.801.730,30
4	Utang Beban Barang Jasa 2019	Rp	12.561.575.475,25



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5	Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal	Rp	3.597.041.242,00		
6	Beban Sewa Dibayar Dimuka Th. 2019	Rp	37.500.000,00		
7	Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Hibah	Rp	6.509.489.841,00		
8	Koreksi Kurang Catat Belanja	Rp	3.311.942.667,00		
	Total Penambahan			Rp	264.930.280.156,91
Pengurangan					
9	Beban dari Persediaan Akhir Barang dan Jasa (31 Desember 2019)	Rp	24.813.423.508,87		
10	Mutasi Kurang Persediaan	Rp	11.230.115.525,00		
11	Reklasifikasi Beban (Kurang)	Rp	202.200.650.814,30		
12	Pembayaran Utang Beban Barang dan Jasa 2018 yang Dibayar 2019	Rp	10.930.115.773,25		
13	Beban sewa dibayar dimuka tahun 2018	Rp	37.500.000,00		
14	Pengakuan Aset dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.212.779.094,00		
15	Koreksi Lebih Catat Belanja	Rp	4.322.783.449,00		
	Total Pengurangan			Rp	255.747.368.164,42
	Beban Barang dan Jasa – LO			Rp	597.318.049.065,74

Penjelasan atas perhitungan di atas adalah sebagai berikut.

- 1) Beban dari Persediaan Awal Barang dan Jasa (1 Januari 2019) sebesar Rp25.498.813.676,36 terdiri dari,
- Beban Persediaan Alat Tulis Kantor Rp 1.391.523.499,06
 - Beban Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Rp 179.704.705,00
 - Beban Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya Rp 8.481.000,00
 - Beban Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 285.456.852,00
 - Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 15.081.879,00
 - Beban Persediaan Isi tabung gas Rp 1.500.000,00
 - Beban Persediaan Isi Tabung Oksigen Rp 510.000,00
 - Beban Persediaan Alat Kesehatan/Alat Lab. Habis Pakai Rp 2.558.442.644,00
 - Belanja Cinderamata/Piagam/ Karangan Bunga Rp 165.935.000,00
 - Beban Persediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 32.306.380,00
 - Beban Persediaan Bahan baku bangunan Rp 82.896.910,00
 - Beban Persediaan Bahan obat-obatan Rp 15.370.157.886,00
 - Beban Persediaan Bahan kimia Rp 17.980.000,00
 - Beban Persediaan Bahan Peralatan Rp 203.585.373,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

-	Beban Persediaan Bahan Sembako	Rp	15.000.000,00
-	Beban Persediaan Bahan Pakan Hewan	Rp	12.287.500,00
-	Belanja Cetak	Rp	2.165.293.229,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	Rp	777.584.823,00
-	Beban Persediaan Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp	295.211.000,00
-	Beban Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp	618.117.946,30
-	Beban Persediaan Pakaian Kerja Lapangan	Rp	9.700.000,00
-	Beban Persediaan Pakaian Korpri	Rp	61.361.000,00
-	Beban Persediaan Pakaian Batik Tradisional	Rp	96.153.750,00
-	Beban Persediaan Pakaian Olah Raga	Rp	95.821.300,00
-	Beban Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp	795.841.000,00
-	Beban Persediaan Barang Hadiah Lomba	Rp	242.880.000,00
Jumlah		Rp	25.498.813.676,36
2)	Utang Beban Barang dan Jasa 2019 sebesar Rp12.561.575.475,25, terdiri dari,		
-	Utang Beban Bahan obat-obatan	Rp	42.566.600,00
-	Utang Beban Jasa telepon	Rp	18.763.060,00
-	Utang Beban Jasa air	Rp	8.866.300,00
-	Utang Beban Jasa listrik	Rp	2.286.777.984,00
-	Utang Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	Rp	1.255.000,00
-	Utang Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	Rp	10.354.451,00
-	Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp	2.217.833.547,25
-	Utang Beban Bahan Bakar Minyak/Gas/ Pelumas	Rp	50.863.913,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	Rp	82.975.000,00
-	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp	7.841.319.620,00
		Rp	12.561.575.475,25
3)	Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal sebesar Rp3.597.041.242,00 terdiri dari,		
-	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	17.396.000,00
	<i>Dinas Pendidikan</i>	<i>Rp</i>	<i>17.396.000,00</i>
-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	Rp	9.100.000,00
	<i>Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Skpd)</i>	<i>Rp</i>	<i>9.100.000,00</i>
-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	2.035.000,00
	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>	<i>Rp</i>	<i>2.035.000,00</i>
-	Belanja Alat Kesehatan/ Alat Lab Habis Pakai	Rp	183.869.392,00
	<i>Dinas Pendidikan</i>	<i>Rp</i>	<i>103.728.495,00</i>
	<i>Dinas Kesehatan</i>	<i>Rp</i>	<i>77.948.897,00</i>
	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>	<i>Rp</i>	<i>2.192.000,00</i>



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Belanja Peralatan Rumah Tangga		Rp	21.313.200,00
<i>Dinas Pendidikan</i>	<i>Rp</i>	<i>1.125.000,00</i>	
<i>Dinas Kesehatan</i>	<i>Rp</i>	<i>6.770.200,00</i>	
<i>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>	<i>Rp</i>	<i>900.000,00</i>	
<i>Bagian Perlengkapan</i>	<i>Rp</i>	<i>12.518.000,00</i>	
- Belanja Bahan/Bibit Tanaman		Rp	100.000.000,00
<i>Kecamatan Sutojayan</i>	<i>Rp</i>	<i>100.000.000,00</i>	
- Belanja Bahan Peralatan		Rp	100.876.000,00
<i>Dinas Pendidikan</i>	<i>Rp</i>	<i>91.775.000,00</i>	
<i>Kecamatan Sutojayan</i>	<i>Rp</i>	<i>9.101.000,00</i>	
- Belanja Bahan Praktek/ Pelatihan		Rp	600.000,00
<i>Dinas Pendidikan</i>	<i>Rp</i>	<i>600.000,00</i>	
- Belanja Listrik		Rp	4.270.900,00
<i>Dinas Kesehatan</i>	<i>Rp</i>	<i>4.270.900,00</i>	
- Belanja Cetak		Rp	14.520.000,00
<i>Dinas Kesehatan</i>	<i>Rp</i>	<i>14.520.000,00</i>	
- Belanja Sewa Meja Kursi		Rp	2.500.000,00
<i>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>	<i>Rp</i>	<i>2.500.000,00</i>	
- Belanja Sewa Tenda		Rp	17.500.000,00
<i>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>	<i>Rp</i>	<i>17.500.000,00</i>	
- Belanja Sewa Sound System		Rp	2.500.000,00
<i>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>	<i>Rp</i>	<i>2.500.000,00</i>	
- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Rp	10.198.600,00
<i>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>	<i>Rp</i>	<i>10.198.600,00</i>	
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp	18.500.000,00
<i>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>	<i>Rp</i>	<i>18.500.000,00</i>	
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan		Rp	4.675.000,00
<i>Dinas Peternakan dan Perikanan</i>	<i>Rp</i>	<i>4.675.000,00</i>	
- Belanja Pakaian Korpri		Rp	1.750.000,00
<i>Dinas Pendidikan</i>	<i>Rp</i>	<i>1.750.000,00</i>	
- Belanja Pakaian Adat Daerah		Rp	3.060.000,00
<i>Dinas Pendidikan</i>	<i>Rp</i>	<i>3.060.000,00</i>	
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Rp	9.570.000,00
<i>Dinas Pendidikan</i>	<i>Rp</i>	<i>9.570.000,00</i>	
- Belanja Pemeliharaan Gedung			232.390.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dan Bangunan			
Dinas Kesehatan	Rp	111.080.000,00	
Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp	64.810.000,00	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	24.800.000,00	
Kecamatan Sutojayan	Rp	15.200.000,00	
Kecamatan Srengat	Rp	16.500.000,00	
- Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan			Rp 1.207.940.650,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	739.497.650,00	
Kecamatan Srengat	Rp	468.443.000,00	
- Belanja Jasa Konsultansi Penelitian			Rp 397.469.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	372.939.000,00	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	24.530.000,00	
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan			Rp 1.172.057.500,00
Dinas Pendidikan	Rp	136.169.000,00	
Dinas Kesehatan	Rp	48.000.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	99.300.000,00	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	128.290.000,00	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	49.850.000,00	
Dinas Perhubungan	Rp	28.985.000,00	
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	248.230.000,00	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	59.904.000,00	
Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp	14.730.500,00	
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	Rp	98.774.000,00	
Dinas Pertanian dan Pangan	Rp	79.805.000,00	
Bagian Hukum	Rp	31.487.500,00	
Bagian Perekonomian dan Pembangunan	Rp	98.532.500,00	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	50.000.000,00	
- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat			Rp 47.000.000,00
Kecamatan Garum	Rp	47.000.000,00	
- Belanja Honorarium Panitia			Rp 15.950.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pelaksana Kegiatan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 15.950.000,00

Rp 3.597.041.242,00

- 4) Beban Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2019 sebesar Rp37.500.000,00 merupakan Belanja sewa gedung kantor/Tempat-Gedung *workshop* (Tempat Alat Berat) di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun periode Januari 2020 s/d September 2020 sebesar Rp37.500.000 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- 5) Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Hibah sebesar Rp6.509.489.841,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Belanja Alat Tulis Kantor		Rp	7.211.820,00
<i>Dinas Kesehatan</i>	Rp	7.211.820,00	
- Belanja Alat Kesehatan/ Alat Lab Habis Pakai		Rp	1.021.602.049,00
<i>Dinas Kesehatan</i>	Rp	1.021.602.049,00	
- Belanja Cinderamata/Piagam/ Karangan Bunga		Rp	58.630.000,00
<i>Dinas Kesehatan</i>	Rp	58.630.000,00	
- Belanja Bahan obat-obatan		Rp	4.699.421.750,00
<i>Dinas Kesehatan</i>	Rp	4.699.421.750,00	
- Belanja Cetak		Rp	722.624.222,00
<i>Dinas Kesehatan</i>	Rp	188.788.722,00	
<i>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>	Rp	533.835.500,00	

Rp 6.509.489.841,00

- 6) Koreksi Kurang Catat Belanja sebesar Rp3.311.942.667,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Beban Alat Tulis Kantor		Rp	20.172.450,00
- Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		Rp	2.907.000,00
- Beban Alat Kesehatan/ Alat Lab Habis Pakai		Rp	75.467.680,00
<i>RSUD Wlingi</i>	Rp	41.044.180,00	
<i>Dinas Peternakan dan Perikanan</i>	Rp	34.423.500,00	
- Beban Bahan obat-obatan		Rp	21.553.162,00
- Beban Dokumentasi dan Dekorasi		Rp	2.875.000,00
- Beban Jasa Pelayanan Kesehatan		Rp	655.000,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli Instruktur/Narasumber		Rp	15.200.000,00
- Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan		Rp	1.614.000,00
- Beban Cetak		Rp	1.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp	29.196.000,00
- Beban Pakaian Korpri	Rp	2.629.234.375,00
<i>Bagian Perlengkapan</i>	<i>Rp</i>	<i>2.629.234.375,00</i>
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	13.500.000,00
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	479.993.000,00
- Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp	16.500.000,00
- Beban Uang Untuk Hadiah Lomba	Rp	1.575.000,00
		Rp 3.311.942.667,00

7) Beban dari Persediaan Akhir (31 Desember 2019) yang sebesar Rp24.813.423.508,87 terdiri dari,

- Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	1.759.232.053,07
- Beban Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	Rp	206.288.635,00
- Beban Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	Rp	18.100.500,00
- Beban Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp	225.141.966,00
- Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp	31.059.140,00
- Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Rp	36.400.000,00
- Beban Persediaan Isi Pengisian Tabung Gas	Rp	2.320.000,00
- Beban Persediaan Alat Kesehatan/Alat Lab. Habis Pakai	Rp	2.544.542.486,00
- Belanja Cinderamata/Piagam/ Karangan Bunga	Rp	139.453.200,00
- Beban Persediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	39.060.083,00
- Beban Persediaan Bahan baku bangunan	Rp	143.246.599,00
- Beban Persediaan Bahan obat-obatan	Rp	14.036.466.376,00
- Beban Persediaan Bahan kimia	Rp	40.049.482,00
- Beban Persediaan Bahan Peralatan	Rp	166.067.886,00
- Beban Persediaan Bahan Sembako	Rp	14.900.000,00
- Beban Persediaan Bahan Pakan Hewan	Rp	2.833.750,00
Belanja Bahan Pupuk Tanaman		2.375.000,00
- Belanja Cetak	Rp	1.622.295.541,00
- Belanja Makanan dan Minuman Pasien	Rp	15.723.873,00
- Beban Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp	531.890.938,80
- Beban Persediaan Pakaian Kerja Lapangan	Rp	4.420.000,00
- Beban Persediaan Pakaian Korpri	Rp	2.680.296.000,00
- Beban Persediaan Pakaian Olah Raga	Rp	63.736.000,00
- Beban Persediaan Barang Hadiah Lomba	Rp	487.524.000,00
Jumlah	Rp	24.813.423.508,87



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

8) Pembayaran Utang Beban Barang dan Jasa 2018 yang dibayar pada Tahun 2019 sebesar Rp10.930.115.773,25 terdiri dari,

- Utang Beban Jasa telepon	Rp	31.994.013,00
- Utang Beban Jasa air	Rp	6.046.050,00
- Utang Beban Jasa listrik	Rp	2.228.778.644,00
- Utang Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	Rp	1.180.000,00
- Utang Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	Rp	3.531.095,00
- Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp	258.417.427,00
- Utang Beban Bahan Bakar Minyak/Gas/ Pelumas	Rp	17.907.635,00
- Utang Beban Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	929.300,00
- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		1.150.700,00
- Utang Beban Barang Dan Jasa BLUD	Rp	8.380.180.909,25
	Rp	10.930.115.773,25

9) Beban dibayar dimuka sebesar Rp37.500.000,00 merupakan Belanja sewa gedung kantor/Tempat-Gedung *workshop* (Tempat Alat Berat) di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun periode Januari 2020 s/d September 2020 sebesar Rp37.500.000 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

10) Pengakuan Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar 2.212.779.094,00 terdiri dari,

- Beban Alat Tulis Kantor	Rp	155.000,00
<i>Rumah Sakit Umum Daerah</i>	<i>Rp</i>	<i>155.000,00</i>
- Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	2.175.000,00
<i>Dinas Pertanian dan Pangan</i>	<i>Rp</i>	<i>2.175.000,00</i>
- Beban Peralatan Rumah Tangga	Rp	19.665.000,00
<i>Dinas Kesehatan</i>	<i>Rp</i>	<i>545.000,00</i>
<i>Kecamatan Garum</i>	<i>Rp</i>	<i>3.740.000,00</i>
<i>Kecamatan Srengat</i>	<i>Rp</i>	<i>15.380.000,00</i>
- Beban Bahan Peralatan		2.767.500,00
<i>Dinas Pertanian dan Pangan</i>	<i>Rp</i>	<i>2.767.500,00</i>
- Beban Jasa Transaksi Keuangan	Rp	1.494.200,00
<i>Dinas Kesehatan</i>	<i>Rp</i>	<i>1.494.200,00</i>
- Beban Penggantian Suku Cadang	Rp	74.300.000,00
<i>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	<i>Rp</i>	<i>74.300.000,00</i>
- Beban Cetak		14.579.600,00
<i>Rumah Sakit Umum Daerah</i>	<i>Rp</i>	<i>212.500,00</i>
<i>Kecamatan Kanigoro</i>	<i>Rp</i>	<i>14.367.100,00</i>
- Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp	900.000,00
<i>Rumah Sakit Umum Daerah</i>	<i>Rp</i>	<i>900.000,00</i>



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	755.000,00
<i>Rumah Sakit Umum Daerah</i>	<i>Rp</i>	<i>755.000,00</i>
- Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	30.521.922,00
<i>Rumah Sakit Umum Daerah</i>	<i>Rp</i>	<i>30.521.922,00</i>
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	5.520.000,00
<i>Dinas Kesehatan</i>	<i>Rp</i>	<i>1.320.000,00</i>
<i>Kecamatan Srengat</i>	<i>Rp</i>	<i>4.200.000,00</i>
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	1.854.445.872,00
<i>Dinas Kesehatan</i>	<i>Rp</i>	<i>533.260.322,00</i>
<i>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga</i>	<i>Rp</i>	<i>192.227.000,00</i>
<i>Dinas Pertanian dan Pangan</i>	<i>Rp</i>	<i>689.247.800,00</i>
<i>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>	<i>Rp</i>	<i>57.000.000,00</i>
<i>Kecamatan Garum</i>	<i>Rp</i>	<i>49.200.000,00</i>
<i>Kecamatan Kanigoro</i>	<i>Rp</i>	<i>333.510.750,00</i>
- Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	103.846.000,00
<i>Kecamatan Garum</i>	<i>Rp</i>	<i>103.846.000,00</i>
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		85.475.000,00
<i>Dinas Kesehatan</i>	<i>Rp</i>	<i>2.500.000,00</i>
<i>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	<i>Rp</i>	<i>82.975.000,00</i>
- Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	Rp	11.204.000,00
<i>Dinas Kesehatan</i>	<i>Rp</i>	<i>11.204.000,00</i>
<i>Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</i>	<i>Rp</i>	<i>4.100.000,00</i>
<i>Rumah Sakit Umum Daerah</i>	<i>Rp</i>	<i>4.100.000,00</i>
- Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	200.000,00
<i>Rumah Sakit Umum Daerah</i>	<i>Rp</i>	<i>200.000,00</i>
- Beban Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	Rp	675.000,00
<i>Rumah Sakit Umum Daerah</i>	<i>Rp</i>	<i>675.000,00</i>
Rp		2.212.779.094,00

11) Koreksi lebih catat Beban Barang Jasa sebesar Rp4.322.783.449,00, merupakan:

- Beban Alat Tulis Kantor	Rp	4.657.096,00
- Beban Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	Rp	1.737.175,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Rp	500.000,00
- Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	750.000,00
- Beban Bahan Peralatan	Rp	35.423.500,00
- Belanja Bahan Sembako	Rp	6.900.000,00
- Beban Telepon	Rp	6.414.800,00
- Beban Air	Rp	50.000,00
- Beban Listrik	Rp	20.890.254,00
- Beban Dokumentasi dan Dekorasi	Rp	5.100.000,00
- Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp	1.495.280.949,00
- Beban Jasa Service	Rp	2.300.000,00
- Beban Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	321.000,00
- Beban Cetak	Rp	2.025.000,00
- Beban Penggandaan	Rp	1.387.500,00
- Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Rp	2.000.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp	25.523.000,00
- Beban Pakaian Batik Tradisional	Rp	2.629.234.375,00
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	44.227.000,00
- Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	15.576.300,00
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	4.677.500,00
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	2.208.000,00
- Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp	400.000,00
- Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	Rp	7.625.000,00
- Beban Uang Untuk Hadiah Lomba	Rp	7.575.000,00
	Rp	4.322.783.449,00

5.4.6.3 Beban Hibah

LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
51.981.252.549,35	66.603.353.711,35	(14.622.101.162,00)

Total Nilai Beban Hibah sebesar Rp51.981.252.549,35 tidak sama dengan Belanja Barang dan Jasa di LRA sebesar Rp66.603.353.711,35 sehingga terdapat selisih sebesar Rp(14.622.101.162,00). Hal ini dikarenakan persediaan akhir barang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.540.246.950,00 pada



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Pertanian dan Pangan dan sebesar Rp10.098.703.296,00 pada Dinas Perumahan dan Permukiman serta Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa-Persediaan Obat-obatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp16.849.084,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

BELANJA HIBAH– LRA		Rp	66.603.353.711,35
Penambahan			
1 Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (Persediaan Obat-Obatan)	Rp	16.849.084,00	
Total Penambahan		Rp	16.849.084,00
Pengurangan			
2 Persediaan Akhir Barang yang diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	Rp	14.638.950.246,00	
Total Pengurangan		Rp	14.638.950.246,00
BEBAN HIBAH – LO		Rp	51.981.252.549,35

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
5.4.6.4 Beban Bantuan Sosial	7.620.200.000,00	7.620.200.000,00	0,00
Tidak terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA.			

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
5.4.6.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi	259.417.519.756,69	0,00	259.609.157.216,34
Beban penyusutan dan amortisasi hanya diakui dalam Laporan Operasional yaitu sebesar Rp259.417.519.756,69.			

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
5.4.6.6 Beban Penyisihan Piutang	839.495.231,45	0,00	839.495.231,45

Beban penyisihan piutang hanya diakui dalam Laporan Operasional yaitu sebesar Rp839.495.231,45.

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
5.4.6.7 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	11.990.795.881,00	10.999.975.718,00	990.820.163,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi sebesar Rp11.990.795.881,00 tidak sama dengan Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi – LRA yaitu sebesar Rp10.999.975.718,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp990.820.163,00. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi – LRA **Rp 10.999.975.718,00**

Penambahan

- | | | | |
|----|---|----|------------------|
| 1 | Pengakuan Utang (Kurang Bayar) Bagi Hasil Pajak Ke Desa Rp682.730.712 ,00 Tahun 2019 | Rp | 682.730.712,00 |
| 2 | Pengakuan Utang (Kurang Bayar) Bagi Hasil Retribusi Ke Desa Rp756.669.755,00 dengan rincian perhitungan Tahun 2018 sebesar Rp202.223.882,00 dan perhitungan Tahun 2019 sebesar Rp554.445.873,00 | Rp | 756.669.755,00 |
| 3 | Utang Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan ke Polres Kab dan Kota bulan September, Oktober, November, dan Desember 2019 | Rp | 125.985.176,00 |
| 4. | Kurang Catat Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2018 | Rp | 2.161.505.600,00 |
| 5. | Koreksi Kurang Catat Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2018 | Rp | 75.502.090,00 |

Total Penambahan

Rp 3.802.393.333,00

Pengurangan

- | | | | |
|---|--|----|------------------|
| 6 | Pembayaran Utang Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan untuk kepolisian resort bulan November dan Desember 2018 | Rp | 73.630.000,00 |
| 7 | Pengakuan Piutang (Lebih Bayar) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp 235.763.864,00 dengan rincian perhitungan Tahun 2018 sebesar Rp116.015,00 dan perhitungan Tahun 2019 sebesar Rp235.647.849,00 | Rp | 235.763.864,00 |
| 8 | Pengakuan Piutang (Lebih Bayar) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Rp138.565.839,00 dengan rincian perhitungan Tahun 2018 sebesar Rp75.502.090,00 dan perhitungan Tahun 2019 sebesar Rp63.063.749,00 | Rp | 138.565.839,00 |
| 9 | Koreksi Lebih catat Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp2.161.389.585,00 Tahun 2018 | Rp | 2.161.389.585,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

10 Koreksi Lebih catat Transfer Bagi Rp 202.223.882,00
Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa sebesar
Rp202.223.882,00 Tahun 2018

Total Pengurangan

Rp 2.811.573.170,00

**Beban Transfer Bagi Hasil Pajak
Dan Retribusi- LO**

Rp 11.990.795.881,00

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
5.4.6.8 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.058.105.750,00	954.144.750,00	103.961.000,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp1.058.105.750,00 tidak sama dengan Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya – LRA yaitu sebesar Rp954.144.750,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp103.961.000,00 dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya – LRA Penambahan **Rp 954.144.750,00**

- 1 Utang Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan ke Pemprov Jatim bulan Oktober, November, dan Desember 2019 Rp 295.369.750,00
- 2 Koreksi Kurang Catat Utang Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan ke Pemprov Jatim bulan Oktober, November, dan Desember 2019 Rp 29.250,00

Total Penambahan

Rp 295.399.000,00

Pengurangan

- 3 Pembayaran Utang Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan untuk Prop. Jatim bulan November dan Desember 2018 Rp 191.438.000,00

Total Pengurangan

Rp 191.438.000,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya – LO

Rp 1.058.105.750,00

	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
5.4.6.9 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	313.889.016.200,00	313.889.016.200,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO dengan Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

		LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
5.4.6.10	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	983.963.400,00	983.963.400,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik-LO dengan Belanja Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik-LRA.

		LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
5.4.6.11	Belanja Modal	0,00	518.398.600.299,86	(518.398.600.299,86)

Belanja Modal dalam laporan realisasi anggaran sebesar Rp518.398.600.299,86, namun dalam laporan operasional tidak diakui karena Belanja Modal bukan merupakan beban operasional.

		LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
5.4.6.12	Beban Luar Biasa/Belanja Tak Terduga	62.434.500,00	71.758.500,00	9.324.000,00

Beban Luar Biasa sebesar Rp62.434.500,00 tidak sama dengan Belanja Tak Terduga-LRA yaitu sebesar Rp71.758.500,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.324.000,00. Selisih sebesar Rp9.324.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

BELANJA TAK TERDUGA – LRA		Rp	71.758.500,00
Penambahan			
		Rp	0,00
Total Penambahan		Rp	0,00
Pengurangan			
1	Pembayaran utang beban transfer (Bantuan Keuangan) Tahun 2018	Rp	9.324.000,00
Total Pengurangan		Rp	9.324.000,00
BEBAN LUAR BIASA – LO		Rp	62.434.500,00

Pembayaran Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp9.324.000,00 dengan rincian:

1	Pembayaran Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jatim - BPDGS Tahun 2018	Rp	5.400.000,00
2	Pembayaran Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jatim - BOP Madin Tahun 2018	Rp	3.924.000,00
Jumlah		Rp	9.324.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun 2019 dan 2018 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan.

Realisasi Arus Kas Tahun 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 105 Realisasi Arus Kas Tahun 2019 dan 2018

No	Arus Kas dari:	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	457.022.187.364,01	552.444.704.188,73
2	Aktivitas Investasi	(518.277.413.671,86)	(409.658.546.253,41)
3	Aktivitas Pendanaan	18.100.000,00	54.000.000,00
4	Aktivitas Transitoris	(5.186.561,15)	(9.294.102,73)
5	Kenaikan/Penurunan Kas	(61.242.312.869,00)	142.830.863.832,59
6	Saldo Awal Kas	237.738.611.473,26	94.906.421.577,67
7	Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Kapitasi JKN, dan Bendahara BLUD	176.496.298.604,26	237.737.285.410,26
8	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	3.900.000,00	1.326.063,00
9	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
10	Saldo Akhir Kas	176.500.198.604,26	237.738.611.473,26

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	457.022.187.364,01	552.444.704.188,73

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi pada Tahun 2019 surplus sebesar Rp457.022.187.364,01 lebih kecil Rp95.422.516.824,72 atau 17,27% jika dibandingkan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Tahun 2018 sebesar Rp552.444.704.188,73. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemkab Blitar dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari,

Tabel 106 Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 dan 2018

	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Arus Kas Masuk		
1	Penerimaan Pajak Daerah	96.512.500.208,81	89.224.336.207,85
2	Penerimaan Retribusi Daerah	19.458.062.217,00	23.198.217.113,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.390.396.738,95	1.756.190.019,50
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	167.260.569.906,10	138.159.298.660,92
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	15.629.649.121,00	24.042.193.334,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	77.761.304.331,00	83.601.164.013,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.153.914.324.000,00	1.109.812.753.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	374.989.099.138,00	382.043.194.822,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	208.803.347.200,00	199.355.009.000,00
10	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	182.140.214.247,00	157.297.805.936,00
11	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
12	Penerimaan Hibah	92.995.480.000,00	85.179.884.330,82
13	Penerimaan Lainnya	9.055.819.000,00	58.344.900.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk (a)		2.400.910.766.107,86	2.352.014.946.437,09
2	Arus Kas Keluar		
1	Pembayaran Pegawai	954.631.029.391,25	950.509.009.290,25
2	Pembayaran Barang dan Jasa	588.135.137.073,25	496.549.755.686,11
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Hibah	66.603.353.711,35	49.603.445.750,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	7.620.200.000,00	5.670.227.300,00
6	Pembayaran Tidak Terduga	71.758.500,00	916.000,00
7	Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	326.827.100.068,00	297.236.888.222,00
8	Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar (b)		1.943.888.578.743,85	1.799.570.242.248,36
Arus Kas Bersih (a-b)		457.022.187.364,01	552.444.704.188,73

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada arus kas masuk dari aktivitas operasi di Laporan Arus Kas sebesar Rp167.260.569.906,10 berbeda dengan yang disajikan di Laporan Realisasi Anggaran yaitu sebesar Rp167.381.756.534,10 sehingga terdapat selisih sebesar Rp121.186.628,00 (Rp167.381.756.534,10–Rp167.260.569.906,10). Perbedaan sebesar Rp121.186.628,00 tersebut merupakan arus kas yang diklasifikasikan dalam arus kas aktivitas investasi yaitu,

1. Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor Tidak terpakai	Rp	2.165.000,00
2. Penjualan Drum Bekas	Rp	5.300.000,00
3. Penjualan atas Bahan-Bahan Bekas Gedung dan Bangunan	Rp	38.695.628,00
4. Penjualan atas Aset Lainnya/Penjualan Hasil Perkebunan	Rp	75.026.000,00
Jumlah	Rp	121.186.628,00

Penerimaan Hibah pada Laporan Arus Kas diambil dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah pada Laporan Realisasi Anggaran. Hibah tersebut merupakan hibah non tunai dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan Penerimaan Lainnya pada Laporan Arus Kas merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada Laporan Arus Kas sebesar Rp326.827.100.068,00 merupakan Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp	11.954.120.468,00
2. Transfer Bantuan Keuangan	Rp	314.872.979.600,00
Jumlah	Rp	326.827.100.068,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(518.277.413.671,86)	(409.658.546.253,41)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp(518.277.413.671,86) atau lebih tinggi Rp108.618.867.418,45 atau 26,51% jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Tahun 2018 yang defisit sebesar Rp(409,658,546,253.41). Hal tersebut mencerminkan adanya pengadaan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 107 Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2019 dan 2018

Uraian		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Arus Kas Masuk		
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
3	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
4	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5	Penjualan Atas Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
6	Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
7	Penjualan Aset Lainnya	0,00	4.687.500,00
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
9	Penjualan peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak terpakai	2.165.000,00	0,00
10	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
11	Penjualan Drum Bekas	5.300.000,00	33.062.000,00
12	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	38.695.628,00	2.375.000,00
13	Penjualan Hasil Perkebunan	75.026.000,00	75.079.300,00
14	Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk (a)		121.186.628,00	115.203.800,00
2	Arus Kas Keluar		
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Perolehan Tanah	52.138.000,00	463.900.000,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	63.674.475.281,36	53.442.524.791,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	207.849.221.679,34	79.276.207.448,14
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	217.388.334.422,16	263.079.524.173,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	28.468.841.417,00	11.949.962.591,27
7	Perolehan Aset Lainnya	965.589.500,00	1.561.631.050,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus kas Keluar (b)		518.398.600.299,86	409.773.750.053,41
Arus Kas bersih (a-b)		(518.277.413.671,86)	(409.658.546.253,41)

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp121.186.628,00 merupakan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan yang masuk dalam Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	18.100.000,00	54.000.000,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp18.100.000,00 lebih rendah Rp35.900.000,00 atau turun 66,48% jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun 2018 sebesar Rp54.000.000,00. Hal tersebut mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa depan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar atas Aktivitas Pendanaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 108 Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2019 dan 2018

Uraian		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Arus Kas Masuk		
1	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	18.100.000,00	54.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Masuk (a)	18.100.000,00	54.000.000,00
2	Arus Kas Keluar		
1	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar (b)	0,00	0,00
	Arus Kas bersih (a-b)	18.100.000,00	54.000.000,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman pada Laporan Arus Kas merupakan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan Pembayaran Pokok Utang pada Laporan Arus Kas berasal dari Pengeluaran Pembiayaan pos Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri pada Laporan Realisasi Anggaran.

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(5.186.561,15)	(9.294.102,73)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas *netto* yang tidak mempengaruhi anggaran.

Tabel 109 Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2019 dan 2018

Uraian		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Arus Kas Masuk		
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	149.697.038.170,00	137.511.519.997,00
2	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00
3	Pengembalian Belanja	0,00	0,00
4	Penerimaan Sisa Kas UP/TUP Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
5	Koreksi Silpa	39.501,85	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk(a)	149.697.077.671,85	137.511.519.997,00
2	Arus Kas Keluar		
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	149.698.364.233,00	137.511.519.997,00
2	Sisa Kas UP/TUP Bendahara Pengeluaran yang terlambat disetor	3.900.000,00	0,00
3	Koreksi Silpa	0,00	9.294.102,73
	Jumlah Arus Kas Keluar (b)	149.702.264.233,00	137.520.814.099,73
	Arus Kas bersih (a-b)	(5.186.561,15)	(9.294.102,73)



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp.149.697.077.671,85 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp149.697.038.170,00. Penerimaan PFK tersebut tidak termasuk penerimaan pajak yang dilakukan sendiri oleh pihak ketiga tanpa melalui mekanisme transitoris dengan rincian sebagai berikut :

1.	Iuran Wajib Pegawai 8%	Rp	36.333.424.405,00
2.	Taspen	Rp	354.000,00
3.	Askes	Rp	13.734.265.402,00
4.	PPh 21	Rp	41.507.274.385,00
5.	PPh 22	Rp	1.349.858.049,00
6.	PPh 23	Rp	859.649.395,00
7.	PPh 4 (2)	Rp	6.731.631.077,00
8.	PPN	Rp	39.197.212.885,00
9.	Taperum	Rp.	849.340.000,00
10.	Lainnya	Rp	13.515,00
11.	Askes 2 %	Rp	9.100.076.496,00
12.	Pajak Retoran	Rp.	14.550.000,00
13.	Askes Terusan	Rp	19.388.561,00
JUMLAH		Rp	149.697.038.170,00

B. Koreksi Silpa sebesar Rp39.501,85 merupakan koreksi atas saldo kas pada BLUD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :

1.	BLUD Puskesmas Wates	Rp	39.500,00
2.	BLUD Puskesmas Gandusari	Rp	0,92
3.	BLUD Puskesmas Ponggok	Rp	0,25
4.	BLUD Puskesmas Bacem	Rp	0,68
JUMLAH		Rp	39.501,85

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp149.702.264.233,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp149.698.364.233,00 terdiri atas Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp149.697.038.170,00 dan Utang PFK per 31 Desember 2018 yang belum dibayarkan dan berada di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.326.063,00.

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp149.697.038.170,00 tersebut tidak termasuk pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh pihak ketiga tanpa melalui mekanisme transitoris dengan rincian sebagai berikut :

1.	Iuran Wajib Pegawai 8%	Rp	36.333.424.405,00
2.	Taspen	Rp	354.000,00
3.	Askes	Rp	13.734.265.402,00
4.	PPh 21	Rp	41.507.274.385,00
5.	PPh 22	Rp	1.349.858.049,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6.	PPh 23	Rp	859.649.395,00
7.	PPh 4 (2)	Rp	6.731.631.077,00
8.	PPN	Rp	39.197.212.885,00
9.	Taperum	Rp.	849.340.000,00
10.	Lainnya	Rp	13.515,00
11.	Askes 2 %	Rp	9.100.076.496,00
12.	Pajak Retoran	Rp.	14.550.000,00
13.	Askes Terusan	Rp	19.388.561,00
JUMLAH		Rp	149.697.038.170,00

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) atas Utang PFK per 31 Desember 2018 yang belum dibayarkan dan berada di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.326.063,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Kecamatan Selopuro	Rp	672.000,00
2.	Kecamatan Gandusari	Rp	108.563,00
3.	Kecamatan Selorejo	Rp	545.500,00
JUMLAH		Rp	1.326.063,00

- B. Sisa Kas UP pada Bendahara Pengeluaran yang terlambat disetor sebesar Rp3.900.000,00, merupakan uang persediaan Kecamatan Selorejo per 31 Desember 2019 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan masih berada di Bendahara Pengeluaran dalam bentuk kas tunai. Kas tersebut telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 10 Januari 2020.

	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)
5.5.5 Posisi Kas	176.500.198.604,26	237.738.611.473,26

Posisi Kas Akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp176.500.198.604,26 lebih rendah Rp61.238.412.869,00 atau 25,76% jika dibandingkan dengan Posisi Kas Akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp237.738.611.473,26. Posisi Kas Akhir Tahun Anggaran 2019 tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Kapitasi JKN, dan Bendahara BLUD	Rp 176.496.298.604,26
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 3.900.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
Saldo Akhir Kas	Rp 176.500.198.604,26

Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Kapitasi JKN, dan Bendahara BLUD sebesar Rp176.496.298.604,26 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kenaikan/ (Penurunan) Kas Tahun 2019	Rp (61.242.312.869,00)
Saldo awal Kas di BUD, Kas di Bendahara JKN, Kas di BLUD	Rp 237.738.611.473,26
Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Kapitasi JKN, dan Bendahara BLUD	Rp 176.496.298.604,26



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas tahun 2019 sebesar Rp4.021.633.372.273,75 merupakan nilai saldo akhir ekuitas Tahun 2018.
2. Surplus/defisit – LO sebesar Rp221.975.595.973,44 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019.
3. Koreksi Ekuitas Lain sebesar Rp169.021.556.656,81 disebabkan karena adanya koreksi tambah sebesar Rp226.974.818.070,19 dan koreksi kurang sebesar Rp57.953.261.413,38 dengan rincian sebagai berikut:

KOREKSI TAMBAH NILAI EKUITAS

1	Koreksi Nilai Kas	Rp	39.501,85	
2	Koreksi Nilai Piutang	Rp	23.137.115.744,95	
3	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	Rp	93.226.188,50	
4	Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen	Rp	802.846.367,72	
5	Koreksi Nilai Tanah	Rp	24.781.977.306,00	
6	Koreksi Nilai Peralatan Mesin	Rp	10.305.587.237,81	
7	Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan	Rp	5.524.427.880,72	
8	Koreksi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	1.643.096.899,53	
9	Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya	Rp	56.887.700,00	
10	Koreksi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	940.384.806,00	
11	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	143.591.733.981,91	
12	Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp	0,00	
13	Koreksi Nilai Aset Lain-lain-Rusak	Rp	75.838.771,20	
14	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain-Rusak	Rp	0,00	
15	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima di Muka	Rp	0,00	
16	Koreksi Nilai Utang Beban	Rp	4.627.713.034,00	
17	Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	0,00	
18	Koreksi Nilai Beban	Rp	11.393.942.650,00	
JUMLAH KOREKSI TAMBAH NILAI EKUITAS				Rp 226.974.818.070,19

KOREKSI KURANG NILAI EKUITAS

1	Koreksi Nilai Kas	Rp	0,00
2	Koreksi Nilai Piutang	Rp	4.868.208,00
3	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	Rp	0,80
4	Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen	Rp	782.543.476,71
5	Koreksi Nilai Tanah	Rp	2.280.222.500,00
6	Koreksi Nilai Peralatan Mesin	Rp	9.955.366.862,75



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7	Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan	Rp	5.514.159.910,49
8	Koreksi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	1.643.096.898,53
9	Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya	Rp	45.600.700,00
10	Koreksi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	940.384.807,00
11	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	7.853.982.090,56
12	Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp	77.450.000,00
13	Koreksi Nilai Aset Lain-lain-Rusak	Rp	623.172.443,34
14	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain-Rusak	Rp	75.838.771,20
15	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima di Muka	Rp	51.338.250,00
16	Koreksi Nilai Utang Beban	Rp	6.644.327.045,00
17	Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	10.066.966.799,00
18	Koreksi Nilai Beban	Rp	11.393.942.650,00

**JUMLAH KOREKSI KURANG NILAI EKUITAS
KOREKSI EKUITAS**

Rp 57.953.261.413,38
Rp 169.021.556.656,81

Adapun koreksi ekuitas per SKPD disajikan sebagai berikut.

Tabel 110 Koreksi Ekuitas per SKPD Tahun 2019

NO	NAMA SKPD	KOREKSI EKUITAS (Rp)		TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
1	Koreksi Nilai Kas	39.501,85	0,00	39.501,85
1	PUSKESMAS WATES	39.500,00	0,00	39.500,00
2	PUSKESMAS GANDUSARI	0,92	0,00	0,92
3	PUSKESMAS PONGGOK	0,25	0,00	0,25
4	PUSKESMAS BACEM	0,68	0,00	0,68
2	Koreksi Nilai Piutang	23.137.115.744,95	4.868.208,00	23.132.247.536,95
1	BAGIAN UMUM	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	1.803.755.575,95	3.068.200,00	1.800.687.375,95
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	21.333.360.169,00	8,00	21.333.360.161,00
3	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	93.226.188,50	0,80	93.226.187,70
1	BAGIAN UMUM	360.000,00	0,00	360.000,00
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	80.196.188,50	0,00	80.196.188,50
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	12.670.000,00	0,80	12.669.999,20
4	Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen	802.846.367,72	782.543.476,71	20.302.891,01
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	802.846.367,72	782.543.476,71	20.302.891,01
5	Koreksi Nilai Tanah	24.781.977.306,00	2.280.222.500,00	22.501.754.806,00
1	DINAS PENDIDIKAN	2.661.634.675,00	0,00	2.661.634.675,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA SKPD	KOREKSI EKUITAS (Rp)		TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.186.226.308,00	0,00	17.186.226.308,00
3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	787.200.000,00	0,00	787.200.000,00
4	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.489.120.000,00	0,00	1.489.120.000,00
5	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	17.312.363,00	787.200.000,00	(769.887.637,00)
6	KECAMATAN WLINGI	37.669.000,00	0,00	37.669.000,00
7	KECAMATAN GANDUSARI	0,00	3.902.500,00	(3.902.500,00)
8	KECAMATAN GARUM	1.333.104.000,00	0,00	1.333.104.000,00
9	KECAMATAN KANIGORO	107.094.000,00	0,00	107.094.000,00
10	KECAMATAN PANGGUNGREJO	8.470.000,00	0,00	8.470.000,00
11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	1.057.246.960,00	1.489.120.000,00	(431.873.040,00)
12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	96.900.000,00	0,00	96.900.000,00
6	Koreksi Nilai Peralatan Mesin	10.305.587.237,81	9.955.366.862,75	350.220.375,06
1	DINAS PENDIDIKAN	26.660.417,00	0,00	26.660.417,00
2	DINAS KESEHATAN	0,00	5.307.952.285,00	(5.307.952.285,00)
3	PUSKESMAS BAKUNG	175.335.095,00	0,00	175.335.095,00
4	PUSKESMAS WONOTIRTO	206.248.513,00	0,00	206.248.513,00
5	PUSKESMAS MARGOMULYO	205.033.364,00	0,00	205.033.364,00
6	PUSKESMAS WATES	224.371.574,00	0,00	224.371.574,00
7	PUSKESMAS BINANGUN	174.791.342,00	0,00	174.791.342,00
8	PUSKESMAS SUTOJAYAN	291.234.434,00	0,00	291.234.434,00
9	PUSKESMAS KADEMANGAN	214.767.921,00	0,00	214.767.921,00
10	PUSKESMAS KANIGORO	185.770.068,00	0,00	185.770.068,00
11	PUSKESMAS TALUN	287.422.761,00	0,00	287.422.761,00
12	PUSKESMAS SELOPURO	225.586.142,00	0,00	225.586.142,00
13	PUSKESMAS KESAMBEN	305.997.013,00	0,00	305.997.013,00
14	PUSKESMAS BORO	142.573.163,00	0,00	142.573.163,00
15	PUSKESMAS DOKO	219.659.398,00	0,00	219.659.398,00
16	PUSKESMAS WLINGI	191.538.644,00	0,00	191.538.644,00
17	PUSKESMAS GANDUSARI	167.976.878,00	0,00	167.976.878,00
18	PUSKESMAS SLUMBUNG	94.926.724,00	0,00	94.926.724,00
19	PUSKESMAS GARUM	68.959.213,00	0,00	68.959.213,00
20	PUSKESMAS NGLEGOK	438.109.642,00	0,00	438.109.642,00
21	PUSKESMAS SANANKULON	216.830.781,00	0,00	216.830.781,00
22	PUSKESMAS PONGGOK	628.093.566,00	0,00	628.093.566,00
23	PUSKESMAS BACEM	155.220.318,00	0,00	155.220.318,00
24	PUSKESMAS SRENGAT	139.548.975,00	0,00	139.548.975,00
25	PUSKESMAS WONODADI	171.232.128,00	0,00	171.232.128,00
26	PUSKESMAS UDANAWU	176.724.628,00	0,00	176.724.628,00
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	94.044.047,34	0,00	94.044.047,34
28	DINAS SOSIAL	7.760.714,00	0,00	7.760.714,00
29	DINAS TENAGA KERJA	36.492.857,00	0,00	36.492.857,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA SKPD	KOREKSI EKUITAS (Rp)		TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	419.888.529,00	(419.888.529,00)
31	DINAS PERHUBUNGAN	45.126.190,00	0,00	45.126.190,00
32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	286.842.957,14	0,00	286.842.957,14
33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	77.416.337,00	0,00	77.416.337,00
34	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	176.387.792,00	0,00	176.387.792,00
35	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	73.272.558,00	(73.272.558,00)
36	BAGIAN PEMERINTAHAN	269.079.333,33	0,00	269.079.333,33
37	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	260.846.000,00	36.492.857,00	224.353.143,00
38	BAGIAN HUKUM	260.846.000,00	36.492.857,00	224.353.143,00
39	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	260.846.000,00	0,00	260.846.000,00
40	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	290.527.600,00	0,00	290.527.600,00
41	BAGIAN ORGANISASI	260.846.000,00	45.126.190,00	215.719.810,00
42	BAGIAN UMUM	1.274.976.000,00	0,00	1.274.976.000,00
43	BAGIAN PERLENGKAPAN	0,00	3.723.980.772,67	(3.723.980.772,67)
44	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	298.622.000,00	0,00	298.622.000,00
45	SEKRETARIAT DPRD	0,00	61.810.714,00	(61.810.714,00)
46	KECAMATAN SELOPURO	3.190.750,00	0,00	3.190.750,00
47	KECAMATAN WLINGI	189.519.342,00	0,00	189.519.342,00
48	KECAMATAN TALUN	20.810.767,00	0,00	20.810.767,00
49	KECAMATAN GANDUSARI	5.166.750,00	0,00	5.166.750,00
50	KECAMATAN GARUM	35.844.102,00	0,00	35.844.102,00
51	KECAMATAN KANIGORO	49.987.210,00	0,00	49.987.210,00
52	KECAMATAN SUTOJAYAN	140.771.309,00	0,00	140.771.309,00
53	KECAMATAN BINANGUN	12.281.808,00	0,00	12.281.808,00
54	KECAMATAN WATES	3.655.208,00	0,00	3.655.208,00
55	KECAMATAN KADEMANGAN	140.771.309,00	0,00	140.771.309,00
56	KECAMATAN SRENGAT	31.695.852,00	0,00	31.695.852,00
57	KECAMATAN WONODADI	4.560.300,00	0,00	4.560.300,00
58	KECAMATAN UDANAWU	28.728.452,00	0,00	28.728.452,00
59	KECAMATAN NGLEGOK	28.728.452,00	0,00	28.728.452,00
60	KECAMATAN SELOREJO	43.593.069,00	0,00	43.593.069,00
61	INSPEKTORAT DAERAH	331.010.000,00	0,00	331.010.000,00
62	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	0,00	250.350.100,00	(250.350.100,00)
63	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	28,00	0,08	27,92
7	Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan	5.524.427.880,72	5.514.159.910,49	10.267.970,23
1	DINAS KESEHATAN	0,00	3.469.267.865,45	(3.469.267.865,45)
2	PUSKESMAS BAKUNG	337.729.240,00	0,00	337.729.240,00
3	PUSKESMAS SELOPURO	346.552.892,00	0,00	346.552.892,00
4	PUSKESMAS DOKO	141.471.202,00	0,00	141.471.202,00
5	PUSKESMAS NGLEGOK	789.207.193,00	0,00	789.207.193,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA SKPD	KOREKSI EKUITAS (Rp)		TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
6	PUSKESMAS BACEM	194.410.447,00	0,00	194.410.447,00
7	PUSKESMAS SRENGAT	356.529.012,00	0,00	356.529.012,00
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1.758.596.113,00	0,00	1.758.596.113,00
9	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	214.912.687,95	40.687.784,45	174.224.903,50
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	1.786.181.004,64	(1.786.181.004,64)
11	KECAMATAN NGLEGOK	0,00	4.441.668,00	(4.441.668,00)
12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	1.385.019.093,77	213.581.587,95	1.171.437.505,82
8	Koreksi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.643.096.899,53	1.643.096.898,53	1,00
1	DINAS KESEHATAN	0,00	1.069.553.116,44	(1.069.553.116,44)
2	PUSKESMAS SUTOJAYAN	175.969.069,00	0,00	175.969.069,00
3	PUSKESMAS SELOPURO	213.536.873,00	0,00	213.536.873,00
4	PUSKESMAS SLUMBUNG	214.737.252,00	0,00	214.737.252,00
5	PUSKESMAS SRENGAT	465.309.922,44	0,00	465.309.922,44
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	152.607.650,06	(152.607.650,06)
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	28.185.681,59	(28.185.681,59)
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	330.471.556,00	0,00	330.471.556,00
9	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	53.869.444,44	0,00	53.869.444,44
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	330.471.556,00	(330.471.556,00)
11	KECAMATAN SUTOJAYAN	0,00	8.409.450,00	(8.409.450,00)
12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	189.202.781,65	53.869.444,44	135.333.337,21
13	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	1,00	0,00	1,00
9	Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya	56.887.700,00	45.600.700,00	11.287.000,00
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	30.092.700,00	(30.092.700,00)
2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	36.743.000,00	0,00	36.743.000,00
3	KECAMATAN SELOPURO	1.243.500,00	0,00	1.243.500,00
4	KECAMATAN WLINGI	6.714.900,00	0,00	6.714.900,00
5	KECAMATAN TALUN	2.984.400,00	0,00	2.984.400,00
6	KECAMATAN GANDUSARI	2.487.000,00	0,00	2.487.000,00
7	KECAMATAN GARUM	1.243.500,00	0,00	1.243.500,00
8	KECAMATAN KANIGORO	4.227.900,00	0,00	4.227.900,00
9	KECAMATAN SELOREJO	1.243.500,00	0,00	1.243.500,00
10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	0,00	15.508.000,00	(15.508.000,00)
10	Koreksi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	940.384.806,00	940.384.807,00	(1,00)
1	DINAS KESEHATAN	0,00	940.384.806,00	(940.384.806,00)
2	PUSKESMAS WONOTIRTO	320.809.278,00	0,00	320.809.278,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA SKPD	KOREKSI EKUITAS (Rp)		TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
3	PUSKESMAS WATES	352.429.710,00	0,00	352.429.710,00
4	PUSKESMAS WONODADI	267.145.818,00	0,00	267.145.818,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	1,00	(1,00)
11	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	143.591.733.981,91	7.853.982.090,56	135.737.751.891,35
1	DINAS PENDIDIKAN	12.324.789.906,58	1.230.082.225,00	11.094.707.681,58
2	DINAS KESEHATAN	6.981.258.556,33	48.587.845,56	6.932.670.710,77
3	PUSKESMAS BAKUNG	70.263.889,00	13.527.126,00	56.736.763,00
4	PUSKESMAS WONOTIRTO	119.363.239,00	0,00	119.363.239,00
5	PUSKESMAS MARGOMULYO	124.942.006,00	0,00	124.942.006,00
6	PUSKESMAS WATES	135.799.699,00	10.601.383,00	125.198.316,00
7	PUSKESMAS BINANGUN	99.955.120,00	29.894.557,00	70.060.563,00
8	PUSKESMAS SUTOJAYAN	134.004.916,00	0,00	134.004.916,00
9	PUSKESMAS KADEMANGAN	142.330.724,00	0,00	142.330.724,00
10	PUSKESMAS KANIGORO	143.131.028,00	2.885.554,00	140.245.474,00
11	PUSKESMAS TALUN	166.572.105,00	1,00	166.572.104,00
12	PUSKESMAS SELOPURO	64.646.343,00	4.766.190,00	59.880.153,00
13	PUSKESMAS KESAMBEN	154.543.809,00	4.347.200,00	150.196.609,00
14	PUSKESMAS BORO	64.898.562,00	8.277.781,00	56.620.781,00
15	PUSKESMAS DOKO	71.104.652,00	23.347.740,00	47.756.912,00
16	PUSKESMAS WLINGI	345.017.753,00	0,00	345.017.753,00
17	PUSKESMAS GANDUSARI	149.757.589,00	29.877.264,00	119.880.325,00
18	PUSKESMAS SLUMBUNG	63.432.446,00	23.098.083,00	40.334.363,00
19	PUSKESMAS GARUM	138.738.276,00	0,00	138.738.276,00
20	PUSKESMAS NGLEGOK	142.203.536,00	0,00	142.203.536,00
21	PUSKESMAS SANANKULON	190.267.000,00	0,00	190.267.000,00
22	PUSKESMAS PONGGOK	123.699.353,00	24.688.624,00	99.010.729,00
23	PUSKESMAS BACEM	156.267.992,00	0,00	156.267.992,00
24	PUSKESMAS SRENGAT	190.034.466,00	18.690.122,00	171.344.344,00
25	PUSKESMAS WONODADI	104.526.806,00	17.586.937,00	86.939.869,00
26	PUSKESMAS UDANAWU	125.179.501,00	0,00	125.179.501,00
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9.928.757.654,00	0,00	9.928.757.654,00
28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	78.456.357.001,00	0,00	78.456.357.001,00
29	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.937.589.059,00	2.400.000,00	8.935.189.059,00
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	762.608.663,00	36.067.500,00	726.541.163,00
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	142.499.927,00	0,00	142.499.927,00
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.619.216.433,00	1,00	2.619.216.432,00
33	DINAS SOSIAL	250.464.069,00	18.793.833,00	231.670.236,00
34	DINAS TENAGA KERJA	230.883.911,00	0,00	230.883.911,00
35	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	934.044.069,00	0,00	934.044.069,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA SKPD	KOREKSI EKUITAS (Rp)		TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.248.285.830,00	112.695.433,00	1.135.590.397,00
37	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	524.537.339,00	0,00	524.537.339,00
38	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	230.281.874,00	24.498.016,00	205.783.858,00
39	DINAS PERHUBUNGAN	2.486.867.898,00	6.367.407,00	2.480.500.491,00
40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	486.407.756,00	0,00	486.407.756,00
41	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	216.095.473,00	174.360,00	215.921.113,00
42	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	271.970.769,00	0,00	271.970.769,00
43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	178.858.276,00	0,00	178.858.276,00
44	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	424.685.419,00	1.181.678.891,00	(756.993.472,00)
45	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	655.525.909,00	50.693.511,00	604.832.398,00
46	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1.188.601.090,00	1,00	1.188.601.089,00
47	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	900.897.102,00	31.917,00	900.865.185,00
48	BAGIAN PEMERINTAHAN	41.128.538,00	0,00	41.128.538,00
49	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	46.784.498,00	2.945.653,00	43.838.845,00
50	BAGIAN HUKUM	56.482.981,00	0,00	56.482.981,00
51	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	28.595.144,00	0,00	28.595.144,00
52	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	79.799.289,00	12.650.000,00	67.149.289,00
53	BAGIAN ORGANISASI	63.526.943,00	0,00	63.526.943,00
54	BAGIAN UMUM	1.238.734.590,00	0,00	1.238.734.590,00
55	BAGIAN PERLENGKAPAN	1.142.422.175,00	1.582.871.285,00	(440.449.110,00)
56	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	65.239.816,00	0,00	65.239.816,00
57	SEKRETARIAT DPRD	1.373.021.701,00	1.256.469,00	1.371.765.232,00
58	KECAMATAN SELOPURO	52.078.936,00	124.288.500,00	(72.209.564,00)
59	KECAMATAN WLINGI	766.255.985,00	90.822.112,00	675.433.873,00
60	KECAMATAN TALUN	424.075.754,00	4.710.167,00	419.365.587,00
61	KECAMATAN GANDUSARI	105.084.707,00	1.953.875,00	103.130.832,00
62	KECAMATAN DOKO	103.626.440,00	15.533.839,00	88.092.601,00
63	KECAMATAN GARUM	323.457.323,00	15.833,00	323.441.490,00
64	KECAMATAN KANIGORO	93.670.152,00	106.244.486,00	(12.574.334,00)
65	KECAMATAN SUTOJAYAN	539.956.863,00	1.167.954.608,00	(627.997.745,00)
66	KECAMATAN BINANGUN	57.633.865,00	0,00	57.633.865,00
67	KECAMATAN WATES	60.025.930,00	28.315.510,00	31.710.420,00
68	KECAMATAN PANGGUNGREJO	51.125.000,00	28.391.061,00	22.733.939,00
69	KECAMATAN WONOTIRTO	101.089.869,00	0,00	101.089.869,00
70	KECAMATAN BAKUNG	173.451.687,00	0,00	173.451.687,00
71	KECAMATAN KADEMANGAN	69.427.936,00	112.785.850,00	(43.357.914,00)
72	KECAMATAN SANANKULON	50.439.408,00	29.708.495,00	20.730.913,00
73	KECAMATAN SRENGAT	579.862.565,00	1.415.358,00	578.447.207,00
74	KECAMATAN WONODADI	69.026.434,00	43.945.100,00	25.081.334,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA SKPD	KOREKSI EKUITAS (Rp)		TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
75	KECAMATAN UDANAWU	49.398.658,00	22.493.857,00	26.904.801,00
76	KECAMATAN PONGGOK	59.587.300,00	0,00	59.587.300,00
77	KECAMATAN NGLEGOK	112.274.231,00	93.348.067,00	18.926.164,00
78	KECAMATAN SELOREJO	49.820.415,00	35.506.013,00	14.314.402,00
79	KECAMATAN KESAMBEN	67.120.614,00	0,00	67.120.614,00
80	INSPEKTORAT DAERAH	331.130.127,00	0,00	331.130.127,00
81	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	235.080.846,00	0,00	235.080.846,00
82	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	556.811.419,00	1.389.137.282,00	(832.325.863,00)
83	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	133.316.893,00	7.563.902,00	125.752.991,00
84	BADAN PENDAPATAN DAERAH	290.902.858,00	0,00	290.902.858,00
85	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	348.101.298,00	26.465.266,00	321.636.032,00
12	Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	77.450.000,00	(77.450.000,00)
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	0,00	77.450.000,00	(77.450.000,00)
13	Koreksi Nilai Aset Lain-lain-Rusak	75.838.771,20	623.172.443,34	(547.333.672,14)
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	17.205.000,00	(17.205.000,00)
2	DINAS TENAGA KERJA	0,00	36.721.800,00	(36.721.800,00)
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	177.481.843,34	(177.481.843,34)
4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	53.018.800,00	(53.018.800,00)
5	BAGIAN UMUM	75.838.771,20	0,00	75.838.771,20
6	KECAMATAN BINANGUN	0,00	1.510.000,00	(1.510.000,00)
7	KECAMATAN WATES	0,00	68.387.000,00	(68.387.000,00)
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	268.848.000,00	(268.848.000,00)
14	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain-Rusak	0,00	75.838.771,20	(75.838.771,20)
1	BAGIAN UMUM	0,00	75.838.771,20	(75.838.771,20)
15	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima di Muka	0,00	51.338.250,00	(51.338.250,00)
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	0,00	51.338.250,00	(51.338.250,00)
16	Koreksi Nilai Utang Beban	4.627.713.034,00	6.644.327.045,00	(2.016.614.011,00)
1	DINAS PENDIDIKAN	0,00	433.141.723,00	(433.141.723,00)
2	DINAS KESEHATAN	336.886.925,00	146.645.960,00	190.240.965,00
3	PUSKESMAS BINANGUN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
4	PUSKESMAS KESAMBEN	0,00	76,00	(76,00)
5	PUSKESMAS BORO	431.000,00	736.987,00	(305.987,00)
6	PUSKESMAS DOKO	650,00	0,00	650,00
7	PUSKESMAS WLINGI	186.450,00	0,00	186.450,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	171.988.261,00	(171.988.261,00)
9	DINAS PERUMAHAN DAN	0,00	75.699.857,00	(75.699.857,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA SKPD	KOREKSI EKUITAS (Rp)		TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
	KAWASAN PERMUKIMAN			
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.402,00	126.218.317,00	(126.213.915,00)
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	60.971.237,00	(60.971.237,00)
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	49.780.154,00	(49.780.154,00)
13	DINAS SOSIAL	0,00	71.915.395,00	(71.915.395,00)
14	DINAS TENAGA KERJA	0,00	60.353.384,00	(60.353.384,00)
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	64.338.511,00	(64.338.511,00)
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	92.702.754,00	(92.702.754,00)
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	63.736.089,00	(63.736.089,00)
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	68.210.982,00	(68.210.982,00)
19	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	92.534.256,00	(92.534.256,00)
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	52.978.266,00	(52.978.266,00)
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	0,00	75.591.288,00	(75.591.288,00)
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100.000,00	67.446.666,00	(67.346.666,00)
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	0,00	44.475.158,00	(44.475.158,00)
24	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0,00	80.618.376,00	(80.618.376,00)
25	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	190.600,00	297.112.170,00	(296.921.570,00)
26	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	0,00	130.265.852,00	(130.265.852,00)
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	117.155.034,00	(117.155.034,00)
28	BAGIAN UMUM	0,00	277.215.854,00	(277.215.854,00)
29	SEKRETARIAT DPRD	0,00	102.761.640,00	(102.761.640,00)
30	KECAMATAN SELOPURO	0,00	27.307.483,00	(27.307.483,00)
31	KECAMATAN WLINGI	0,00	95.689.629,00	(95.689.629,00)
32	KECAMATAN TALUN	0,00	83.369.467,00	(83.369.467,00)
33	KECAMATAN GANDUSARI	0,00	37.988.928,00	(37.988.928,00)
34	KECAMATAN DOKO	0,00	36.401.798,00	(36.401.798,00)
35	KECAMATAN GARUM	0,00	67.893.046,00	(67.893.046,00)
36	KECAMATAN KANIGORO	0,00	44.493.120,00	(44.493.120,00)
37	KECAMATAN SUTOJAYAN	0,00	114.302.825,00	(114.302.825,00)
38	KECAMATAN BINANGUN	0,00	37.575.900,00	(37.575.900,00)
39	KECAMATAN WATES	0,00	34.317.972,00	(34.317.972,00)
40	KECAMATAN PANGGUNGREJO	0,00	24.697.260,00	(24.697.260,00)
41	KECAMATAN WONOTIRTO	0,00	27.841.734,00	(27.841.734,00)
42	KECAMATAN BAKUNG	0,00	35.810.100,00	(35.810.100,00)
43	KECAMATAN KADEMANGAN	0,00	45.683.532,00	(45.683.532,00)
44	KECAMATAN SANANKULON	0,00	33.319.854,00	(33.319.854,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA SKPD	KOREKSI EKUITAS (Rp)		TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
45	KECAMATAN SRENGAT	638.773,00	88.939.650,00	(88.300.877,00)
46	KECAMATAN WONODADI	0,00	34.739.100,00	(34.739.100,00)
47	KECAMATAN UDANAWU	0,00	37.229.670,00	(37.229.670,00)
48	KECAMATAN PONGGOK	0,00	36.167.164,00	(36.167.164,00)
49	KECAMATAN NGLEGOK	0,00	39.980.283,00	(39.980.283,00)
50	KECAMATAN SELOREJO	0,00	28.799.874,00	(28.799.874,00)
51	KECAMATAN KESAMBEN	70.175,00	35.479.835,00	(35.409.660,00)
52	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	131.977.343,00	(131.977.343,00)
53	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	92.010.932,00	(92.010.932,00)
54	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	4.279.665.769,00	56.539,00	4.279.609.230,00
55	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	8.338.290,00	2.363.613.467,00	(2.355.275.177,00)
56	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	87.496.038,00	(87.496.038,00)
57	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	96.550.255,00	(96.550.255,00)
17	Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	10.066.966.799,00	(10.066.966.799,00)
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	0,00	10.066.966.799,00	(10.066.966.799,00)
18	Koreksi Nilai Beban	11.393.942.650,00	11.393.942.650,00	0,00
1	DINAS KESEHATAN	0,00	11.230.115.525,00	(11.230.115.525,00)
2	PUSKESMAS BAKUNG	271.195.482,00	0,00	271.195.482,00
3	PUSKESMAS WONOTIRTO	202.794.666,00	0,00	202.794.666,00
4	PUSKESMAS MARGOMULYO	291.700.957,00	0,00	291.700.957,00
5	PUSKESMAS WATES	404.600.606,00	0,00	404.600.606,00
6	PUSKESMAS BINANGUN	329.855.542,00	0,00	329.855.542,00
7	PUSKESMAS SUTOJAYAN	559.368.507,00	0,00	559.368.507,00
8	PUSKESMAS KADEMANGAN	508.644.945,00	0,00	508.644.945,00
9	PUSKESMAS KANIGORO	296.439.479,00	0,00	296.439.479,00
10	PUSKESMAS TALUN	603.916.758,00	0,00	603.916.758,00
11	PUSKESMAS SELOPURO	376.209.403,00	0,00	376.209.403,00
12	PUSKESMAS KESAMBEN	467.851.895,00	0,00	467.851.895,00
13	PUSKESMAS BORO	362.352.130,00	0,00	362.352.130,00
14	PUSKESMAS DOKO	435.067.757,00	0,00	435.067.757,00
15	PUSKESMAS WLINGI	387.438.129,00	0,00	387.438.129,00
16	PUSKESMAS GANDUSARI	462.868.688,00	0,00	462.868.688,00
17	PUSKESMAS SLUMBUNG	191.382.772,00	0,00	191.382.772,00
18	PUSKESMAS GARUM	496.395.577,00	0,00	496.395.577,00
19	PUSKESMAS NGLEGOK	459.453.717,00	0,00	459.453.717,00
20	PUSKESMAS SANANKULON	376.322.371,00	0,00	376.322.371,00
21	PUSKESMAS PONGGOK	462.597.391,00	0,00	462.597.391,00
22	PUSKESMAS BACEM	239.397.907,00	0,00	239.397.907,00
23	PUSKESMAS SRENGAT	753.910.690,00	0,00	753.910.690,00
24	PUSKESMAS WONODADI	409.096.512,00	0,00	409.096.512,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA SKPD	KOREKSI EKUITAS (Rp)		TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
25	PUSKESMAS UDANAWU	410.763.915,00	0,00	410.763.915,00
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.470.489.729,00	0,00	1.470.489.729,00
27	KECAMATAN WLINGI	0,00	35.618.384,00	(35.618.384,00)
28	KECAMATAN TALUN	0,00	101.481.480,00	(101.481.480,00)
29	KECAMATAN GANDUSARI	0,00	18.529.500,00	(18.529.500,00)
30	KECAMATAN GARUM	0,00	6.007.490,00	(6.007.490,00)
31	KECAMATAN SUTOJAYAN	0,00	2.190.271,00	(2.190.271,00)
32	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	163.827.125,00	0,00	163.827.125,00
		226.974.818.070,19	57.953.261.413,38	169.021.556.656,81



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.7 Penjelasan Perbedaan LRA

Penjelasan perbedaan antara Laporan Realisasi Lampiran I Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dengan LRA pada Laporan Pokok di CaLK dikarenakan LRA Perda LKPD 2019 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sedangkan LRA CaLK 2019 sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.7.1 Penjelasan Perbedaan antara LRA CaLK 2019 dengan LRA Lampiran I Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019

Tabel 111. Perbedaan antara LRA CaLK 2018 dengan LRA Lampiran I Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019

No	LRA CaLK 2019 (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)			LRA Lampiran I Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2019		
	Kode Rekening	Uraian	<u>Anggaran</u> Realisasi	Kode Rekening	Uraian	<u>Anggaran</u> Realisasi
1	4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA		1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
	4 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LRA	<u>9.055.819.000,00</u> 9.055.819.000,00	1 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya	<u>9.055.819.000,00</u> 9.055.819.000,00
2	5 . 1	BELANJA OPERASI		2 . 1	BELANJA OPERASI	
	5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	<u>1.032.616.040.568,37</u> 954.631.029.391,25	2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	<u>1.054.894.296.568,37</u> 974.581.310.017,25
	5 . 1 . 2	Belanja Barang Jasa				
	5 . 1 . 2 . 25	Belanja Honorarium PNS	<u>19.955.861.000,00</u> 17.980.909.750,00			
	5 . 1 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				
	5 . 1 . 2 . 27 . 03	Belanja Uang Untuk Hadiah Lomba	<u>1.792.395.000,00</u> 1.588.335.000,00			
	5 . 1 . 2 . 31	Honorarium Pengelolaan BLUD	<u>530.000.000,00</u> 381.035.876,00			
	Jumlah		<u>1.054.894.296.568,37</u> 974.581.310.017,25	Jumlah		<u>1.054.894.296.568,37</u> 974.581.310.017,25
3	5 . 1	BELANJA OPERASI		2 . 1	BELANJA OPERASI	
	5 . 1 . 2	Belanja Barang Jasa	<u>619.500.984.056,66</u> 588.135.137.073,25	2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	
					Belanja Honorarium PNS	<u>19.955.861.000,00</u> 17.980.909.750,00
					Belanja Uang Untuk Hadiah Lomba	<u>1.792.395.000,00</u> 1.588.335.000,00
					Honorarium Pengelolaan BLUD	<u>530.000.000,00</u> 381.035.876,00
					Belanja Barang untuk Hadiah Lomba	<u>4.593.615.000,00</u> 4.496.241.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	LRA CaLK 2019 (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)			LRA Lampiran I Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2019		
	Kode Rekening	Uraian	Anggaran Realisasi	Kode Rekening	Uraian	Anggaran Realisasi
				2 . 1 . 2	Belanja Barang	<u>592.629.113.056,66</u> 563.688.615.447,25
	Jumlah		<u>619.500.984.056,66</u> 588.135.137.073,25	Jumlah		<u>619.500.984.056,66</u> 588.135.137.073,25
4	5 . 1	BELANJA OPERASI		2 . 1	BELANJA OPERASI	
	5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa		2 . 1 . 2	Belanja Hibah	<u>74.099.305.771,00</u> 71.099.594.711,35
	5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	<u>4.593.615.000,00</u> 4.496.241.000,00			
	5 . 1 . 5	Belanja Hibah	<u>69.505.690.771,00</u> 66.603.353.711,35			
	Jumlah		<u>74.099.305.771,00</u> 71.099.594.711,35	Jumlah		<u>74.099.305.771,00</u> 71.099.594.711,35

5.7.2 Penjelasan Perbedaan antara LRA CaLK 2019 dengan LRA Lampiran I Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019

Tabel 112. Penjelasan Perbedaan antara LRA CaLK 2019 dengan LRA Lampiran I Perbup. Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019

No	LRA CaLK 2019 (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)			LRA Lampiran I Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2019		
	Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Realisasi	Kode Rekening	Uraian	Anggaran Realisasi
1	4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA		4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	
	4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	<u>209.083.790.000,00</u> 208.803.347.200,00	4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	<u>209.083.790.000,00</u> 208.803.347.200,00
	4 . 2 . 2 . 03	Dana Penyesuaian - LRA	<u>209.083.790.000,00</u> 208.803.347.200,00	4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	<u>23.279.135.000,00</u> 23.279.135.000,00
				4 . 3 . 4 . 04	Dana Desa	<u>185.804.655.000,00</u> 185.524.212.200,00
	4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	<u>154.362.101.686,00</u> 182.140.214.247,00	4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	<u>154.362.101.686,00</u> 182.140.214.247,00
	4 . 2 . 3 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	<u>154.362.101.686,00</u> 182.140.214.247,00	4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	<u>154.362.101.686,00</u> 182.140.214.247,00
	4 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LRA	<u>9.055.819.000,00</u> 9.055.819.000,00	4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	<u>9.055.819.000,00</u> 9.055.819.000,00
				4 . 3 . 5 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	<u>9.055.819.000,00</u> 9.055.819.000,00
2	5 . 1	BELANJA OPERASI		5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
	5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	<u>1.032.616.040.568,37</u> 954.631.029.391,25	5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	<u>1.032.016.417.668,37</u> 954.069.778.391,25



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	LRA CaLK 2019 (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)			LRA Lampiran I Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2019		
	Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Realisasi	Kode Rekening	Uraian	Anggaran Realisasi
				5 . 2	BELANJA LANGSUNG	
				5 . 2 . 1 . 02	Uang Lembur	<u>599.622.900,00</u> 561.251.000,00
	Jumlah		<u>1.032.616.040.568,37</u> 954.631.029.391,25	Jumlah		<u>1.032.616.040.568,37</u> 954.631.029.391,25
3	5 . 1	BELANJA OPERASI		5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
	5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa		5 . 1 . 4	Belanja Hibah	<u>50.376.975.500,00</u> 48.203.225.500,00
	5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	<u>4.593.615.000,00</u> 4.496.241.000,00	5 . 2	BELANJA LANGSUNG	
	5 . 1 . 5	Belanja Hibah	<u>69.505.690.771,00</u> 66.603.353.711,35	5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	
				5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	<u>23.722.330.271,00</u> 22.896.369.211,35
	Jumlah		<u>74.099.305.771,00</u> 71.099.594.711,35	Jumlah		<u>74.099.305.771,00</u> 71.099.594.711,35
4	5 . 1	BELANJA OPERASI		5 . 2	BELANJA LANGSUNG	
	5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa		5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	
	5 . 1 . 2 . 25	Belanja Honorarium PNS	<u>19.955.861.000,00</u> 17.980.909.750,00	5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS/Non PNS	<u>19.955.861.000,00</u> 17.980.909.750,00
	5 . 1 . 2 . 32	Belanja Honorarium Pengelolaan BLUD	<u>530.000.000,00</u> 381.035.876,00	5 . 2 . 1 . 03	Belanja Pegawai BLUD	<u>530.000.000,00</u> 381.035.876,00
5	5 . 1	BELANJA OPERASI		5 . 2	BELANJA LANGSUNG	
	5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa		5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	
	5 . 1 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	<u>16.871.673.000,00</u> 16.038.254.000,00	5 . 2 . 2 . 27	Belanja Transport Lokal Non PNS	<u>15.079.278.000,00</u> 14.449.919.000,00
				5 . 2 . 2 . 28	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	<u>1.792.395.000,00</u> 1.588.335.000,00
	Jumlah		<u>16.871.673.000,00</u> 16.038.254.000,00	Jumlah		<u>16.871.673.000,00</u> 16.038.254.000,00
6	5 . 1	BELANJA OPERASI		5 . 2	BELANJA LANGSUNG	
	5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa		5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	
	5 . 1 . 2 . 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	<u>21.313.521.750,00</u> 20.113.758.577,00	5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dan Non PNS	<u>21.013.521.750,00</u> 19.858.758.577,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	LRA CaLK 2019 (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)			LRA Lampiran I Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2019		
	Kode Rekening	Nama Rekening	<u>Anggaran</u> Realisasi	Kode Rekening	Uraian	<u>Anggaran</u> Realisasi
				5 . 2 . 2 . 24	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD	<u>300.000.000,00</u> 255.000.000,00
	Jumlah		<u>21.313.521.750,00</u> 20.113.758.577,00	Jumlah		<u>21.313.521.750,00</u> 20.113.758.577,00
7	6	TRANSFER		5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
	6 . 1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	<u>12.078.426.519,28</u> 11.954.120.468,00	5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	<u>12.078.426.519,28</u> 11.954.120.468,00
	6 . 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	<u>315.574.847.500,00</u> 314.872.979.600,00	5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	<u>315.574.847.500,00</u> 314.872.979.600,00
			<u>327.653.274.019,28</u> 326.827.100.068,00			<u>327.653.274.019,28</u> 326.827.100.068,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.7.2 Konversi Format Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019 disajikan berdasarkan format sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyajian tersebut berbeda dengan penyajian APBD Tahun 2019, sehingga perlu dilakukan konversi dari format APBD menjadi format LRA.

Konsep konversi dari format APBD menjadi format LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 113. Konversi format APBD menjadi format LRA

No.	Kelompok Pendapatan dan Belanja berdasarkan SAP	Sumber Data
I	PENDAPATAN	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
	a. Pendapatan Pajak Daerah	Jenis Pendapatan Pajak Daerah;Kelompok Pendapatan Asli Daerah
	b. Pendapatan Retribusi Daerah	Jenis Pendapatan Retribusi Daerah;Kelompok Pendapatan Asli Daerah
	c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Kelompok Pendapatan Asli Daerah
	d. Lain-lain PAD yang sah	Jenis Lain-lain PAD yang sah;Kelompok Pendapatan Asli Daerah
2.	PENDAPATAN TRANSFER	
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
	1) Bagi Hasil Pajak	Obyek Bagi Hasil Pajak; Jenis Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak; Kelompok Dana Perimbangan
	2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Obyek Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam; Jenis Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak; Kelompok Dana Perimbangan
	3) Dana Alokasi Umum	Obyek Dana Alokasi Umum; Jenis Dana Alokasi Umum; Kelompok Dana Perimbangan
	4) Dana Alokasi Khusus	Obyek Dana Alokasi Khusus; Jenis Dana Alokasi Khusus; Kelompok Dana Perimbangan
	b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	
	1) Dana Penyesuaian	Obyek Dana Penyesuaian;Jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;Kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah
	c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
	1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Obyek Dana Bagi Hasil Pajak Dari



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Kelompok Pendapatan dan Belanja berdasarkan SAP	Sumber Data
		Provinsi; Jenis Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	d. Bantuan Keuangan	
	1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	Obyek Bantuan Keuangan Dari Provinsi; Jenis Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
	a. Pendapatan Hibah	Jenis Pendapatan Hibah; Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
II	BELANJA	
1.	BELANJA OPERASI	
	a. Belanja Pegawai	- Jenis Belanja Pegawai; Kelompok Belanja Tidak Langsung - Jenis Belanja Pegawai; Kelompok Belanja Langsung
	b. Belanja Barang dan Jasa	Jenis Belanja Barang dan Jasa; Kelompok Belanja Langsung yang terdiri dari : - Obyek Belanja Bahan Pakai Habis; - Obyek Belanja Bahan/Material; - Obyek Belanja Jasa Kantor; - Obyek Belanja Premi Asuransi; - Obyek Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor; - Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan; - Obyek Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; - Obyek Belanja Sewa Sarana Mobilitas; - Obyek Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; - Obyek Belanja Makanan dan Minuman; - Obyek Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya; - Obyek Belanja Pakaian Kerja; - Obyek Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu; - Obyek Belanja Perjalanan Dinas; - Obyek Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Kelompok Pendapatan dan Belanja berdasarkan SAP	Sumber Data
		- Obyek Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dan Non PNS; - Obyek Belanja Perjalanan Pindah Tugas; - Obyek Belanja Pemeliharaan; - Obyek Belanja Jasa Konsultansi; - Rincian Obyek Belanja Barang Untuk Hadiah Lomba; Obyek Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga; - Obyek Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD; - Obyek Belanja Barang dan Jasa BLUD; - Obyek Belanja Transport Lokal Non PNS; - Obyek Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat; - Obyek Belanja Sewa Lahan Pertanian; - Obyek Belanja Barang dan Jasa Dana BOS; - Obyek Belanja Sewa Alat Dapur. Jenis Belanja Pegawai; Kelompok Belanja Langsung yang terdiri dari: - Obyek Honorarium PNS/Non PNS - Obyek Belanja Pegawai BLUD
	c. Belanja Hibah	- Rincian Obyek Belanja Barang yang Diserahkan kepada masyarakat dan Belanja Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga; Obyek Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga; Jenis Belanja Barang Jasa; Kelompok Belanja Langsung - Jenis Belanja Hibah; Kelompok Belanja Tidak Langsung
	d. Belanja Bantuan Sosial	Jenis Belanja Bantuan Sosial Kelompok Belanja Tidak Langsung
2.	BELANJA MODAL	
	a. Belanja Modal Tanah	Obyek Belanja Modal Pengadaaan Untuk Bangunan Bukan Gedung; Jenis Belanja Modal; Kelompok Belanja Langsung



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Kelompok Pendapatan dan Belanja berdasarkan SAP	Sumber Data
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Jenis Belanja Modal; Kelompok Belanja Langsung yang tersiri dari : • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat ; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan • Tanaman/Alat Penyimpan; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Komputer; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Studio; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Kelompok Pendapatan dan Belanja berdasarkan SAP	Sumber Data
		Laboratorium Lingkungan Hidup; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jenis Belanja Modal; Kelompok Belanja Langsung yang tersiri dari : • Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya • Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jenis Belanja Modal; Kelompok Belanja Langsung yang tersiri dari : • Obyek Belanja Modal Pengadaan Jalan; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Jembatan; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah; • Obyek Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum;



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Kelompok Pendapatan dan Belanja berdasarkan SAP	Sumber Data
		- Obyek Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik; - Obyek Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Jenis Belanja Modal; Kelompok Belanja Langsung yang tersiri dari : - Obyek Belanja Modal Pengadaan Buku; - Obyek Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan; - Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya; - Obyek Belanja Modal Pengadaan Tanaman; - Obyek Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi; - Obyek Belanja Modal BLUD; - Obyek Belanja Modal Dana BOS
3.	BELANJA TAK TERDUGA	
	Belanja Tak Terduga	Jenis Belanja Tidak Terduga; Kelompok Belanja Tidak Langsung
III	TRANSFER	
1.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	
	a. Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	- Obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa; Jenis Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes; Kelompok Belanja Tidak Langsung - Obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa; Jenis Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes; Kelompok Belanja Tidak Langsung - Rincian Obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Lembaga/Instansi; Obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kab/Kota; Jenis Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes; Kelompok Belanja Tidak Langsung
	b. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rincian Obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kab/Kota; Obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Kelompok Pendapatan dan Belanja berdasarkan SAP	Sumber Data
		Daerah kepada Kab/Kota; Jenis Belanja Bagi Hasil Kepada Prov.Kab/Kota dan Pemdes; Kelompok Belanja Tidak Langsung
2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	
	a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Obyek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa; Jenis Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan; Kelompok Belanja Tidak Langsung
	b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Obyek Belanja Bantuan Kepada Partai Politik; Jenis Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan; Kelompok Belanja Tidak Langsung
IV	PEMBIAYAAN	
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	a. Penggunaan SILPA	Jenis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya; Kelompok Penerimaan Pembiayaan
	b. Penerimaan Kembali Piutang	Jenis Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman; Kelompok Penerimaan Pembiayaan



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.7.3 Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016

Berdasarkan pasal 9 Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodeifikasi Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah harus menerapkan peraturan tersebut paling lambat pada Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019. Konversi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 sesuai Permendagri 108 dan Permendagri 64 dapat disajikan sebagai berikut:

I. ASET LANCAR – PERSEDIAAN

Tabel 114. Konversi Permendagri 64 ke Permendagri 108 - Persediaan

Permendagri 108			Permendagri 64		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.1.7.01	Barang Pakai Habis		1.1.7.01	Barang Pakai Habis	
1.1.7.01.01	Bahan	3.701.861.045,80	1.1.7.01.06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	31.059.140,00
			1.1.7.01.07	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	36.400.000,00
			1.1.7.01.08	Persediaan Isi Tabung Gas	2.320.000,00
			1.1.7.01.09	Persediaan Isi Tabung Oksigen	0,00
			1.1.7.02	Persediaan Bahan/Material	
			1.1.7.02.01	Persediaan Bahan Baku Bangunan	143.246.599,00
			1.1.7.02.02	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	0,00
			1.1.7.02.03	Persediaan Bibit Ternak	0,00
			1.1.7.02.05	Persediaan Bahan Kimia	40.049.482,00
			1.1.7.02.07	Persediaan Bahan Peralatan	166.067.886,00
			1.1.7.02.10	Persediaan Bahan Pupuk Tanaman	2.375.000,00
			1.1.7.02.12	Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya	531.890.938,80
			1.1.7.02.13	Persediaan Pakaian Kerja	4.420.000,00
			1.1.7.02.14	Persediaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.744.032.000,00
	Total Bahan	3.701.861.045,80			3.701.861.045,80
1.1.7.01.02	Suku Cadang	0,00	1.1.7.02	Persediaan Bahan/Material	
			1.1.7.02.25	Persediaan Suku Cadang Kesehatan	0,00
	Total Suku Cadang	0,00			0,00
1.1.7.01.03	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	6.554.114.464,07	1.1.7.01	Barang Pakai Habis	
			1.1.7.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.759.232.053,07
			1.1.7.01.02	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00
			1.1.7.01.03	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	206.288.635,00
			1.1.7.01.04	Persediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	18.100.500,00
			1.1.7.01.05	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	225.141.966,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Permendagri 108			Permendagri 64		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
			1.1.7.01.10	Persediaan Alat Kesehatan/Alat Lab. Habis Pakai	2.544.542.486,00
			1.1.7.01.11	Persediaan Cinderamata/Piagam/Karangan Bunga	139.453.200,00
			1.1.7.01.12	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	39.060.083,00
			1.1.7.01.13	Persediaan Bahan Cetak	1.622.295.541,00
			1.1.7.01.14	Persediaan Perlengkapan Keamanan	0,00
	Total Alat/Bahan Kegiatan untuk Kantor	6.554.114.464,07			6.554.114.464,07
1.1.7.01.04	Obat-obatan	13.570.626.163,00	1.1.7.02	Persediaan Bahan/Material	
			1.1.7.02.04	Persediaan Bahan Obat-obatan	13.570.626.163,00
	Total Obat-obatan	13.570.626.163,00			13.570.626.163,00
1.1.7.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	5.027.770.950,00	1.1.7.03	Persediaan Barang Lainnya	
			1.1.7.03.01	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	4.540.246.950,00
			1.1.7.03.02	Persediaan Barang Hadiah Lomba	487.524.000,00
	Total Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	5.027.770.950,00			5.027.770.950,00
1.1.7.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	-	-	-
	Total Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00			
1.1.7.01.07	Natura dan Pakan	33.457.623,00	1.1.7.02	Persediaan Bahan/Material	
			1.1.7.02.06	Persediaan Bahan Makanan Pokok	0,00
			1.1.7.02.08	Persediaan Bahan Sembako	14.900.000,00
			1.1.7.02.09	Persediaan Bahan Pakan Hewan	2.833.750,00
			1.1.7.02.24	Persediaan Makanan dan Minuman Pasien	15.723.873,00
	Total Natura dan Pakan	33.457.623,00			33.457.623,00
1.1.7.01.08	Persediaan Penelitian	0,00	1.1.7.02	Persediaan Bahan/Material	
			1.1.7.02.11	Persediaan Bahan Praktek/Pelatihan	
	Total Persediaan Penelitian	0,00			
1.1.7.01.09	Persediaan Dalam Proses	0,00	-	-	-
1.1.7.02	Barang Tak Habis Pakai				
1.1.7.02.01	Komponen	0,00	-	-	-
1.1.7.02.02	Pipa	0,00	-	-	-
	Total Barang Tak Habis Pakai	0,00			
1.1.7.03	Barang Bekas Dipakai				-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Permendagri 108			Permendagri 64		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.1.7.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	-	-	-
	Total Barang Bekas Dipakai	0,00			

II. ASET TETAP

Tabel 115. Konversi Permendagri 64 ke Permendagri 108 – Aset Tetap

Permendagri 108			Permendagri 64			Permendagri 17		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.3.2	Peralatan dan Mesin		1.3.3	Gedung dan Bangunan		03.12	Monumen	
1.3.2.18	Rambu-Rambu	700.556.360,00	1.3.3.09	Rambu-Rambu	700.556.360,00	03.12.07	Rambu-Rambu	700.556.360,00
1.3.3.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara		1.3.3.10	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara		03.12.08	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1.3.2	Peralatan dan Mesin		1.3.5	Aset Tetap Lainnya			Aset Tetap Lainnya	
1.3.2.19	Peralatan Olahraga	492.425.000,00	1.3.5.05	Alat Olahraga Lainnya	492.425.000,00	02	Alat Olahraga Lainnya	492.425.000,00

5.7.4 Perubahan Status Puskesmas dari FKTP menjadi BLUD

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka mulai Tahun 2019 seluruh Puskesmas di Kabupaten Blitar sebanyak 24 (dua puluh empat) berubah status dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Peraturan Bupati Blitar Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan BLUD Puskesmas yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar.

Sebagai konsekuensi dari perubahan status menjadi BLUD, Puskesmas selain sebagai entitas akuntansi, juga merupakan entitas pelaporan yang berkewajiban menyusun Laporan Keuangan BLUD sebanyak 7 Laporan yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.8. Penutup

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, untuk itu masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaannya.

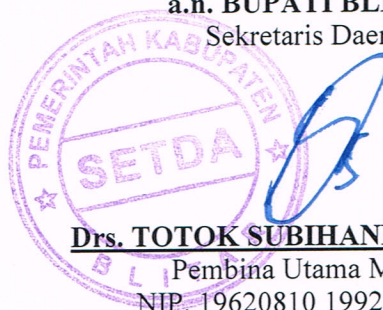
Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ini telah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semoga Catatan atas Laporan Keuangan ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan untuk evaluasi perbaikan Laporan Keuangan kedepan. Akhirnya semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan meridhloi upaya yang telah kami lakukan.

Blitar, 31 Agustus 2020

a.n. **BUPATI BLITAR**

Sekretaris Daerah



Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19620810 199203 1 009